

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1300, 2015

KEMENPU-PERA. Rencana Strategis. Tahun
2015-2019.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13.1/PRT/M/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Renstra Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;**
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.**
- 2. Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari Renstra**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bagi internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi uraian tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis (*outcome/impact*), arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program, sasaran program (*outcome*), kegiatan dan sasaran kegiatan (*output*), target capaian, serta pendanaan.
- (2) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

Pasal 4

- (1) Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II atau Unit Kerja Mandiri sesuai dengan RPJMN dan RPJP.
- (2) Perwujudan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi capaian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah dituangkan dalam Renja Kementerian sesuai Unit Organisasi Eselon I masing-masing.

Pasal 6

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

M. BASUKI
HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT****NOMOR****13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-
2019****BAB I****PENDAHULUAN**

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan peningkatan efektifitas pelebagaan PUG ke dalam budaya internal organisasi, mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi dengan aspek gender; serta mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh unit organisasi.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih aman, nyaman, meningkatkan kesejahteraannya, serta dapat mengekspresikan dirinya secara maksimal. Lebih jauh, diharapkan pelayanan publik yang baik dapat memfasilitasi dunia usaha nasional dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Dalam melaksanakan hal tersebut, tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden No. 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam upaya untuk mendukung mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pengusahaan

penyediaan pembiayaan dan penyediaan rumah, industri konstruksi yang kompetitif, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.

1.1 KONDISI

1.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Air

Selama periode tahun 2010-2014, capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Adapun untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 28 waduk dan 7 diantaranya telah selesai. Pencapaian ini telah menambah jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 211 buah. Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1332 buah. Selain itu juga telah dilakukan upaya rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.207 waduk/embung/situ/ bangunan penampung air lainnya, serta konservasi terhadap kawasan sumber air di 36 kawasan. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi 12,61 milyar M³, serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 Ha.

Sebagai contoh, manfaat waduk yang telah selesai dibangun yaitu Waduk Marangkayu yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Waduk ini akan bermanfaat untuk persediaan suplai kebutuhan air irigasi bagi 3.000 Ha sawah, suplai air baku dengan kapasitas 200 liter/detik, pembangkit listrik dengan daya 1.350 KWH, serta sebagai objek wisata.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar 68,87%, untuk itu pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 M³/detik, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 M³/detik. Selain itu, pada periode 2010-2014 juga telah dilakukan rehabilitasi prasarana air baku dengan kapasitas sebanyak 34,12 M³/detik serta operasi dan pemeliharaan untuk 47,47 M³/detik. Namun demikian, Kapasitas IPA PDAM sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 M³/detik sehingga terdapat idle capacity sebanyak 6,41 M³/detik.

Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya yang meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan. Upaya pembangunan jaringan irigasi permukaan telah dilakukan seluas 429.739 Ha, jaringan irigasi rawa seluas 202.386 Ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 Ha. Selain itu juga dengan

upaya rehabilitasi Irigasi permukaan seluas 2.021.439 Ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 Ha, dan Jaringan Irigasi Air tanah (JIAT) seluas 42.131 Ha. Sedangkan melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan seluas 2.479.412,37 Ha, jaringan irigasi rawa seluas 1.275.352 Ha, dan JIAT seluas 43.840 Ha. Kondisi jaringan permukaan yang menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah mencapai 77,46% dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54%.

Selanjutnya dalam rangka pengendalian daya rusak air pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 1.447,94 Km, rehabilitasi sepanjang 1.131,72 Km, serta operasi dan pemeliharaan sepanjang 2.091,81 Km. Pada periode itu pula, untuk prasarana dan sarana pengendali lahar/sedimen telah dibangun sebanyak 180 buah, direhabilitasi sebanyak 140 buah serta yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sebanyak 293 buah.

Beberapa contoh upaya pengendalian lahar/sedimen pada periode tersebut telah dilaksanakan pembangunan beberapa sarana diantaranya pembangunan pengendali sedimen yang berlokasi di Kabupaten Gowa-Sulawesi Selatan yang diperuntukkan bagi pengendalian runtuh dan longsoran dinding kaldera Gunung Bawakaraeng. Longsoran ini mengakibatkan terjadinya bencana aliran debris yang dahsyat yang berdampak pada terjadinya pendangkalan dan perubahan morfologi di Sungai Jeneberang, serta peningkatan sedimentasi di Waduk Bili-Bili. Pembangunan prasarana pengendali sedimen dibagi menjadi 3 bagian yaitu: (1) di hulu berupa prasarana pengendali sedimen berupa 7 bangunan sabo dam; (2) di tengah berupa 8 bangunan consolidation dam; dan (3) di hilir berupa sand pocket. Sabo Dam Bawakaraeng berfungsi untuk menstabilkan dasar sungai, mengurangi gerakan sedimen sekunder dari endapan sedimen, mengurangi erosi lateral, erosi dan endapan sedimen, mengendalikan erosi tebing sungai selama waktu banjir, menampung dan mengatur endapan aliran debris dari hulu serta mengarahkan aliran sedimen atau arah aliran.

Contoh lain dalam aspek pengendalian banjir pada periode 2010-2014 yaitu telah selesainya pembangunan Kanal Banjir Timur memiliki panjang kanal 23,5 Km dan kedalaman kanal 3 - 7 M yang melalui 13 Kelurahan, Kanal Banjir Timur ini diharapkan mampu mengalirkan debit banjir dengan periode ulang 100 tahunan dan dilengkapi dengan 3 buah Weir, 7 Buah Inlet dan 4 Buah Outlet. Selain itu juga diperuntukkan sebagai kawasan konservasi air untuk dijadikan proyek percontohan green infrastructure dan menciptakan nuansa waterfront city di masa depan. Selain itu juga diharapkan melayani sistem drainase pada wilayah seluas 207 Km² (catchment area), melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 256 Km² dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jati Kramat, dan Sungai Cakung, serta mengurangi 13 kawasan genangan (11 Kelurahan di Jakarta Timur dan 2 Kelurahan di Jakarta Utara).

Selanjutnya pada periode 2010-2014 juga untuk pengaman pantai telah dibangun prasarana sepanjang 279,36 Km, direhabilitasi sepanjang 18,10 Km, serta operasi dan pemeliharaan sepanjang 142,03 Km.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya air di tingkat Nasional, selama kurun waktu 2010 - 2014 juga telah diterbitkan sejumlah peraturan dalam pengelolaan SDA yang terdiri dari: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai. Sehingga total peraturan terkait pengelolaan sumber daya air sampai tahun 2014 adalah sebanyak 7 buah Peraturan Pemerintah termasuk di dalamnya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Namun demikian, dengan adanya pembatalan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan No.85/PUU-XI/2015), pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan. Implikasinya, praktek pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum, sehingga perlu dilakukan review dan dibuatkan payung hukumnya, sementara rancangan UU pengganti sedang disusun. Hal ini perlu dilakukan mengingat pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, sehingga lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini tetap harus ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ketiga harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

1.2.2 Penyelenggaraan Jalan

Dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 Km, dan jembatan sepanjang 41.640 M. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dibangun sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 Km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/fly over/underpass/terowongan sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 M. Sebagai ilustrasi salah satu pencapaian pembangunan jembatan adalah Jembatan Kelok 9, yang terdiri dari enam jembatan dengan total panjang 943 M dan jalan sepanjang 2,089 Km.

Total hasil pembangunan jalan bebas hambatan sampai akhir tahun 2014 mencapai 1.030,56 Km. Sebagai ilustrasi, capaian pembangunan jalan bebas hambatan periode tahun 2010-2014 diantaranya yaitu ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran, Nusa Dua- Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjarangan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan Bogor Ring Road.

Selanjutnya pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan untuk kawasan strategis, perbatasan serta wilayah terluar dan terdepan pada tahun 2010-2014 adalah sepanjang 2.660 Km (Jalan: 2.660 Km & Jembatan: 4.341 M).

Untuk kawasan perbatasan, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Tamajuk – Sei Ular Malinau) dan telah tersambung sepanjang 42.07 Km dari rencana sepanjang 1.755 Km, Jalan Perbatasan NTT-RDTL telah dilakukan penanganan sepanjang 54,2 Km dari rencana sepanjang 877 Km dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat termasuk Jalan perbatasan Papua sepanjang 102 Km.

Capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 adalah kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 93,95% (untuk total panjang jalan nasional 38.569 Km) dan utilitas jalan nasional 97,56 Milyar Kendaraan Km. Namun demikian, terdapat penambahan panjang jalan nasional dari jalan daerah dan jalan strategis nasional rencana yang mengakibatkan total panjang jalan nasional menjadi 47.017 Km, sehingga kemantapan pada tahun 2015 menurun menjadi 86 persen. Sedangkan untuk panjang jalan daerah sampai tahun 2014 mencapai panjang 463.399 Km (data RPJMN 2015-2019) dengan tingkat kemantapan mencapai 70% dan untuk Jalan Kabupaten/Kota mencapai 59%.

Untuk mendukung konektivitas nasional, pada periode tahun 2010-2014 diantaranya penanganan jalan di koridor utama pada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, antara lain telah terselesaikannya penanganan jalan Lintas Timur Sumatera, lintas Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi. Sedangkan dalam rangka mendorong industri dan jasa nasional, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Jawa, salah satu pencapaiannya adalah Lingkar Nagreg Jawa Barat dengan panjang 5,3 Km untuk mengatur persimpangan lalu lintas Bandung - Tasikmalaya - Garut. Jalan ini mulai dibangun tahun 2006, dan selesai dibangun serta difungsikan pada awal awal 2011. Selain itu, untuk mendukung Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Kalimantan. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Pontianak – Tayan sepanjang 104,2 Km yang ditujukan untuk memperpendek jarak tempuh Kota Pontianak dengan lima Kabupaten di sekitarnya, juga untuk membuka akses Kabupaten Ketapang ke Ibukota Pontianak yang selama ini belum tembus, sekaligus melanjutkan Jalan Trans Kalimantan poros Selatan. Sedangkan untuk mendukung Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Sulawesi.

Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Maros – Watampone sepanjang 164,88 Km. Selanjutnya untuk memberi dukungan wilayah pintu gerbang pariwisata, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Tol Nusa Dua – Tanjung Benoa sepanjang 10 Km. Jalan tol ini berada di atas permukaan air laut di Teluk Benoa yang menghubungkan wilayah selatan Pulau Bali. Sedangkan untuk mendukung Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua, yang antara lain adalah : Pembangunan Jembatan Merah Putih sepanjang 1.060 M menyeberangi

Teluk Ambon dimulai sejak tahun 2011, serta penanganan 11 ruas jalan strategis sepanjang 3.098 Km di Pulau Papua.

1.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Capaian pada periode 2010-2014 pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi, serta pembinaan Pemda/PDAM. Peningkatan kualitas layanan air minum dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lebih dari 2.853 Kawasan yang dapat meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum sampai tahun 2014 menjadi 70% dengan kapasitas 167.784 l/det atau setara dengan lebih dari 160 juta jiwa yang tertangani. Selain itu peningkatan jumlah layanan air minum juga dilakukan melalui pembinaan kemampuan pemerintah daerah/PDAM yaitu status kinerja PDAM pada tahun 2014 sebanyak 182 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat, dan 74 PDAM tidak sehat. Dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan sanitasi, hingga tahun 2014 terjadi peningkatan prosentase cakupan pelayanan air limbah menjadi 60,9% dengan jumlah jiwa terlayani sebanyak 147 juta jiwa. Selanjutnya juga telah terbangun sarana dan prasarana sanitasi (sampah dan drainase) pada lebih dari 428 kab/kota (terdapat kab/kota berulang) dan 2.352 kawasan. Dengan demikian sampai tahun 2014 telah terbangun sebanyak 2.706 Kawasan.

1.2.4 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sementara itu, untuk capaian pembangunan perumahan 2010-2014 dalam mendukung penyediaan dan pembiayaan perumahan telah dilakukan upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 Twin Block/Tower Block atau 18.216 unit dengan total daya tampung untuk 143.072 jiwa, Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 unit rumah, Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5 Ha, Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 unit, yang mencakup rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan NTT- Timor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat); (3) Perluasan Program Pro- Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 64.757 unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 596.162 unit., PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 unit, dan Fasilitasi Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang); dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui:

Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 370.250 unit melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan sebesar 89.081 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka. Sampai tahun 2014 masih tersisa *backlog* sebanyak 7,6 juta unit rumah.

1.2.5 Pengembangan Wilayah

Sebagai upaya untuk mendorong diakuinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO dan sebagai bentuk implementasi RTRW yang konsisten pada tema-tema budaya/pusaka berbasis penataan ruang, telah difasilitasi 29 kota/ kawasan perkotaan di kabupaten melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Melalui program ini diharapkan Pemda akan melakukan penyusunan rencana aksi P3KP dan mengimplementasikannya sehingga kota yang bersangkutan dapat mempertahankan atau mengembalikan identitas maupun ciri khas sesuatu secara berkelanjutan yang pada gilirannya dapat di promosikan pada tingkat internasional sebagai *World Heritage City*.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada tahun 2013 telah diinisiasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi terhadap 28 Kawasan Perdesaan melalui Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan, fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Penguatan Peran Pemangku Kepentingan, Penyusunan Road Map, Pemantauan Pelaksanaan P2KPB, dan Pembangunan/Pengembangan Fisik yang dominan.

Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana pengembangan kawasan strategis nasional berbasis rencana tata ruang.

1.2.6 Pembinaan Konstruksi

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa sejarah kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB terus meningkat dari hanya sebesar 3,9% di tahun 1973 hingga sebesar 9,99% dari PDB tahun 2013 dan memberikan kontribusi lapangan kerja kepada 5,67% dari total angkatan kerja.

Walaupun mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, sektor konstruksi nasional berada pada kondisi yang kurang menggembirakan. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penghambat investasi konstruksi di Indonesia - disamping kualitas birokrasi pemerintahan dan pengaturan tenaga kerja - untuk mendorong pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu daya saing sektor konstruksi baik produktifitas dan efisiensi maupun kreatifitas dan inovasi masih terbatas. Berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur, baik yang bersifat makro seperti Indeks Daya Saing Global maupun yang bersifat mikro seperti

perbandingan keuntungan bersih (*net profit*) dan nilai penjualan (*annual sales*) atau nilai penjualan dengan total biaya pegawai kontraktor nasional menunjukkan kinerja produktifitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.

Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian dan tantangan- tantangan kedepan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri melalui berbagai upaya pembinaan, mulai dari aspek pengat pengaturan, pemberdayaan, sampai dengan pengawasan.

1.2.7 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Dalam aspek penyelenggaraan negara, pada era reformasi birokrasi ini, publik beropini bahwa penyelenggara negara melakukan pemborosan, pelayanannya buruk, KKN dan pengawasannya mandul. Hasil survey KPK tahun 2011 terhadap 15.540 responden menunjukkan bahwa nilai dari indeks integritas nasional 6,31, indeks integritas pusat 7,07, indeks integritas vertikal 6,40, indeks integritas daerah 6,00 dan integritas total pusat (pusat + vertikal) 6,48 dan integritas total daerah (daerah + vertikal) 6,24. Untuk indeks persepsi korupsi sesuai data *transparency international*, Indonesia masih rendah (2,8 dari 10). Sedangkan *Economic Forum* menunjukkan bahwa korupsi yang menjadi penghambat kedua untuk kemudahan berusaha pada tahun 2010 - 2011 mempunyai skor 16 terhadap 30 pada ratio 0,53. Selain itu hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada instansi pusat menunjukan adanya upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang merupakan sub indikator yang nilainya masih rendah dibawah 6. Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang masuk dalam penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi KPK (PIAK KPK) dengan penilaian pada awal tahun 2013 mendapat nilai 6,3 sehingga tidak termasuk lagi dalam program penilaian PIAK KPK. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi ini merupakan kegiatan KPK dalam mendorong K/L/Pemda untuk membangun sistem anti korupsi di dalam instansinya dengan cara melakukan *self assessment* terhadap inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya yang kemudian diverifikasi oleh KPK.

Namun demikian, kondisi sumber daya manusia Auditor Kementerian Pekerjaan Umum saat ini adalah jumlah auditor sebanyak 148 orang yang terdiri dari 76 orang pendidikan teknik dan 72 orang non teknik yang secara kualitas kompetensinya di bidang pengawasan infrastruktur masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan terobosan diklat keteknikan dan non keteknikan dengan bekerja sama dengan BPKP dan YPIA maupun lembaga lainnya dan sekaligus melakukan *assessment* untuk masing-masing bidang. Pengendalian dan pengawasan pada Kementerian Perumahan Rakyat dilakukan secara bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP yang telah mengembangkan penerapan SPIP dengan menyusun peta risiko melalui kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) di 3 unit kerja, yaitu: Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya dan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

1.2.8 Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2014, Kementerian PU berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit atas LK TA 2013. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dalam pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan kinerja keuangan di Kementerian PU dibandingkan periode-periode sebelumnya. Yang artinya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penatausahaan dan pelaporan keuangan serta penataan BMN cukup berhasil. Sebagai perbandingan, opini hasil audit dari BPK-RI terhadap LK Kementerian PU pada tahun 2009 - 2011 telah naik dari "Disclaimer" menjadi "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", dan tahun 2012 naik kembali menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - Dengan Paragraf Penjelasan".

Dalam aspek penyusunan rencana kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya telah disusun 1 Renstra Kementerian, 1 Revisi Renstra Kementerian, 1 Review Renstra Kementerian tahun 2010-2014, serta 1 Renstra Sekretariat Jenderal, 1 Review Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, serta 5 LAKIP Kementerian dan 5 LAKIP Sekretariat Jenderal.

Selain itu telah disusun 5 RKP dan 5 Nota Keuangan, 140 pelaporan E-Monitoring Satker Kementerian PU, pembinaan bendahara 101 angkatan, pembinaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 90 angkatan, pembinaan BUMN Perum 35 angkatan, penyusunan peraturan perundang-undangan 129 dokumen dan penyelesaian perkara hukum 89 litigasi, pendapat hukum dan pendampingan hukum 25 Non Litigasi, pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN 293 dokumen, pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN 6 laporan, sistem dan data base BMN 9 unit, pendidikan dan pelatihan prajab serta teknis dan fungsional sebanyak 903 angkatan, pembuatan 1 *data center*, pembuatan 2.607 peta tematik, penyusunan 150 buku informasi statistik PU, peliputan dan pemberitaan di media masa sebanyak 1.365 kali, publikasi melalui media sebanyak 487 kali, peliputan kunjungan kerja dan rapat 271 kali, pembangunan dan perbaikan gedung 4 unit.

Untuk capaian target dukungan manajemen, sarana dan prasarana periode 2010-2014 pada Kementerian Perumahan Rakyat meliputi antara lain tersusunnya 3 RPP yang masih menunggu persetujuan para menteri dan kepala lembaga terkait, yaitu: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) meliputi: RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; serta RPP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman); dan (2) 2 (dua) RPP yang masih dalam tahap harmonisasi Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi: RPP Tentang Pengerahan dan Pemupukan Dana Serta Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan; dan RPP Tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaan SAKIP Kementerian Perumahan Rakyat telah mensejajarkan diri pada peringkat B (Baik) di tingkat Kementerian/Lembaga. Sedangkan Peningkatan Opini atas Laporan

Keuangan dari BPK RI terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun 2013 kembali meraih status predikat WTP. Penyerahan aset hasil pembangunan Rusunawa dalam kurun waktu tahun 2005-2011 meliputi Rusunawa yang telah terbangun sebanyak 187 *Twin Block* (TB) melalui Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga sebanyak 14 *Twin Block* dan kepada Pemerintah Daerah dengan mekanisme hibah sebanyak 2 *Twin Block* sehingga jumlah yang telah diserahkan baik kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebanyak 16 *Twin Block*.

Untuk pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat Kepada UKP4 dan Bappenas berupa Laporan Triwulan Capaian Rencana Aksi Prioritas Nasional 4 (Penanggulangan Kemiskinan) dan Prioritas Nasional 6 (Bidang Infrastruktur) dan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dari hasil polling Pemberitaan Program Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II selama masa polling dari Januari hingga Mei 2014 yang dilakukan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) tercatat telah mendapat perhatian dari pers dengan sebanyak 348 berita. Ketertarikan media pada 10 Kementerian teratas dikarenakan memiliki program-program kehumasan yang efektif dalam merangsang para jurnalis untuk melakukan peliputan pemberitaan. Penyediaan Media Center untuk memfasilitasi pemberitaan tentang Kementerian Perumahan Rakyat dengan dilengkapi 15 unit televisi yang berjaringan nasional beserta kelengkapannya.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 70,66% (kategori Baik) pada tahun 2013. Survey ini didasarkan pada kriteria:

(1) Kesesuaian Kebijakan; (2) Sistem Prosedur; (3) Sumber Daya Manusia (SDM); dan (4) Kepuasan Total Terhadap Layanan dan Operasionalisasi Kebijakan Kementerian

Perumahan Rakyat. Terkait sarana dan prasarana, telah dilakukan renovasi ruang kerja, toilet di setiap lantai, ruang serbaguna (aula) pada lantai 9 sebagai sarana untuk rapat

koordinasi dan sarana pengajian pegawai Kementerian Perumahan Rakyat, serta telah dibangun Poliklinik dan perlengkapannya yang telah dapat difungsikan.

1.2.9 Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan juga sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya. Berdasarkan pengalaman, hingga saat ini perhatian terhadap sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya. Investasi pengembangan SDM dalam 5 tahun ke belakang rata-rata hanya 2 permil dari anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara itu peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan maupun pelatihan juga tersebar di berbagai unit kerja dan tidak terkoordinasi

dengan baik serta kurang fokus pada kompetensi substansi teknis. Sedangkan dilihat dari faktor kelembagaan juga kurang mempunyai kewenangan yang memadai untuk pengembangan SDM secara integral. Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia menjadi terabaikan/kurang perhatian, padahal di satu sisi peran sumber daya manusia sangat vital terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sebagai ilustrasi, selama kurun waktu 2010-2014 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 30.195 pegawai dengan rincian 29.119 pegawai baik pusat maupun daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan 1.076 eks Pegawai Pusat Kementerian Perumahan Rakyat. Alumni pendidikan kedinasan dan vokasi sebanyak 5.801 pegawai dengan rincian 5.789 orang Kementerian Pekerjaan Umum dan 12 orang eks pegawai Kementerian Perumahan Rakyat. Alumni diklat sebanyak 23.330 orang terdiri dari Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan eks. Perumahan Rakyat sebanyak 12.670 orang (54.31%) dan Pegawai Daerah Bidang PU sebanyak 11.736 orang (45.69%).

Apabila dilihat dari pencapaian target hanya sebanyak 50.68% pegawai yang telah mengikuti diklat dari jumlah pegawai sebanyak 25.000 orang. Hal ini tidak lain terjadi karena kebijakan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM sebagai bagian dari dukungan manajemen kegiatan pembangunan infrastruktur ke PU an selama 5 tahun lalu. Sementara itu pengembangan SDM tidak berada dalam satu koordinasi yang utuh mulai dari pengembangan karir, evaluasi kompetensi dan pemantauan kinerja sampai dengan pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi SDM dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut. Secara kuantitas jumlah SDM PUPR yang ada saat ini sejumlah 25.000 pegawai yang terdiri dari 3.800 orang K1 K2 K3, berdasarkan pendidikan berlatar belakang teknik untuk pendidikan teknik SLTP hingga SMA/D3 sebesar 9466 orang atau 45.10%, pendidikan S1/D4 sebesar 8438 orang atau 40,20%, pendidikan teknik S2 sebesar 2997 orang atau 14.28% dan pendidikan S3 sebesar 87 orang atau 0.41%.

Hal ini belum memadai apabila dilihat dari beban kerja atau anggaran yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar kurang lebih Rp 118,5 Trilyun. Selain itu secara kualitas juga lebih tidak memadai lagi hal ini disebabkan faktor pendidikan yang tidak sesuai, mengingat SDM PU-PR didominasi oleh yang berpendidikan tingkat SLTA/SLTP. Selain itu kondisi pegawai saat ini hingga 5 tahun ke depan akan berkurang akibat purna bakti/pensiun rata-rata sekitar 300 - 500 orang.

1.2.10 Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan selama kurun waktu 2010 - 2014 antara lain: (1) Menghasilkan teknologi litbang sebanyak 186 terdiri dari bidang Air 36 teknologi, bidang Jalan Jembatan 84 teknologi, bidang Permukiman 35 teknologi dan Sosekling 31 teknologi; (2) NSPM litbang sebanyak 361 terdiri dari bidang Air 123 NSPM, bidang Jalan Jembatan 177 NSPM, bidang permukiman 22 NSPM dan Sosekling 9 NSPM;

(3) Melayani advis teknik sebanyak 293 Terdiri dari bidang Air 115 advis teknik, bidang Jalan dan Jembatan 77 advis teknik, bidang permukiman 82 advis teknik dan Sosekling 19 advis teknik; (4) Melayani pengujian sebanyak 3170 terdiri dari bidang Air 172 pengujian, bidang Jalan dan Jembatan 268 pengujian, bidang Permukiman 2730 pengujian; dan (4) Melakukan *joint cooperation program* sebanyak 72 terdiri dari bidang Air 2 *joint cooperation program*, bidang Jalan Jembatan 6 *joint cooperation program*, bidang Permukiman 53 *joint cooperation program* dan Sosekling 11 *joint cooperation program*. Hingga tahun 2014, pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan terutama untuk teknologi dan NSPM adalah sebagai berikut : teknologi bidang Air 79 teknologi, bidang Jalan dan Jembatan 84 teknologi, bidang Permukiman 35, serta teknologi bidang Sosekling 39 teknologi. Untuk NSPM litbang terdiri dari bidang Air 157 NSPM, bidang Jalan Jembatan 177 NSPM, bidang permukiman 22 NSPM dan sosekling 11 NSPM.

Beberapa hasil Litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain, Produk Teknologi Sumber Daya Air: (1) Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama (Pendeteksian kerusakan bangunan air utama dengan georadar pada bendungan); (2) Pengkajian korelasi alat *Dynamic Penetrometer* (DP) dan alat *Static Penetrometer* (sondir) pada bendungan tipe urugan; (3) Pengkajian pemanfaatan tinggi tekan untuk energi pada pintu-pintu air bendung gerak. (4) Teknologi Pengendalian Banjir Perkotaan (Teknologi Pemodelan Banjir Perkotaan; (5) Teknologi Pondasi Tanggul Lepas Pantai; (6) Teknologi Banjir Perkotaan Lingkungan Keairan; dan (7) R-0 Pedoman Pengelolaan Polder). Selain itu produk Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan meliputi: (1) Teknologi Bahan Perkerasan dengan bahan lokal dan bahan sub standar (batu karang dan pasir laut) meliputi spesifikasi, pedoman perencanaan dan pelaksanaannya; (2) Teknologi preservasi jalan berupa tambalan cepat mantap, *minosurfacing*, *slurry seal*, *chip seal*, *fog seal*; (3) Teknologi Preservasi bagi *Crack Filling* dan *Sealing*; (4) Teknologi *Thin Overlay*; dan (5) Teknologi Perkerasan Kaku untuk Jalan Beton Konvensional. Untuk Produk Teknologi Permukiman meliputi: (1) Prototipe *Green Building* di Turangga, Bandung; (2) Aplikasi Tekno *Green Building* berbasis hasil Litbang Permukiman di Medan; (3) Prototipe Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Sistem Mobile; (4) Pengembangan Prototipe Sistem Sambungan Rumah dan Model Daur Ulang Limbah Komunal; (5) Prototipe Penerapan Teknologi Bidang Permukiman (Tongkonan) di Toraja; (6) Penataan kawasan berbasis *eco-settlement*; (7) Model Fisik Daur Ulang Air Limbah Di Kawasan Pesisir; (8) Aplikasi Teknologi Bahan Bangunan Lokal Pada Model Bangunan Tradisional di Wilayah Kerja di NTB (*Techno Village*); (9) Penerapan Panel Struktur Risha pada Bangunan fasilitas Umum dengan Dinding Pengisi Bata Lusi di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat diantaranya meliputi: pertama, pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik. Sebagai ilustrasi, persentase penduduk miskin dapat diturunkan hingga 11,37% (2013), walaupun Indeks Gini perlu mendapatkan perhatian, mengingat perbedaan masih relatif lebar yaitu menunjuk pada angka 0,413 pada tahun 2013. Kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271 juta jiwa di tahun 2020, *McKinsey* memprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori “*consuming class*” akan meningkat ke angka 85 juta jiwa pada tahun 2020 sebagai golongan menengah. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Disamping itu, pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam yang cenderung tidak terkendali, dan pada akhirnya dapat menurunkan daya dukung. Ketiga, arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan, seperti: kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air), minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan, meningkatnya sektor informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal (*urban sprawl*). Sebagai ilustrasi, dalam kurun 4 dekade terakhir (1970 - 2010) telah terjadi kenaikan populasi perkotaan di Indonesia sebanyak 6 kali lipat yang membawa implikasi pada belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, padahal perkotaan merupakan mesin pertumbuhan dan ujung tombak daya saing. Keempat, perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan. Sebagai contoh, perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir terancam rob akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah seperti di Jakarta dan Semarang. Hal ini terutama disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan. Kelima, secara geografis Indonesia terletak di kawasan “*ring of fire*” yang memiliki banyak gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian gempa bumi. Sebagai contoh, pada tahun 2012 terjadi 363 gempa di atas 5 skala Richter. Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keenam, kesenjangan wilayah timur dan barat, Bappenas 2012 mencatat fakta bahwa beberapa wilayah bahkan bertumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Sementara itu, KTI yang begitu kaya akan sumber daya alam, kelautan, mineral, dan hutan selama puluhan tahun hanya menyumbang 18% dari perekonomian nasional. Hal ini bisa diakibatkan wilayah di bagian timur Indonesia sangat kurang pembangunan infrastrukturnya. Ketujuh, pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga berimplikasi pada kerusakan alam. Sebagai contoh, terjadinya sedimentasi pada badan-badan air, terjadinya longsor, dan daya tampung reservoir yang menurun secara signifikan.

Kedelapan, permasalahan utama di bidang maritim adalah kurang terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan penyeberangan, maupun pengembangan kota pesisir dengan pembangunan infrastruktur PUPR, terutama jalan dan sumber daya air. Kesembilan, sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Sinergi tersebut masih perlu terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif mengingat infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* (dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan batasan kewenangan pusat dan daerah. Sebagai ilustrasi, kemampuan Pemda, terutama dalam aspek pendanaan untuk melakukan operasi dan pemeliharaan infrastruktur serta komitmen (*political will*) masih harus ditingkatkan. Terkait hal ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dari seluruh kabupaten dan kota, realisasi belanja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai rata-rata 14,24 persen dari seluruh total belanja Pemerintah Daerah, dan pada tahun 2012 justru menurun hanya mencapai 13,95 persen, bahkan 38,57 persen diantaranya di bawah 10 persen.

1.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Air

Potensi sumber air Indonesia sangat besar yaitu 3.9 triliun M³ namun yang dimanfaatkan baru mencapai \pm 13,8 milyar M³ atau \pm 58 M³ perkapita yang dapat dikelola melalui reservoir. Angka ini jauh lebih rendah dari Thailand 1.277 m³ perkapita dan satu tingkat di atas Ethiopia (38 m³/Kapita).

Dalam aspek ketahanan energi, tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 298 GWh (Sumber: RUKN 2010-2029). Total kapasitas terpasang pembangkit nasional hingga Juni 2012 adalah sebesar 40.438 MW, yang mana 4.655 MW diantaranya terdiri Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA, PLTM dan PLTMH). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional dalam rangka ketahanan energi tersebut, beberapa waduk direncanakan akan dikembangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), diantaranya: Waduk Karian, Jatigede, Jatibarang, Bajulmati, Bendo, Lolak, Kuwil, Karalloe, Tugu, Titab, Marangkayu.

Selanjutnya, kontribusi sektor irigasi terhadap produksi padi relatif besar yaitu \pm 85% terhadap total produksi padi nasional, namun apabila kerusakan jaringan irigasi tahun 2014 sebesar 16% dapat diatasi, akan lebih meningkatkan kontribusi irigasi terhadap produksi padi tersebut.

Namun demikian, ke depan masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti: pertama, dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. Kedua, masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan,

erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi. Sebagai ilustrasi, pengaruh perubahan iklim, seperti peningkatan muka air laut akan membawa perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara. Ketiga, jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi penurunan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Pusat dan dorongan kepada daerah untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Daerah. Keempat, pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah.

1.2.2 Penyelenggaraan Jalan

Kualitas infrastruktur jalan di Indonesia dalam mendukung konektivitas dan daya saing saat ini berada pada tren yang cukup positif. Berdasarkan penilaian dari *Global Competitiveness Index*, kualitas infrastruktur jalan menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013-2014, infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari nilai 3,4 pada tahun 2012-2013 menjadi 3,7 dari 7 pada tahun 2013-2014 dan berada pada urutan ke 78 dari 148 negara. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan untuk menjaga tren positif kualitas infrastruktur jalan di Indonesia, sehingga mampu mencapai nilai yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Pada akhir tahun 2014, kondisi kemandirian jalan nasional sudah mampu mencapai 94%.

Selain itu, peran infrastruktur khususnya infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing perekonomian suatu negara. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai barang modal yang secara langsung dapat menghasilkan produksi (*Economic Directly Productive Capital*), tapi juga barang modal yang menjadi landasan bagi perekonomian yang secara tidak langsung dapat menghasilkan atau meningkatkan proses produksi, seperti fasilitas transportasi dan irigasi (*Economic Overhead Capital*), serta sebagai sarana penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi (*Social Overhead Capital*).

Selanjutnya infrastruktur jalan juga berperan sangat penting sebagai tulang punggung (*backbone*) dalam pergerakan ekonomi dan daya saing nasional. Percepatan

penyediaan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi salah satu upaya bagi Indonesia untuk dapat keluar dari negara *middle income trap*.

Selain itu, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, merupakan salah satu formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur jalan dapat membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, investasi, serta dapat menjadi

pendorong perputaran/siklus kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

Dukungan konektivitas nasional dalam penguatan daya saing masih menghadapi beberapa kendala. Kendala yang paling mendasar adalah kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan berimbas pada *trip time* (jam/100 Km) masih cukup tinggi yaitu 2,7 jam/100 Km, jika dibandingkan dengan negara tetangga, dimana 100 Km dapat dicapai kurang lebih dalam 1-1,5 jam.

Indonesia tercatat masih belum bersahabat dengan dunia usaha. Menurut laporan World Bank, posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha (*Rankings of the Ease of Doing Business*) hanya mampu menempati peringkat ke-120. Penilaian ini salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya transportasi, selain indikator lain seperti prosedur dan administrasi. Hal ini tidak lepas dari tingginya biaya logistik di Indonesia, yang mana rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB masih pada kisaran 27%. Berdasarkan studi World Bank, skor *logistic performance index* (LPI) Indonesia hanya mencapai 2,94 dan hanya menempati peringkat ke-53 pada tahun 2014.

Meskipun kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi, kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%. Padahal, sebagai sebuah sistem jaringan, jalan daerah memegang peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kurang baiknya kinerja jaringan jalan di Indonesia yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti waktu tempuh yang cukup lama serta tingginya biaya logistik.

Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor. Mengingat pada periode 2015-2020 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, diperkirakan kegiatan ekonomi akan meningkat, yang akan mendorong pertumbuhan pergerakan kendaraan bermotor. Tanpa adanya tindakan, hal ini dapat memperburuk kondisi kemacetan di kawasan perkotaan.

Selain itu, backlog pengembangan jaringan jalan tol masih cukup tinggi, yang berakibat pada *expressway density* rendah, yaitu sekitar 0,05 Km/1.000 penduduk. Pembangunan jalan tol masih terhambat masalah pengusahaan, pengadaan lahan, dan kelembagaan. Disamping itu, mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban berlebih juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

1.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak, pada tahun 2020.

Selain itu, pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan, tetapi merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja.

Peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan, seperti 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA *Open Dumping* yang menghasilkan gas metana (CH₄). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi.

Selain itu, dalam aspek akses air minum, masih perlunya peningkatan cakupan layanan yang saat ini secara nasional sekitar 70 persen, penurunan kehilangan air, peningkatan kualitas air minum, optimalisasi potensi pendanaan swasta, penerapan tarif *full cost recovery*; optimalisasi penerapan *Good Corporate Governance*; peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, optimalisasi potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air.

Selanjutnya terkait sanitasi, tantangan/permasalahan antara lain: (1) cakupan layanan sanitasi nasional saat ini masih rendah yaitu sekitar 59,7 persen; (2) belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia buang air besar sembarangan); (3) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas; (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi; (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan (6) perlunya peningkatan manajemen aset.

Dalam penanganan permukiman kumuh ada beberapa tantangan/permasalahan antara lain; (1) hasil identifikasi kawasan kumuh pada tahun 2014 mencapai 38.431 Ha di 4.108 Kawasan; (2) perlunya peningkatan peran daerah dalam pengentasan kawasan kumuh, saat ini sekitar 53 persen belum memiliki Perda bangunan gedung; dan (3) peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.

1.2.4 Pembiayaan Perumahan

Beberapa peluang untuk pembiayaan perumahan antara lain: (1) sumber-sumber pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui

pelembagaan yang terintegrasi masih terbuka (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Tabungan Perumahan, Dana Jangka Panjang); (2) Bank BTN sebagai bank untuk pembiayaan perumahan; (3) Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (Koperasi/ *Multifinance*); (4) PT. SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan; (5) penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan perumahan; (6) pemanfaatan sumber dana di luar APBN/APBD; dan (7) perumahan menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten.

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah: (1) masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) masih rendahnya daya beli atau kemampuan (*affordability*) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni; (3) relatif masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*); dan (4) terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat relatif sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*).

1.2.5 Penyediaan Perumahan

Peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

Di samping Pemerintah Daerah, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia usaha seharusnya dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator pengembangan kawasan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan.

Disisi lain, terdapat tantangan dan permasalahan yaitu; (1) dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai; (2) koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal; (3) peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal; (4) efisiensi proses dan mahal biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal; (5) terbatasnya dan mahal

harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan; (6) pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal; (7) masih tingginya backlog kepemilikan rumah; dan (8) pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

1.2.6 Pembinaan Industri Konstruksi Nasional

Jasa konstruksi dikenal sebagai kegiatan yang sangat terfragmentasi. Fragmentasi vertikal terjadi dalam rantai produksi antara produsen material, pemasok, manufaktur, kontraktor spesialis, dan kontraktor general, sementara fragmentasi horizontal terjadi dalam siklus proyek yaitu gagasan, konseptual desain, studi kelayakan, perencanaan detail, pengadaan, konstruksi, penyerahan pekerjaan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Selain permasalahan tersebut, rendahnya mutu masih mewarnai penyelenggaraan konstruksi di Indonesia. Di bidang jalan misalnya, masih terjadi jalan mengalami kerusakan struktural sebelum umur rencana berakhir. Kegagalan konstruksi juga mulai terjadi dalam pengelolaan bendung dan jembatan. Runtuhnya Bendung Situ Gintung tahun 2009 dan Jembatan Kutai Kartanegara pada tahun 2011 dapat menjadi contoh.

Walaupun terdapat beberapa kontraktor nasional terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kemampuan tinggi, daya saing kontraktor nasional secara umum masih rendah. BUK didominasi oleh BUK generalis sehingga kemitraan antar kualifikasi dan klasifikasi belum terwujud.

Lemahnya kemampuan tenaga ahli dan konsultan nasional di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga sangat dirasakan. Pada saat ini hanya terdapat beberapa konsultan nasional yang bereputasi tinggi dan umumnya tidak bekerja di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Luputnya perhatian pemerintah dan terbatasnya kemampuan asosiasi profesi mengawal *billing rate* tenaga ahli yang pantas berakibat langsung pada kemampuan perusahaan konsultan untuk mempertahankan dan membina tenaga ahli serta mengembangkan usahanya serta terjadinya praktek-praktek yang kurang profesional.

Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan. Dari 6,9 juta pekerja, 60% adalah tenaga kasar, 30% tenaga terampil, dan hanya 10% tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi.

1.2.7 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan berperan sebagai *Scientific Backbone* dan sebagai *leader* dalam bidang teknologi infrastruktur dan bertanggung jawab dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air, jalan dan

jembatan, serta permukiman dan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan/permasalahan diantaranya adanya tuntutan penyediaan IPTEK siap pakai untuk: (1) meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya - upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana; (2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi; (3) mengurangi kelangkaan air baku; (4) memperbaiki kualitas air baku (aplikasi UU SDA); (5) menurunkan Biaya Operasional Kendaraan (Aplikasi UU Jalan); (6) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; (7) meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU SDA, UU Sampah); (8) pemanfaatan bahan lokal dan potensi wilayah; (9) perlunya mempercepat proses standarisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, untuk mengantisipasi semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain; (10) perlunya memperluas simpul-simpul pemasyaratkan IPTEK PU dan Perumahan Rakyat, standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, asosiasi dan media informasi; (11) perlunya memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh Depdiknas) untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian para calon peneliti dan perekayasa, sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat *zero growth*; (12) dituntut untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga litbang internasional dalam rangka meningkatkan kompetensi lembaga maupun sumber daya manusia litbang dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan (13) adanya tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbang IPTEK.

1.2.8 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur merupakan bagian dari administrasi publik yang berperan sangat strategis dan kritical dalam pencapaian target-target pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi ideal yang diharapkan dari SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: independen dan netral; berkompeten; produktif; berintegritas; berkesejahteraan; berorientasi pelayanan dan kinerja; dan akuntabel. Ke depan perlu ada perubahan pola pikir (*mindset*) dari ASN, yaitu: dari dilayani menjadi melayani; dari orientasi proses menjadi orientasi outcome; dari menunggu menjadi menjemput; dari inkompeten menjadi kompeten; dari rumit dan tidak fleksibel menjadi sederhana; serta dari koruptif menjadi bersih.

Disisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia, diantaranya: (1) dalam rangka percepatan transformasi pengembangan SDM Kementerian PUPR belum tersusunnya sistem pengembangan SDM mulai dari evaluasi dan pemantauan kinerja, potensi dan kompetensi, pemberdayaan dan penempatan pejabat fungsional dan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi; (2) data kinerja yang menggambarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar

pengembangan karir pegawai dan perencanaan pengembangan pegawai belum terdata secara akurat, sangat kompleks dan belum terintegrasi secara benar; (3) sistem merit pengembangan SDM belum dipetakan secara baik dari awal karir pegawai sampai dengan akhir menjabat. Indikasinya adalah dalam penempatan pegawai kualifikasi keahlian dan keterampilan belum sesuai dengan jabatannya. Hal ini disebabkan oleh pendidikan dan pelatihannya belum merupakan persyaratan jabatan; (4) pegawai Kementerian PUPR yang menduduki jabatan struktural dalam 5 tahun ke depan relatif banyak yang akan pensiun, yaitu pejabat Eselon I s.d IV yang usianya melebihi 51 tahun sebanyak 304 orang atau 18.55% dari seluruh pegawai; (5) potensi dan kompetensi pegawai belum terpetakan seluruhnya, sehingga penempatan aparatur belum “the right man on the right place”, yang menyebabkan kinerja SDM belum maksimal; (6) masih adanya pegawai yang masih berpikir secara tradisional sehingga kurang inovatif dan berdaya saing; (7) penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi; (8) Promosi dan Mutasi Jabatan belum berdasarkan pada Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan yang dipersyaratkan, dan penilaian terhadap aparatur dengan basis kompetensi kinerja belum diterapkan untuk seluruh aparatur Kementerian; (9) sistem remunerasi pegawai berbasis penilaian kinerja dan penerapan sistem reward and punishment belum sepenuhnya diterapkan; dan (10) Kuantitas SDM yaitu 25.000 (dua puluh lima ribu) orang dianggap sudah cukup, namun banyak pejabat yang akan pensiun sedangkan staf pengganti di bawahnya belum cukup matang, sehingga ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

1.2.9 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dengan faktor eksternal yang dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain. Konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi. Sedangkan dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berdasarkan arahan spasial tata ruang.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang mengemuka diantaranya: (1) ketersediaan lahan budi daya terbesar terdapat di wilayah Pulau Kalimantan, yaitu mencapai 31% dan terendah di wilayah Pulau Maluku dan Nusa Tenggara yaitu 4 % terhadap nasional; (2) konversi lahan berupa pertambahan kawasan terbangun masih lebih banyak terjadi di wilayah Jawa selama 2006-2011, yakni mencapai 194,3 ribu Ha per tahun,

Sumatera 125,2 ribu Ha, Kalimantan 32 ribu Ha, Sulawesi 16 ribu Ha, Maluku 5 ribu Ha, Papua dan Nusa Tenggara 7 ribu Ha per tahun; (3) kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi dengan kepadatan rata-rata diatas 500 Jiwa/Km²; (4) secara spasial, wilayah dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara (didas 30%) sementara terendah di Kalimantan (dibawah 10%); (5) distribusi ekonomi wilayah Jawa Bali mendominasi hingga mencapai 58.8% terhadap nasional, Sumatera 23% dan Kalimantan 9.3% sisanya kurang dari 10%; (6) keterpaduan antar program/antar sector yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal; (7) akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke outlet/pemasaran masih sangat terbatas; (8) pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan; (9) pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah masih belum optimal dilakukan; serta (10) kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan makin meningkat dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.

1.2.10 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Saat ini terdapat tuntutan masyarakat untuk menghapuskan praktik KKN yang telah berlangsung lama, membuat pemerintah bertekad untuk melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di segala bidang pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penghapusan KKN tersebut apabila terpenuhi maka akan berpotensi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Selain itu adanya keinginan mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar. Juga adanya dukungan Sistem Akuntansi dan *IT Based System* dalam mendukung pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian PU.

Beberapa tantangan dan permasalahan dalam aspek pengendalian dan pengawasan, diantaranya; (1) pembangunan sarana dan prasarana bidang PU dan perumahan rakyat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; (2) koordinasi penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih lemah yang berdampak pada ketidakjelasan status aset; (3) belum maksimalnya pelaporan gratifikasi sebagai tindak lanjut atas komitmen penerapan gratifikasi; dan (4) perlunya seluruh unit kerja menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui Manajemen Resiko sesuai Instruksi Menteri PU No. 2/IN/M/2011.

1.2.11 Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Beberapa potensi dalam aspek dukungan manajemen diantaranya; (1) citra positif Kementerian PU sebagai penyedia infrastruktur yang andal telah berhasil dibangun melalui pemanfaatan peran serta media (baik konvensional maupun sosial) dan masyarakat serta memaksimalkan fungsi *media relations* seperti konferensi pers, kunjungan ke kantor media massa,

press briefing dan *media gathering*, pameran, media sosial dan *online*, dan peliputan berbagai kegiatan dan produk Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sehingga citra positif tersebut merupakan modal penting dan perlu terus ditingkatkan dalam kerangka pemenuhan tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap layanan infrastruktur; (2) penyelenggaraan data dan sistem informasi diantaranya melalui pembuatan peta profil infrastruktur dan integrasi *Local Area Network* (LAN) telah berhasil mengembangkan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang perlu terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya; (3) adanya upaya pengamanan dan perkuatan hak atas aset tanah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum bersertifikat. Data tahun 2012 aset Kementerian Pekerjaan Umum saja mencakup 24% dari total aset Pemerintah Pusat, terlebih adanya penambahan target dan anggaran yang semakin meningkat akan berimplikasi terhadap jumlah aset; (4) penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat membutuhkan pembaruan NSPK, serta adanya potensi meningkatnya kasus hukum seiring dengan meningkatnya anggaran dan target pembangunan; (5) dokumen Renstra, RKP, Renja, RKAKL, dan Nota Keuangan telah disusun dengan baik dan dijadikan acuan penting oleh seluruh unit organisasi, hal ini mengindikasikan koordinasi relatif cukup baik; (6) predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan perlu terus dipertahankan karena hal ini merupakan gambaran perbaikan penggunaan keuangan negara; serta (7) keberadaan gedung baru sangat menunjang pelaksanaan tugas Kementerian, dan merupakan tambahan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di samping tambahan aset dari eks Kementerian Perumahan Rakyat sehingga beban pemeliharaan dan pengelolaannya akan semakin besar.

Namun demikian, ke depan masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: (1) dalam aspek perencanaan dan penganggaran, kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana perlu ditingkatkan, alokasi anggaran infrastruktur masih 2-3% dari PDB (ideal 5%), efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran perlu dioptimalkan, pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) perlu lebih didukung data yang lengkap dan mutakhir, pelaporan berbasis elektronik (*e-monitoring*) belum optimal sehingga kurva S belum idel; (2) perlunya optimalisasi *clean and good governance*, optimalisasi penerapan sistem akuntansi berbasis "*full accrual*", peningkatan tertib administrasi keuangan serta peningkatan keseragaman pelaporan keuangan; (3) perlunya optimalisasi pengendalian disiplin pegawai, peningkatan reformasi birokrasi oleh setiap pegawai, fasilitasi pengelolaan laporan harta kekayaan pejabat negara, optimalisasi proses mutasi pegawai serta *master plan* organisasi dan tata laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ideal agar stabil; (4) perlunya penyelesaian temuan BPKRI terkait aset/BMN, peningkatan kompetensi SDM pengelolaan dan penatausahaan BMN, penertiban aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui sertifikasi, penyederhanaan pemrosesan dan pelaporan BMN, peningkatan pendataan dan inventarisasi aset meskipun bermacam jenis karakteristik aset, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi aset/BMN dengan pihak luar, dan penanganan aset BMN yang

sudah tidak layak pakai; (5) perlunya peningkatan kesadaran pegawai terkait penghematan energi dan kualitas lingkungan kerja, peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kerja, dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip; (6) perlunya peningkatan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), peningkatan pemanfaatan media sosial dan online dalam pembentukan opini publik yang positif terhadap capaian pembangunan infrastruktur PUPR, dan perlunya dukungan strategi komunikasi publik yang tepat terkait penyebarluasan informasi; (7) perlunya optimalisasi sistem informasi geografis yang terpadu dalam pendataan infrastruktur PUPR, optimalisasi penggunaan TIK dalam pelaksanaan tugas, peningkatan integrasi basis data setiap Satminkal ke dalam satu basis data, dan peningkatan kompetensi SDM terkait TIK; (8) perlunya optimalisasi pembinaan sistem dan tertib peraturan dan per-UU-an serta bantuan hukum, percepatan penyelesaian peraturan bidang PUPR melalui dukungan koordinasi, harmonisasi serta peningkatan kompetensi SDM dalam pembahasan dengan pihak-pihak terkait, peningkatan tertib dokumen sebagai alat bukti pendukung dalam penanganan perkara, peningkatan penanganan rumah negara, serta pembuatan jaringan dokumentasi informasi hukum terpusat.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi matahunkedepansertasarananutamadandan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 . Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

2.2 MISI

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 - 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.3 TUJUAN

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

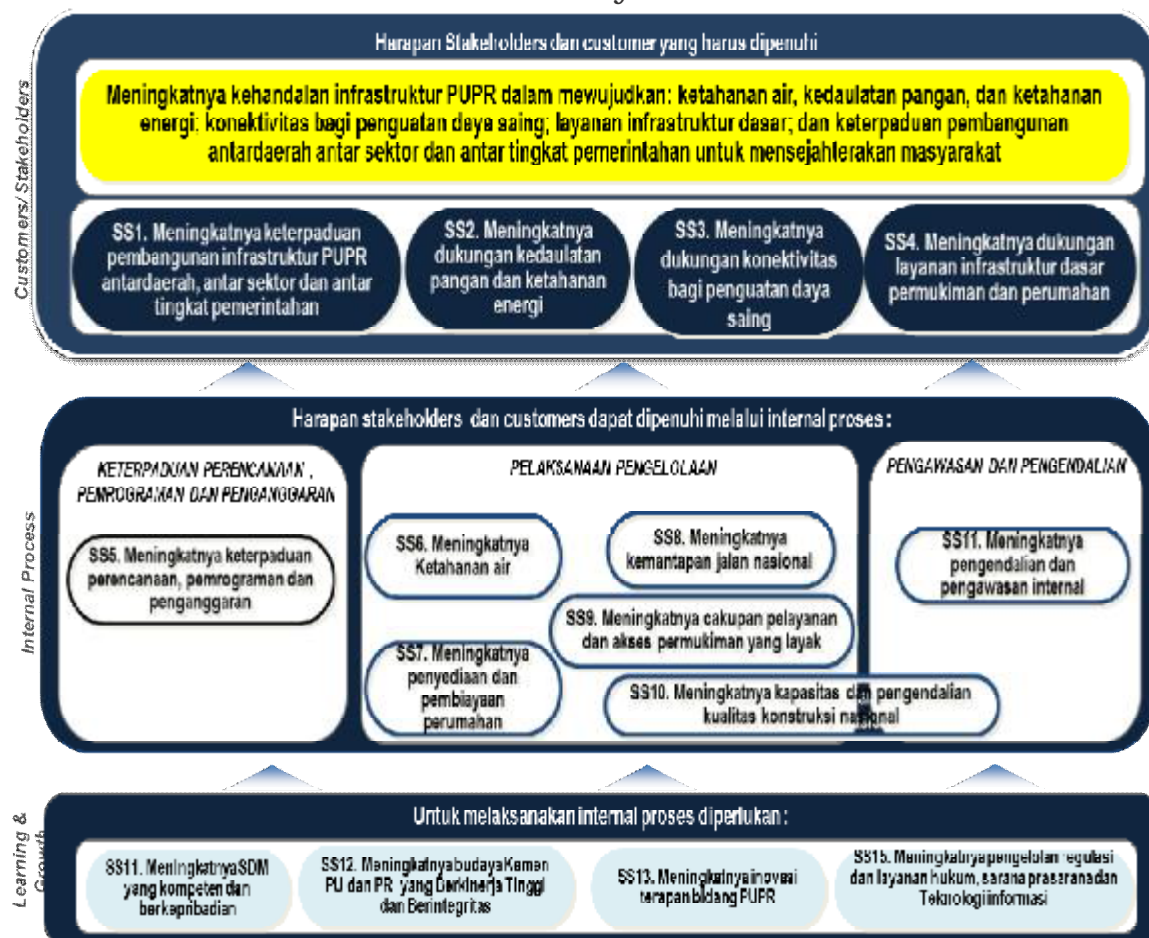
1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua";
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer* yang dilayani) yaitu meningkatkan kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabar dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi. Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Kemudian agar kebutuhan *customers* dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers* tersebut di atas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses *learning and growth*, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
3. Meningkatkan kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Meningkatkan pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
 - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 - c. Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

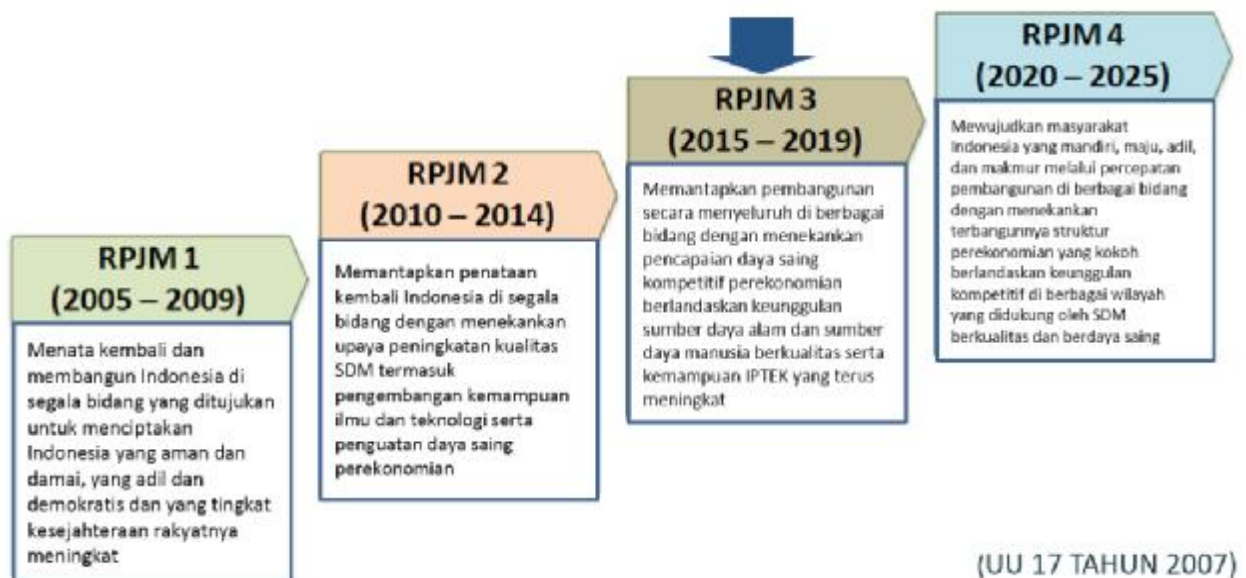
- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b. Meningkatnya ketahanan air.
3. Tujuan 3: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dicapai melalui sasaran strategis:
- a. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- c. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan
5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- d. Meningkatkan kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. Meningkatkan pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Gambar 3.1
Tahapan Pembangunan Nasional



Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada :

- A. Norma Pembangunan, meliputi antara lain: (1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- B. Dimensi Pembangunan;
 1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
 2. Dimensi pembangunan sektor unggulan. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.
 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk

miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

- C. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil. Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.
- D. Quickwins. Quickwins dilakukan agar output pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Gambar 3.2.
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019



3.1.1 Arah Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk

membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis,

melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.

5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

3.1.2 Agenda Prioritas Nasional

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro: meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan: meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4. Sasaran Dimensi Pemerataan: meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah: meliputi pemerataan pembangunan antar wilayah.
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan: meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

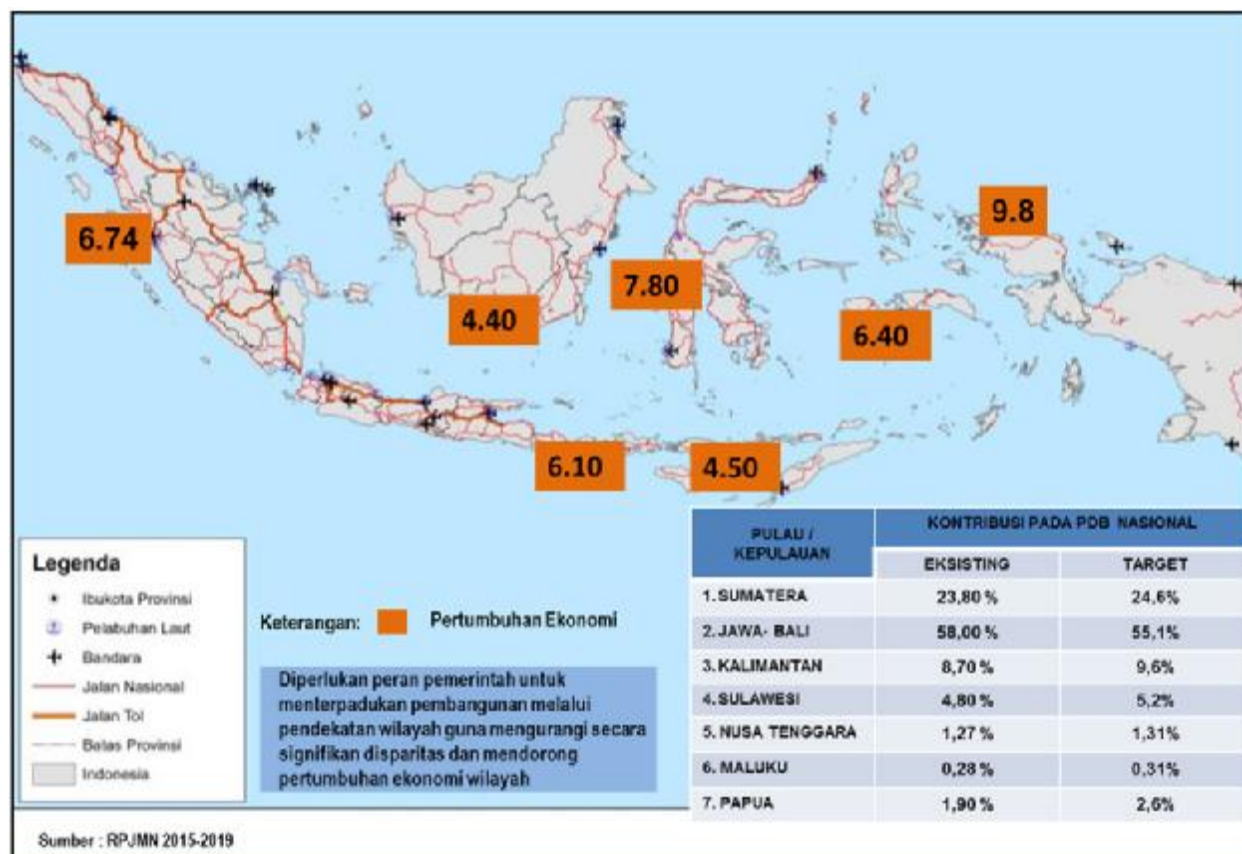
Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur

merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Sebagai ilustrasi pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/kepulauan dan kontribusinya terhadap PDB Nasional adalah seperti pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3.
Sebaran Pertumbuhan Eekonomi Pada Pulau-Pulau/ Kepulauan



Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi: 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, 2) untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitas terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan 3) untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan

akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Selain arah kebijakan tersebut juga ditetapkan arah kebijakan yang bersifat manajerial yaitu: 1) untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional; dan 2) untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan "Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)" yang di dalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau, sebagai berikut:

- 1) Pulau Sumatera. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan).
- 2) Pulau Jawa. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang

destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan).

- 3) Pulau Papua. Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat.
- 4) Pulau Kalimantan. Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa.
- 5) Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri mangan, dan tembaga.
- 6) Kepulauan Maluku. Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari.
- 7) Pulau Sulawesi. Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah: Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari.

Pengembangan WPS tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (economic of scale) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air

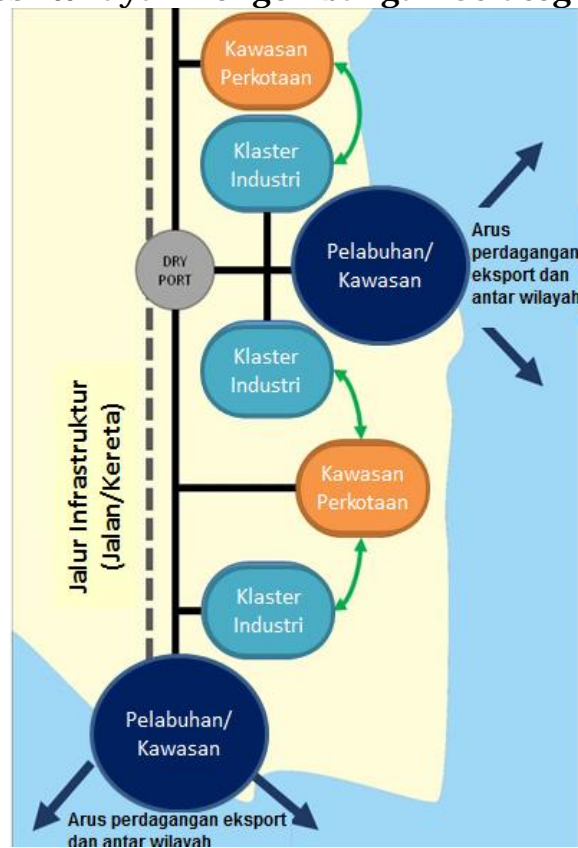
minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.

Konsepsi pengembangan WPS diilustrasikan yaitu pembangunan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan maupun antar WPS. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional dan makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata antara lain dengan:

1. Pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik terkait infrastruktur PUPR;
2. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah melalui:
 - a. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
 - b. Pengembangan kemaritiman (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan energi dan mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritim dan perkapalan;
 - c. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
 - d. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali;

- e. Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKS (Pusat Kegiatan Strategis) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman); serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.
 4. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM di 35 WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
 5. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.

Gambar 3.4.
Konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)



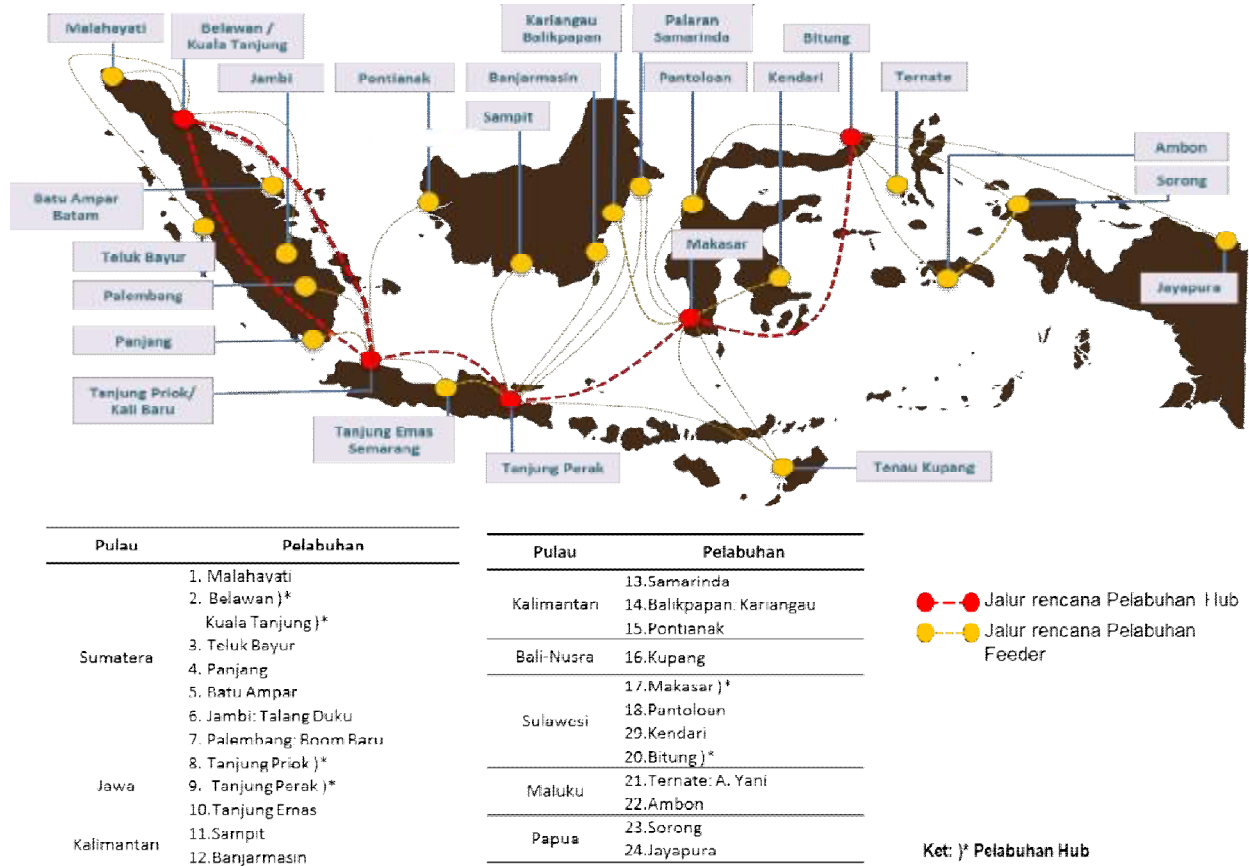
Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut: Pertama, dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) di antaranya di Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan Bromo-Tengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau Komodo dsk, dan Ende-Kelimutu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

Kedua, diterpadukan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di antaranya di Pulau Sumatera (KIP:Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli/Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Ketiga, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/ Kota Perbatasan di antaranya di Pulau Sumatera; Pulau Jawa-Bali; Kepulauan Nusa Tenggara; Pulau Kalimantan; Kepulauan Maluku dan Pulau lainnya.

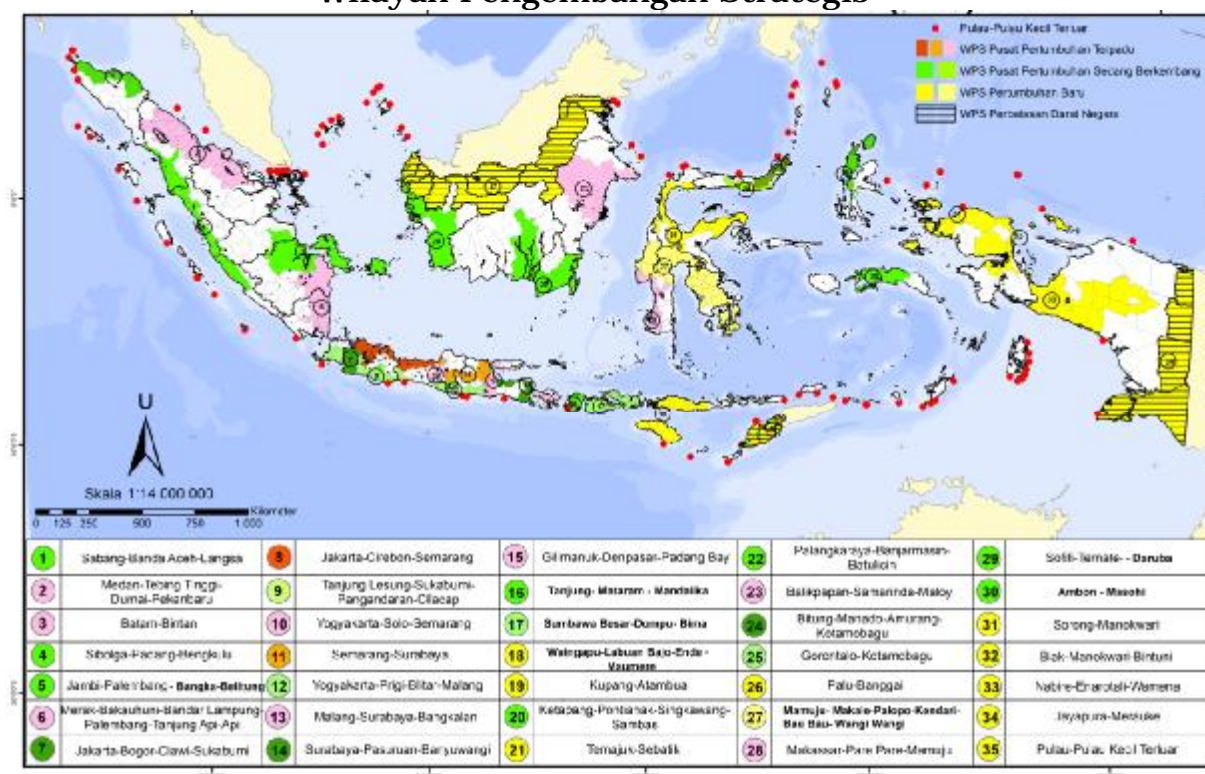
Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan hub dan pelabuhan feeder) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusatenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

Gambar 3.5.
Jalur Rencana Pelabuhan Hub dan Pelabuhan Feeder



Ilustrasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana terlihat pada gambar 3.5. Dalam hal ini, setiap wilayah pulau/kepulauan tersebut dipilah ke dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok WPS, yaitu: Kelompok WPS Pusat pertumbuhan sudah berkembang; Kelompok WPS Pusat pertumbuhan sedang berkembang; dan Kelompok WPS Pertumbuhan baru berkembang. Ke 35 WPS tersebut tersebar di seluruh pulau dan kepulauan yaitu: Pulau Sulawesi (5 WPS), Pulau Kalimantan (4 WPS), Kepulauan Maluku (2 WPS), Pulau Bali - Nusa Tenggara (5 WPS), Pulau Papua (4 WPS), Pulau Jawa (8 WPS), dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (1WPS).

Gambar 3.6.
Wilayah Pengembangan Strategis



Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dari wilayah pengembangan strategis tersebut, akan diukur aspek-aspek yang terkait diantaranya: pengurangan gap pertumbuhan antara kawasan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan perencanaan pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, tingkat pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Informasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana pada peta WPS pada Sub Lampiran 3.

3.2.2 Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung

pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-

2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan. Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut akan dicapai melalui sasaran strategis:

- (1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor;
 - b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
 - a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
 - b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);
 - c) Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment/urban renewal*
 - c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah.
- (2) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
 - b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
 - c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
 - d) Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
 - e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
 - f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
 - g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.
 - b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:

- a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
- b) Evaluasi kinerja keterpaduan;
- c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;
- c. Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan.

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur

Kebijakan pembinaan industri konstruksi nasional dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, adalah untuk peningkatan kualitas dan produktifitas jasa konstruksi yang diarahkan pada pembinaan kepada empat *stakeholder* utama yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi; (2) Jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing; (3) Industri konstruksi dalam rangka mewujudkan rantai pasok konstruksi yang kuat; dan (4) Masyarakat konstruksi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi, dengan sasaran program: 1) Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional; 2) Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar; 3) Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak; dan 4) Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten, 5). Meningkatnya utilitas produk unggulan. Hal tersebut akan dicapai melalui strategi:

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- (2) Peningkatan pembinaan penyelenggaraan dan investasi konstruksi agar tercipta tertib penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas BUJK, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi;
- (3) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi;
- (4) Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur;
- (5) Peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi;
- (6) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis: (1). Meningkatnya dukungan ketahanan air (2). Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, dengan sasaran program: (a). Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, (b). Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air, (c). Meningkatnya kinerja layanan irigasi, (d). Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air, (e). Meningkatnya upaya konservasi SDA, (f). Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, (g). Meningkatnya potensi energi dna sumber-sumber air. Hal tersebut akan diwujudkan melalui:

- a. Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - Pembangunan 65 Buah bendungan (65 bendungan *on going*, 49 bendungan baru, dan 29 Buah waduk selesai dibangun), dan pembangunan 1.893 Buah embung/bangunan penampung air lainnya
 - Rehabilitasi/peningkatan bendungan/waduk sebanyak 46 Buah serta embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.175 Buah.
 - Restorasi sungai 55 Buah, revitalisasi danau 17 Buah dan konservasi rawa 29 Buah.
 - Pembangunan pengendali sedimen (*check dam*) sebanyak 180 Buah.
- b. Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yaitu:
 1. Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari, dicapai melalui strategi:
 - Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku dari 51,44 M³/detik

menjadi 118,17 M³/detik atau peningkatan sebesar 67,52 M³/detik.

- Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku sebesar 21,76 M³/detik.
2. Untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dicapai melalui strategi:
- Peningkatan suplai irigasi waduk dari 11% menjadi 19% (cakupan dari total area irigasi).
 - Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 juta Ha (jaringan irigasi kewenangan pusat yang dibangun sepanjang 10,40 Km, jaringan irigasi rawa yang dibangun 22,82 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 1,58 Ha, jaringan irigasi air tanah 0,197 Km).
 - Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 juta Ha (rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat sepanjang 50,41 Km, jaringan irigasi rawa sepanjang 80,93 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 8,38 Km, jaringan irigasi air tanah sepanjang 0,343 Km).
 - Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi (Operasi dan Pemeliharaan) jaringan irigasi 3,9 juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan 128,28 Km, OP Jaringan Irigasi Air Tanah 0,68 Km, OP Jaringan Irigasi Rawa 112,35 Km, OP Jaringan Irigasi Tambak 14,88 Km).
- c. Pengendalian daya rusak air yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai, yang akan dicapai melalui strategi:
- Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 Km.
 - Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul sepanjang 3.080 Km.
 - Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 200 ribu Ha.
- d. Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan, yang akan dicapai melalui strategi:
- Penyusunan dan penerapan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang berbasis wilayah sungai
 - Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan pengelolaan kualitas air pada sumber air
 - Penyusunan dan penerapan pola dan sistem investasi kerjasama pengelolaan SDA
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA

- Penataan kelembagaan dan benchmarking antar lembaga PSDA
 - Pemberian bimbingan/bantuan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam PSDA
 - Penerbitan rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA
- C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
1. Penyelenggaraan Jalan
- Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
- Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dicapai melalui, sasaran strategis: (1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan (2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program (a) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100 Km menjadi 2,2 Jam per Km; (b) Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Milyar Kendaraan Km menjadi 133 Milyar Kendaraan Km; dan (c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategi:
- a. Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km,
 - b. Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km (Kawasan Perbatasan Kalimantan, penuntasan missing link di Aceh, Kalimantan, Papua, dll.),
 - c. Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km,
 - d. Pembangunan jembatan, sepanjang 29.859 M,
 - e. Penggantian jembatan sepanjang 19.951 M,
 - f. Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km,
 - g. Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan.
- D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'
1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

- a. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi utama:
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khusus 1.500 Liter/Detik.
 - Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi untuk 174 PDAM dan 522 kawasan MBR, dan pengembangan SPAM non PDAM terfasilitasi untuk 50 Non PDAM dan 106 Kawasan MBR.
 - Pembinaan penyelenggaraan SPAM/penyehatan sebanyak 13 Laporan.
 - Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM.
 - Fasilitasi Opsi pembiayaan SPAM (perbankan) sebanyak 113 Laporan.
 - Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan sebanyak 112 Laporan).
- b. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan :
 - Peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di 5.238 Kawasan.
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di 86 Kawasan serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan atau paska bencana di 63 Kawasan.
- c. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar, melalui strategi:
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 Kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 Kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 Kota/Kab.

- Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu dengan pembangunan TPA di 163 Kawasan, penyediaan fasilitas 3R komunal di 850 Kawasan, fasilitas pengolahan sementara sampah di 45 Kawasan.
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.
- d. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan, melalui strategi:
- Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 18 NSPK.
 - Dukungan legalisasi Perda Gedung di 139 Kabupaten/Kota dan pendampingan penyusunan 22 Ranperda bangunan Gedung.
 - Penyelenggaraan bangunan Gedung pada 115 Bangunan Gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan di 454 Kawasan.

2. Penyediaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda No. 6 yaitu Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sub Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan.

Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan berdasarkan target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit.
- b. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit.
- c. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit.
- d. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritime dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit.

e. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit.

Untuk pencapaian target sesuai RPJMN tersebut dibutuhkan pendanaan

sebesar 184.662 trilyun rupiah, sementara alokasi pendanaan berdasarkan RPJMN hanya sebesar 33.090 trilyun rupiah. Terdapat gap pendanaan sebesar 151,563 trilyun.

3. Pembiayaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitasi penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitasi penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

2. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program: Meningkatkan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan; (2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07). Akan dicapai melalui strategi:

a. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat daerah, yang meliputi:

- Penyusunan RUU terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau mengintegrasikan Tapera dalam sistem SJSN;
- Penyusunan RPP dan Raperpres turunan RUU Tapera;
- Penyusunan RPP turunan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- Penyusunan Peraturan Menteri terkait fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan;
- Penyusunan NSPK terkait pembiayaan perumahan.

b. Peningkatan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak melalui fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan, yang meliputi:

- Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 900.000 Unit Rumah Umum (rumah tapak, rusunami, dan sewa beli);
- Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 450.000 Unit Rumah Swadaya;
- Perluasan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;

- Pengembangan skema pembiayaan perumahan baik dari sisi *demand* maupun *supply* (kredit konstruksi);
 - Pengembangan skema pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal;
 - Pengembangan skema pemberian bantuan uang muka sebanyak 476.000 unit untuk kelompok MBR tertentu;
 - Mendorong pembentukan lembaga Multifinace khusus KPR program;
 - Penyusunan segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
 - Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimtek kepada Lembaga
 - Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Badan Usaha (pengembang);
 - Pengembangan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal;
 - Pengembangan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya;
 - Fasilitasi linkage program antara LKB dan LKBB; dan
 - Pemberdayaan lembaga keuangan bank/bukan bank.
- c. Peningkatan Peran Bank Pemerintah yang lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
- e. Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f. Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
- g. Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan bantuan teknis peningkatan pembiayaan bagi RT MBR.
- E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
- Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:
- Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR, dengan sasaran program: Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, akan dicapai melalui strategi:

- a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui:
 - Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
 - Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas;
 - Peningkatan kualitas sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;
 - Peningkatan kompetensi dan integritas APIP;
 - Peningkatan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.
 - b. Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN, melalui:
 - Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu secara efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum permukiman di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - Pelaksanaan reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai kualifikasi wajar tanpa persyaratan.
 - c. Peningkatan kualitas hasil pengawasan, melalui:
 - Pelaksanaan kode etik PNS dan kode etik auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - Penyelenggaraan asistensi, sosialisasi/deseminasi peraturan-peraturan kepada para auditi dan *stakeholder* dalam rangka penerapan *good governance* dan *good corporate governace*, serta fungsi konsultasi.
 - d. Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi.
2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana
- Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, akan dicapai melalui sasaran strategis: 1) Meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja

tinggi dan berintegritas; dan 2) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana. Adapun untuk mendukung sasaran strategis tersebut, dirumuskan sasaran program, yaitu: 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR; dan 2) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR.

Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi:
 - Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan, pengembangan Sistem Aplikasi Tata Naskah Elektronik Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dan Sistem Kearsipan Elektronik;
 - Revitalisasi Pelayanan administrasi publik melalui tata laksana administrasi yang baik;
 - Optimalisasi peran Setjen sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur PU dan perumahan rakyat.
- b. Peningkatan citra positif pengelolaan bidang keuangan kementerian, yang meliputi:
 - Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan;
 - Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan;
 - Peningkatan kualitas penatausahaan PNBPN melalui penetapan NSPK;
 - Peningkatan kualitas Pembinaan Perusahaan BUMN dan Perum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Peningkatan citra positif kementerian di mata publik, yang meliputi:
 - Pengembangan dan penguatan komunikasi publik.
 - Inovasi campaign dan strategi komunikasi dan publikasi.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN, yang meliputi:
 - Penetapan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan.
 - Identifikasi peraturan perundangan yang perlu ditindaklanjuti dengan juklak/juknis operasional.
 - Pembinaan kapasitas SDM dan institusi pengelola BMN.
 - Pemrosesan penghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- e. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum, yang meliputi:

- Peningkatan koordinasi dan harmonisasi penyusunan peraturan perundangan.
 - Pengembangan SDM bidang hukum.
 - Penyebarluasan peraturan perundangan.
 - Penanganan perkara/masalah hukum.
 - Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 - Pengelolaan rumah negara yang tertib dan berkepastian hukum.
- f. Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian, yang meliputi:
- Peningkatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal dalam mendukung proses bisnis Kementerian,
 - Penyediaan Data dan Informasi Spasial dan Statistik dalam mendukung,
 - TUSI unit kerja di lingkungan Kementerian,
 - Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan informasi kepada pimpinan (*Decision Support System (DSS)*).
- g. Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis, yang meliputi:
- Penyempurnaan desain struktur organisasi;
 - Penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur;
 - Penguatan sinergisitas unit kerja/perangkat di pusat maupun di daerah.
- h. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, yang meliputi:
- Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
 - Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*);
 - Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
 - Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- i. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi:
- Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai;
 - Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT;
 - Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
 - Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN;
 - Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
 - Penguatan sistem informasi kepegawaian.
- j. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi:
- Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta;

- Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi;
 - Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan quick wins pelayanan publik;
 - Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan *road map* dengan Renstra);
 - Pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta
 - Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.
- k. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, yang meliputi:
- Penguatan kebijakan *e-government*;
 - Penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM;
 - Penetapan quick wins penerapan *e-government*; dan
 - Pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government*.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, *qualified*, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas.

Sasaran program yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan, akan dicapai melalui strategi;

(1) Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur, yang meliputi:

- a. Penilaian Kompetensi dan Evaluasi, untuk mendapatkan peta kompetensi SDM PUPR, yang terdiri dari:

- Penilaian potensi dan kompetensi serta Unjuk Kerja bagi pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, PPK Satker Mandiri, dan pejabat fungsional umum;
 - Pemetaan kompetensi melalui *Assessment Center* bagi pejabat struktural/fungsional;
 - Penyusunan dan Review Standar Kompetensi, Kamus Kompetensi Teknis dan Kualifikasi Kompetensi untuk seluruh Unit Kerja di Kementerian PUPR;
 - Penyusunan Instrumen Teknis (Unjuk Kerja);
 - Penyusunan Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta
 - Sosialisasi Pemanfaatan Instrumen Untuk Asesor;
 - Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Penilaian Potensi dan Kompetensi;
 - Evaluasi Penilaian Potensi dan Kompetensi serta Unjuk Kerja;
 - Penyusunan Database Kompetensi.
- b. Pemetaan Karir dan Evaluasi, untuk pengembangan karir SDM PU-PR, yang terdiri dari :
- Penyusunan Program Akselerasi dan Program Reguler SDM PU-PR;
 - Penyusunan Road Map Karir SDM dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat;
 - Penyusunan Master Plan/Grand Design SDM Unggulan dan Materi Program SDM Unggulan;
 - Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Peta Karir Individu SDM PUPR;
 - Evaluasi Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir, serta Evaluasi Kesesuaian Jabatan dan Penempatan SDM PU-PR;
 - Proyeksi Peta Karir Individu SDM PU-PR dan Pemutakhiran Data Karir SDM PU-PR;
 - Penyusunan Pedoman Konseling Karir Individu SDM PU-PR.
- (2) Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi, yang terdiri dari:
- a. Penyusunan Konsep Kebijakan Pengaturan Penilaian Kinerja serta Juklak, Juknis dan SOP Operasional Penilaian Prestasi Kerja PNS;
 - b. Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Aplikasi, serta pemantauan atas Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja;
 - c. Evaluasi dan Pemutakhiran Data SKP Pada Aplikasi Sistem Informasi Prestasi Kerja Pegawai (SIPK);
 - d. Penyusunan Standar Minimal Kerja Jabatan Pegawai Bidang Teknis dan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - e. Pemutakhiran Data Kinerja Pegawai;
 - f. Evaluasi Kinerja Individu terhadap Kinerja Organisasi.

- (3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terdiri dari:
- a. Penyusunan rencana, strategi, program pengembangan kompetensi jangka menengah - tahunan, kebutuhan akan pendidikan kedinasan dan pelatihan berbasis kompetensi disertai peningkatan pengembangan koordinasi dengan satminkal terkait education dan traning plan;
 - b. Penyusunan pola, kurikulum dan modul, pengembangan teknologi dan teknik pendidikan pelatihan SDM PUPR berbasis kompetensi berikut sistem evaluasinya;
 - c. Pengembangan pola pelatihan yang berbasis kompetensi, program pelatihan khusus, dan berbasis IT (*E-Learning*) dan kerjasama dengan pembina jabatan fungsional;
 - d. Peningkatan kapasitas, profesionalisame, tenaga pengajar dan manajemen penyelenggara/pengelola pelatihan serta kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bidang PUPR;
 - e. Peningkatan dan pengembangan kerjasama pendidikan kedinasan/ tugas belajar dengan mitra lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri, kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan pemerintah daerah dan lembaga kementerian lain atau non kementerian, dan kerjasama dengan balai-balai diklat;
 - f. Peningkatan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan keterkaitan atau kesetaraan sertifikat pelatihan dengan sertifikaf profesi untuk keahlian dan keterampilan;
 - g. Pemanfaatan hasil penelitian, lokasi proses pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai sarana peningkatan kompetensi;
 - h. Pelaksanaan akreditasi lembaga-lembaga diklat PUPR untuk Diklat Kepemimpinan dan pengadaan barang dan jasa, dan akreditasi bagi lembaga diklat yang akan melaksanakan pelatihan bidang PUPR;
 - i. Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) pada setiap program pelatihan PUPR;
 - j. Pengusulan penetapan program pelatihan tertentu sebagai persyaratan jabatan di bidang PUPR;
 - k. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM PUPR sebagai hal ASN untuk mendapatkan pelatihan 2 kali dalam 1 tahun secara bertahap;
 - l. Pengembangan secara terus menerus mengenai data base system informasi manajemen pendidikan dan pelatihan (SIMD).
- (4) Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR, yang terdiri dari:
- a. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis formasi, sosialisasi atau penyebarluasan informasi jabatan fungsional;

- b. Pelaksanaan seleksi dan penempatan, review butir-butir angka kredit pejabat fungsional dan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis;
- c. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional PUPR dan non PUPR melalui pendidikan lanjutan, pelathan teknis dan fungsional, lokakarya, seminar, magang dan kerjasama baik dengan Pembina jabatan fungsional non PUPR;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional di Pusat dan Instansi/Daerah;
- e. Penyusunan organisasi dan etika profesi jabatan fungsional PUPR dan evaluasi penugasan jabatan fungsional;
- f. Pengkajian tunjangan jabatan fungsional PUPR;
- g. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PUPR dan non PUPR.

4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

Peran penelitian dan pengembangan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu dengan melakukan inovasi teknologi, advis teknis, pelatihan teknis tenaga terampil, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan *sustainable*.

Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui penerapan teknologi dan inovasi teknologi yang telah dihasilkan, serta memberikan layanan teknis berupa advis dan rekomendasi teknis, rekomendasi kebijakan, serta layanan uji laboratorium terhadap permasalahan infrastruktur yang dihadapi. Sasaran strategis Balitbang adalah: Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program: 1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh *Stakeholders*; dan 2) Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada *stakeholders*, yang akan dicapai melalui strategi:

- a. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mencakup:
 - Penerapan IPTEK melalui uji coba skala lapangan secara terbatas yang menghasilkan informasi tentang kemampuserapan teknologi;
 - Inovasi IPTEK untuk meminimalkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global serta mengantisipasi dampak perubahan iklim dan pemanasan global khususnya pada aspek tata kelola air dan pencemaran udara;
 - Melaksanakan Litbangrap yang menghasilkan IPTEK untuk mencapai MDG's, MP3EI, MP3KI termasuk *Cluster IV*;
 - Diseminasi, sosialisasi dan pelatihan kepada pelatih (*Training of trainer*), yang menghasilkan umpan balik tentang kebutuhan SPMK;

- Menjadikan Balitbang tidak hanya sebagai *research institute* tetapi juga menjadi *knowledge institute*.
- b. Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalah- masalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampooterapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, yang mencakup:
 - Optimalisasi pemanfaatan pilihan-pilihan IPTEK infrastruktur PU dan permukiman siap pakai oleh para *stakeholders*;
 - Pemanfaatan potensi perguruan tinggi dan asosiasi profesi/tenaga ahli untuk mempercepat penyusunan, pemyarakatan dan penerapan serta pengawasan pemanfaatan standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil;
 - Mendorong stakholder untuk memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara proporsional dalam setiap pembangunan infrastruktur PU, serta perhatian khusus dalam pembebasan lahan;
 - Meningkatkan pelayanan PULSA dan kelaikan/ kelayakan bangunan.

3.3 KERANGKA REGULASI

KerangkaRegulasidalamhaliniartikansebagaikebutuhanregulasiyangdapatberupaUndang-

Undang,PeraturanPemerintah,PeraturanPresiden,InstruksiPresidenatauPeraturanMenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/ atau mengaturperilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakattermasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat.Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Saatiniefektivitasregulasibidangpekerjaanumumdanperumahanrakyatyangadabelumoptimal

sehinggamasihperlupeningkatankejelasanperan,tugasfungsi,tanggungjawabdan kewenangan, terlebih dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan rakyat serta perlunya penyelarasan dengan Kerangka Regulasi pada Prolegnas.

Selain itu pada tingkat pemerintah pusat, pemenuhan regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyatyangberupaUndang-Undangbesertaturannyarelatifmasihkurang,kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan kurang jelas dan menjadi permasalahan pada saat berkoordinasi baik dengan sektor lain maupun daerah.

Integrasi kerangka regulasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ke dalamdokumenperencanaan strategissangatlahpentinguntuk memberikandasar/arahdalam penyusunan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Selain itu kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rincian rencana regulasi yang akan disusun adalah sebagaimana pada Sub Lampiran Tabel 1.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan (merger) dua Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selain memperhatikan hal tersebut di atas juga mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015-2019. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan untuk mendukung dalam upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, pengusaha, pembiayaan, membina sumber daya manusia (SDM) konstruksi dan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemberdayaan organisasi di nasterkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai pelaksana beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun berdasarkan kepada hubungan internal dan antar lembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta kompleksitas permasalahan yang akan di hadapi. Selain itu didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan serta penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Dalam aspek sumberdaya manusia, telah dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon IA) yang akan menangani peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan bidang infrastruktur lainnya, telah dibentuk Direktorat Jenderal Konstruksi sebagai unit kerja yang bersifat strategis nasional yaitu menyiapkan kapasitas industri konstruksi nasional yang meliputi tenaga konstruksi, kontraktor dan konsultan maupun rantai pasoknya baik nasional maupun daerah secara sinergis dalam rangka mempertahankan pasar konstruksi nasional dan merebut pasar konstruksi regional.

Tidak kalah penting telah dibentuk pula Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Eselon IA) untuk menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis pengembangan wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diharapkan mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut didukung oleh fungsi-fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Direktorat Jenderal, serta fungsi-fungsi unsur pembantu pimpinan, unsur pengawas, dan unsur pendukung dilakukan oleh Sekretariat

Jenderal, Inspektorat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan tugas-tugas lainnya untuk mendukung pimpinan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri dan Sekretariat Jenderal. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana terlihat pada Gambar 3.7.

BAB 4 TARGET, KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - b. Pembinaan Penatagunaan SDA
 - c. Pembinaan Program dan Anggaran
 - d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
 - f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
 - g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
 - h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
 - i. Dukungan Manajemen DSDAN
 - j. Pembinaan Keamanan Bendungan
 - k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
 - l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
 - m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
 - n. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
 - o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
 - p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
 2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

- b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan
 - c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
 - d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
 - e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
 - f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
 - g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan
 - h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
 - b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
 - c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
 - d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
 - f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
 - g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan
 4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
 - d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
 5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
 - b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
 - c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
 - d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
 - e. Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
 - g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBK)
 - h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)

6. Program Pengembangan Perumahan, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
 - b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
 - d. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
 - e. Penyediaan Rumah Susun
 7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis
 - d. Pengembangan Perkotaan
 - e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- B. Program Generik, merupakan program-program kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:**
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
 - b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
 - c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
 - d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
 - e. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ;
 - b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Lainnya;
 - c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik
 3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Air;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
 - d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi;

- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan & Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I;
 - c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II;
 - d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III;
 - e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV;
 - f. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja;
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi;
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014.

Target sasaran Kementerian (outcome-impact), sasaran program (outcome), dan sasaran kegiatan (output) adalah sebagaimana pada Sub Lampiran 2.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah, perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.

Meskipun investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya ataupun dibandingkan dengan negara lainnya namun sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari sisi belanja pemerintah, investasi tersebut perlu dikelola Kementerian PUPR secara cermat agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Demikian pula pembiayaan/investasi dari non pemerintah/ investasi yang berasal dari investasi masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu sebagai berikut;

1. Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah yang sudah ada; dan
2. Pengembangan potensi baru pembiayaan/investasi pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah seperti skema Kerjasama Pemerintah Swasta/Public Private Partnership (KPS/PPP) dan dsb.

Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan memperhatikan antara lain 1) Alokasi pendanaan Program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan; 2) Alokasi pendanaan Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan Output; dan 3) Alokasi pendanaan Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Alokasi pendanaan untuk Kementerian PUPR dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar Rp.

659,2 Triliun (belum termasuk anggaran untuk dukungan manajemen). Sedangkan kebutuhan pendanaan berdasarkan perhitungan Kementerian PUPR untuk mendanai pencapaian target RPJMN dan dikaitkan dengan kemampuan dukungan sumber daya adalah sebesar Rp931.585 Triliun (termasuk pendanaan untuk dukungan manajemen). Rincian pendanaan per program per tahun sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Kerangka Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Per Program Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM	ALOKASI (MILIAR RUPIAH)					TOTAL	
		2015	2016	2017	2018	2019	RENSTRA	RPJMN
		RENSTRA	RENSTRA	RENSTRA	RENSTRA	RENSTRA		
1	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR *)	30.813	62.215	72.407	75.436	75.690	316.562	208.577
2	PENYELENGGARAAN JALAN	57.051	69.948	52.105	55.121	43.952	278.177	278.177
3	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	15.830	24.201	26.855	29.668	31.552	128.107	124.885
4	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.768	8.780	52.732	55.410	59.973	184.663	33.099
5	PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN **)	342	362	383	406	430	1.924	1.049
6	PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR	723	924	1.144	1.365	1.587	5.743	3.558
7	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT	198	214	237	264	297	1.210	1.985
8	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PU-PR	401	512	531	376	406	2.226	
9	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	105	113	120	129	142	609	414
10	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	520	608	772	790	818	3.508	1.582
11	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	569	625	688	757	832	3.471	2.429
12	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	526	949	1.188	1.303	1.421	5.385	3.467
TOTAL		114.844	169.452	209.162	221.025	217.100	931.585	659.222

atatan : *) diluar BA 999

Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian PUPR terdapat beberapa catatan perbedaan target sasaran dan jumlah alokasi pendanaan, hal tersebut secara umum disebabkan diantaranya: 1) penetapan RPJMN dilaksanakan sebelum ditetapkannya Struktur Organisasi baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga terjadi perubahan struktur outcome, output, indikator dan target yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru; 2) terdapat tugas tambahan pada beberapa unit organisasi; dan 3) adanya beberapa target sasaran di RPJMN yang tidak bisa dilaksanakan mengingat kemampuan sumber daya yang belum mencukupi. Beberapa perbedaan target sasaran dan alokasi pendanaan yang signifikan per unit organisasi adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk program ini ada beberapa perbedaan antara Renstra dan RPJMN yaitu: 1) kebutuhan pendanaan dengan target sebagaimana ditetapkan

pada RPJMN 2015-2019 yang diusulkan Ditjen SDA sebesar Rp 316,56 Trilyun berbeda yaitu turun menjadi Rp 208.58 Trilyun (selisih Rp 107,89

Trilyun), sehingga akan terdapat beberapa target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, yaitu antara lain: pembangunan bendungan, embung, pengendali banjir, pengaman pantai, dan rehabilitasi pengendali banjir; 2) adanya perbedaan struktur kegiatan, sasaran kegiatan (output) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan struktur yang ada pada RPJMN 2015-2019, hal ini disebabkan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi. Selain itu terdapat beberapa output pada RPJMN 2015-2019 adalah merupakan outcome (contoh: output jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar (outcome), sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan km(output), tetapi tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru; 3) terdapat pekerjaan yang merupakan kewenangan Daerah yang pendanaannya diusulkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan jaringan irigasi dan bendung kewenangan daerah; 4) terdapat tugas tambahan dari Menteri PUPR yaitu terkait penanganan drainase dan belum dialokasikan, sehingga pagu yang diperlukan dalam Renstra sebesar Rp 316 T.

2. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur

Pada program ini, terdapat beberapa penyesuaian yaitu: 1) level beberapa outcome dalam RPJMN berubah menjadi level output dalam Renstra; 2) perbedaan sasaran dan satuan antara RPJMN dan Renstra hanyalah perbedaan nomenklatur saja, yaitu sasaran "Jumlah Badan Usaha" pada RPJMN menjadi "Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar" pada Renstradengan targetnya dikonversi; 3) kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3,557 T pada RPJMN belum termasuk anggaran untuk komponen dukungan manajemen, sedangkan kebutuhan sesungguhnya adalah sebesar Rp. 5,743 T yang sudah mencakup kebutuhan anggaran untuk target RPJMN dan dukungan manajemen.

3. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan Pembiayaan Perumahan (diluar kebutuhan dana FLPP dan bantuan pembiayaan lainnya) adalah sebesar Rp 1,924 T, sedangkan alokasi dalam RPJMN sebesar Rp 1,050 T. Kebutuhan pendanaan Pembiayaan Perumahan tersebut sudah termasuk dana PNBPN dari BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang diperkirakan sebesar Rp 1,132 T. Selain itu kebutuhan pendanaan untuk memfasilitasi pembiayaan 1.350.000 unit rumah yang merupakan target RPJMN yaitu sebesar Rp 164,492 T tidak dialokasikan dalam RPJMN. Hal ini mengingat kebutuhan pendanaan tersebut sudah dialokasikan dalam BA 999.03 dan BA 999.07 karena termasuk dalam kategori investasi pemerintah dan belanja subsidi.

4. Program Pengembangan Perumahan

Terdapat perbedaan alokasi dana yaitu dalam RPJMN sebesar Rp. 33.099 T, padahal untuk mencapai target RPJMN tersebut diperlukan

alokasi dana yaitu sebagaimana tertuang dalam Renstra sebesar Rp. 184,663 T.

5. **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah**
Perbedaan struktur output dan pendanaan dalam Renstra dan RPJMN diantaranya disebabkan: 1) adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN yaitu semula terdiri dari 6 unit Eselon II menjadi sebanyak 5 unit Eselon II, hal ini berpengaruh terhadap struktur output dan targetnya; 2) adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya serta fasilitasi pengadaan tanah, hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.
6. **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
Adanya perbedaan dengan target sasaran RPJMN berdasarkan hasil penajaman yaitu terdapat beberapa penelitian yang melewati siklus penelitian dengan lengkap. Seperti diketahui bahwa proses penyusunan teknologi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: naskah ilmiah, model sistem, model fisik, dan prototype. Beberapa teknologi dapat dihasilkan langsung dari tahapan naskah ilmiah langsung menjadi prototype sehingga hal ini akan mengurangi jumlah output.
7. **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
Pada program ini terdapat beberapa perbedaan dengan RPJMN diantaranya: 1) Adanya perubahan indikator kinerja dan target kinerja dalam Renstra (tjen matriks perubahan) yang didasari hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Esalon I dengan Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 Juni 2015 yang mana Indikator Kinerja Itjen terlalu sempit dan sulit untuk diukur, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menggambarkan kontribusi kegiatan Esalon II-nya, sehingga perubahan indikator kinerja tersebut berdampak pula pada perubahan nama kegiatan level Esalon II; 2) Adanya perbedaan target pendanaan antara Renstra sebesar Rp. 608,82 milyar dengan RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 413,80 milyar, yang disebabkan Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dalam RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan hanya untuk mendanai kegiatan teknis Itjen, diluar kegiatan layanan berupa belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran.
8. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Terdapat perbedaan pagu anggaran yaitu dalam Renstra sebesar Rp. 4,471T sedangkan dalam RPJMN sebesar Rp.2,429 T, hal ini disebabkan dalam RPJMN belum memasukan biaya pembayaran gaji, tunjangan, operasional perkantoran serta kegiatan dukungan lainnya. Selain itu terdapat perbedaan struktur nomenklatur kegiatan, sasaran kinerja, indikator serta target pada RPJMN dengan Renstra disebabkan Struktur Organisasi sekarang berbeda dengan struktur yang diusulkan pada waktu penyusunan RPJMN.
9. **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**
Pencapaian target sasaran untuk 100-0-100 memerlukan pendanaan sekitar Rp. 832 T. Hal ini merupakan target nasional yang

meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta, namun yang ditangani pusat dalam hal ini oleh Ditjen Cipta Karya untuk menuju target 100-0-100 memerlukan dana sebesar Rp. 128,267 T. Sedangkan target pembangunan 3.500 liter/detik SPAM Regional akan terpenuhi bila proporsi APBD 35% dari APBN.

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-

2019 merupakan arah yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional.

Proses pencapaian sasaran-

sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan keterse- diaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Pencapaian sasaran target rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-

2015 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dan

meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan

alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam

hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi,

mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antar lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan

proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.

Melalui pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat diperlukan.

Akhir kata, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara konsisten.

TABEL SL-1. KERANGKA REGULASI

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR					
1.	Penyusunan Peraturan Menteri PUPR sebagai perangkat operasional UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan	Penguat/turunan dari UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan	Kemen PUPR		
	a. Permen PUPR No.04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria DAS dan WS • Penetapan WS strategi nasional • Perubahan batas wilayah sungai 	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	b. Permen PUPR No.06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan sumber air • Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air • Rencana alokasi sumber daya air tahunan dan rinci • Peran masyarakat dan kerja sama 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen BUMN, Kemen ESDM	2015
	c. Permen PUPR No.07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan perencanaan • Pelaksanaan • Operasi dan pemeliharaan bangunan • Pengelolaan bangunan pengamanan pantai • Pembiayaan bangunan pengamanan pantai 	Kemen PUPR	Kemen Kelautan dan Perikanan	2015
	d. Permen PUPR No.08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Garis sempadan jaringan irigasi • Wewenang dan tanggung jawab • Tata cara penetapan • Pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi • Pengamanan dan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi • Peran masyarakat 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	e. Permen PUPR No.09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan SDA	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sumber daya air dan prasarannya sebagai media • Penggunaan air dan daya air sebagai materi • Penggunaan sumber air sebagai media • Penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi • Penggunaan sumber daya air dalam keadaan 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen BUMN, Kemen ESDM	2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
		memaksa dan kepentingan mendesak			
f.	Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Pola pengelolaan sumber daya air • Rencana pengelolaan sumber daya air 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
g.	Permen PUPR No.11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut • Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut • Pemantauan dan evaluasi kegiatan O dan P jaringan reklamasi rawa pasang surut • Kelembagaan dan SDM • Pembiayaan 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan	2015
h.	Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
i.	Permen PUPR No.13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air • Peran masyarakat • Pendanaan 	Kemen PUPR	BNPB	2015
j.	Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi • Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
k.	Permen PUPR No.16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
l.	Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi • Susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja • Prosedur pemilihan dan penetapan anggota • Hubungan kerja antar wadah koordinasi • Pembiayaan 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
	m. Permen PUPR No.18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> Iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan Jenis kegiatan usaha yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air Tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	n. Permen PUPR No.21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen Kelautan dan Perikanan	2015
	o. Permen PUPR No.23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Kemen Kumham)	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi aset irigasi Perencanaan pengelolaan aset irigasi Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi 	Kemen Kumham, Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	p. Permen PUPR No.26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> Ketentuan teknis Kompensasi Perijinan dan tata laksana 	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	q. Permen PUPR No.27/PRT/M/2015 tentang Bendungan	Sedang dalam penyusunan	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	r. Permen PUPR No.28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Sempadan Danau	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> Penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, termasuk mata air Pemanfaatan daerah sempadan Pengawasan pemanfaatan daerah sempadan 	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	s. Permen PUPR No.29/PRT/M/2015 tentang Rawa	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> Penetapan rawa Pengelolaan rawa Sistem informasi rawa Perijinan dan pengawasan Pemberdayaan masyarakat 	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	t. Permen PUPR No.30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Sedang dalam penyusunan	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	u. Rapermen tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air (Bagian Hukum SDA) (Menunggu RPP Pengusahaan SDA Ditetapkan)	Materi yang diatur : <ul style="list-style-type: none"> Tata cara perolehan izin, perubahan izin, dan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air Tata cara perolehan izin, perubahan izin, dan perpanjangan izin 	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen BUMN, Kemen ESDM	2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
		<p>pengusahaan sumber daya air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara pencabutan izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air • Pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air 			
	v. RPP Pengusahaan SDA (Harmonisasi)			Kemen Hukum dan Ham	
	w. Perpres Dewan SDA			Menko Perekonomian	
	x. Kepres Keanggotaan Dewan SDA Nasional			Menko Perekonomian	
2.	Penyusunan rancangan UU pengganti UU No.7 tahun 2004	Sedang dalam penyusunan	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan	2016
PENYELENGGARAAN JALAN					
3.	Perubahan PP tentang Jalan	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 34/2006 tentang Jalan, untuk mendefinisikan kembali Jalan Arteri (sesuai fungsi) yang diklasifikasikan berdasarkan kelas jalan (sesuai spesifikasi penyediaan prasarana jalan) menjadi: Arteri Utama (untuk kelas jalan bebas hambatan), dan Arteri lainnya (untuk kelas jalan raya dan jalan sedang)	Kementerian PUPR		2017

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
4.	Perubahan PP tentang Jalan Tol	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 15/2005 tentang Jalan Tol dan perubahannya, untuk memperkuat organisasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan mengakomodir pembangunan Jalan Bebas Hambatan secara bertahap dalam rangka percepatan pembangunan jalan bebas hambatan di daerah yang lalu lintasnya masih rendah	Kementerian PUPR		2017
5.	Raperpres tentang Dana Preservasi dan Mekanisme Hibah untuk Jalan Daerah	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan dan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu • Kemendagri • Bappenas 	2019
6.	Perubahan Permen PU tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU dan Permen PU tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU	Penguat/turunan dari Perpres 165/2014 tentang Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Perpres 15/2015 tentang Kementerian PUPR, untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian, khususnya Balai sebagai unit pelaksana teknis	Kementerian PUPR		2015
7.	Rapermen PUPR tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan, UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP 34/2006 tentang Jalan dan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Bappenas 	2016
8.	Perubahan Permen PU tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan, PP 15/2005 tentang Jalan Tol dan perubahannya, dan Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, termasuk mengakomodir penerapan skema <i>availability payment</i> /PBAS dalam pembangunan jalan bebas hambatan	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Bappenas 	2016
9.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Tata Cara Penetapan Kelas Jalan	Amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenhub • Kepolisian RI • Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota 	2019
10.	Rapermen PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Nasional	Amanat UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 34/2006 tentang Jalan	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Bappenas 	2019
11.	Perubahan Permen PU tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan	Amanat Instruksi Presiden 4/2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan meninjau kembali Permen PU 11/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan mengingat sampai dengan akhir 2014 belum ada jalan nasional non-tol yang laik	Kementerian PUPR	Kemenhub Kepolisian RI Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota	2017

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
		fungsi tanpa syarat			
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN					
12.	RUU Sanitasi	Rancangan Undang-Undang (RUU) Mandiri	Kementerian PUPR	Bappenas, Kemendagri, Kemenkes	2016
13.	RPP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Penguat /turunan dari UU No.1/2011 dan UU No.20/2011 dan UU No. 28/ 2002 Ruang lingkup : a. Pencegahan; b. Peningkatan kualitas; c. Pengadaan tanah; dan Pendanaan.	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,	<ul style="list-style-type: none"> • KemenLH • Kemen.ESDM Kemen.BUMN Kementerian Perumahan Rakyat 	2015
14.	Revisi Permen PU tentang BPPSPAM	Amanat RPP tentang Penyelenggaraan SPAM	Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenkes, Kemen.PUPR	2015
15.	Rapermen PU Tentang Petunjuk Teknis Indikator Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	Kemendagri	2015
16.	Rapermen PU tentang Rencana Induk SPAM	Amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kementerian PUPR	Kemendagri	2017
17.	Rapermen PU tentang Rencana Pengamanan Air Minum	Amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kementerian PUPR		2017
18.	Rapermen PU tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) bagi PDAM	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	Kemendagri	2015
19.	Rapermen PU Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	KemenLH, Kemenkes	2017

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
----	---	--	-----------------------	-------------------------	--------

20.	Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian PUPR	Kemenko Kesra,	2016
21.	Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Permukiman	Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian PUPR		2016
22.	Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	Bappenas	2016
23.	Revisi Permen Nomor 45 tahun 2007 tentang Pengelolaan Bangunan Gedung Negara	Amanat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kementerian PUPR		2015
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
24.	RPP tentang Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun	Penguat/turunan dari UU No. 20/2011 dan UU No. 28/2002 Ruang Lingkup pengaturan : a. Bentuk; b. Tata cara penerbitan; c. Kelembagaan; dan Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,	<ul style="list-style-type: none"> • KemenLH • Kemen.ESDM • Kemen.BUMN 	2015
25.	RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Penguat /turunan dari UU No.20/ 2011Dan UU No. 28/2002 Ruang Lingkup pengaturan : a. Pembinaan; b. Pelaksanaan pembangunan; c. Pelaksanaan pasca pembangunan; d. Pengendalian; e. Kelembagaan; f. Pemberian bantuan dan kemudahan; dan g. sanksi	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,		2015
26.	RPP tentang Rumah Negara	Penguat /turunan dari UU No 1 / /2011 dan UU No.72/1957 dan UU No.17 /2003	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu 	2015
27.	Perubahan PP No 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas	<ul style="list-style-type: none"> a. Turunan dari UU No 1 Tahun 2011 b. Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah 	Kemen PUPR	PERUMNAS	

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
28.	Perubahan PP No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Ketenagakerjaan	Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah	Kemen PUPR	BPJS Ketenagakerjaan	
29.	RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penguat/turunan dari UU nomor 1 tahun 2011 a. Penyelenggaraan Perumahan; b. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; c. Pemeliharaan dan perbaikan; d. Konsolidasi Tanah; dan e. Jenis, besaran, denda, tata cara, dan mekanisme peneraan sanksi administratif	Kemenko ekonomi, Bappenas, Kemenhukham, Kemen PUPR	Kemenkeu, BPN	2015
30.	Perubahan Keppres No 46 Tahun 1994 tentang Bapertarum PNS	Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah	Kemen PUPR	BAPERTARUM PNS	
31.	Repermen PUPR tentang Pedoman Teknis Penghunan Sementara dan Penghunan Kembali dalam Peningkatan Kualitas Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
32.	Rapermen PUPR tentang Pengikatan Jual Beli, termasuk juga PPJB Rumah Susun	2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun			
33.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
34.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun	Revisi Permenpera No. 21 Tahun 2011	Kemen PUPR		2015
35.	Rapermen PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
36.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
37.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Permohonan Izin Rencana fungsi dan Pemanfaatan serta Perubahan Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2017
38.	Repermen PUPR tentang Perubahan Permenpera No. 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang Dibiayai APBN dan APBD	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2017

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
----	---	--	-----------------------	-------------------------	--------

39.	Repermen PUPR tentang Perubahan Permenpera No. 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rusunawa	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
40.	Repermen PUPR Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Revisi Permenpera No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (d disesuaikan dengan Kebijakan Kemen PUPR)	Kemen PUPR	Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	2015
41.	Repermen PUPR tentang Pemberian Kemudahan Perizinan dan Tatacara Pencabutan Izin Pembangunan Terhadap Badan Hukum Oleh Pemerintah Daerah.	Penguat/turunan dari UU nomor 1 tahun 2011, Pasal 33 ayat (3). Ruang Lingkup pengaturan : Bentuk kemudahan perizinan Tatacara Pencabutan Izin Pembangunan	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham	2016
42.	Repermen PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah	Penguat .turunan dari UU nomor 1 tahun 2011, Pasal 42 ayat (3). Ruang Lingkup pengaturan: Subyek dan obyek jula beli rumah Sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah Hak, kewajiban, dan larangan Pembinaan	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Bank Indonesia	2016
43.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Skala Besar	Penguat / Turunan dari UU nomor 1 tahun 2011 Pasal 37. Ruang Lingkup pengaturan: Penyelenggaraan Perumahan Kriteria Hunian Berimbang	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham	2018
44.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraab Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penguat / turunan dari UU Nomor 1 tahun 2011 Pasal 133 dan UU nomor 20 tahun 2011 Pasal 96 ayat (6). Ruang Lingkup pengaturan : Pelibatan peran masyarakat. Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham	2018
45.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan	Dukungan Pencapaian Renstra Bidang Penyediaan Perumahan	Kemen PUPR	Kemendagri	
46.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Bidang Perumahan	Dukungan Pencapaian Renstra Bidang Penyediaan Perumahan	Kemen PUPR	Kemendagri	
47.	RPP terkait pendayagunaan atau pemberdayaan sumber-sumber pembiayaan perumahan	Memenuhi amanat ayat 4 pasal 123 dan ayat 4 pasal 126 UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan	Kemen PU PR	KemenKeu, Kemenkum-HAM	2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
		Permukiman			
48.	Rapermen PU-PR terkait turunan amanat PP pendayagunaan atau pemberdayaan sumber-sumber pembiayaan perumahan	Memenuhi amanat PP pendayagunaan atau pemberdayaan sumber-sumber pembiayaan perumahan	Kemen PU PR		2015 s/d 2019
49.	Raperpres tentang perubahan Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR	PT. SMF	2015
50.	Raperpres tentang Taperum-PNS	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR	Bapertarum-PNS	2015
51.	Rapermen PU-PR terkait Taperum -PNS	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR	Bapertarum-PNS	2016 s/d 2019
52.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2015
53.	RaKepmen PU-PR mengenai proporsi pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR		2015
54.	Rapermen PU-PR mengenai Bantuan Uang Muka	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2015
55.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Secara Swadaya bagi MBR i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2016
56.	RUU Tabungan Perumahan	Memenuhi amanat pasal 124 UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR	DPR, Kemenkum-HAM, Kemenkeu	2016

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
57.	RPP terkait amanat UU Tapera	Memenuhi amanat UU Tapera	Kemen PU PR	KemenKeu, Kemenkum-HAM	2016 s/d 2018
58.	Raperpres terkait amanat UU Tapera	Memenuhi amanat UU Tapera	Kemen PU PR	KemenKeu, Kemenkum-HAM	2017 s/d 2019
59.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera susun bagi MBR i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pasal 95 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun	Kemen PU PR		2016
60.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Kontruksi untuk pengadaan rumah bagi MBR i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2016
61.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui mekanisme sewa beli bagi MBR i. Rapermen tentang skim dan mekanisme ii. Rapermen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2017
62.	Penyusunan NSPK Bidang Pembiayaan Perumahan	Amanat Pasal 118 ayat 2, pasal 122 ayat 1, pasal 123 ayat 2 dan 3 UU 1 tahun 2011	Kemen PU PR		2015 s/d 2019
PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR					
63.	Revisi UU Jasa Konstruksi	Masuk dalam agenda Prolegnas DPR RI tahun 2015	Kemen PUPR		2015-2016
64.	Rapermen PUPR tentang Pembinaan Konstruksi	Amanat/turunan UU Jasa Konstruksi dan operasionalisasi PP No.30/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kemen PUPR		2016
65.	Rapermen PUPR tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Dibutuhkannya pedoman dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan (CPD)	Kemen PUPR		2015
66.	Rapermen PUPR tentang perubahan ketiga terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 tahun 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi	Dibutuhkannya Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 tahun 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi	Kemen PUPR		2015
67.	Rapermen PUPR tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun	Dibutuhkannya pedoman untuk pengadaan terintegrasi rancang dan bangun (Design and Build) proyek konstruksi	Kemen PUPR		2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
----	---	---	-----------------------	-------------------------	--------

68	Rapermen PUPR tentang standar dan pedoman pengadaan terintegrasi berbasis kinerja	Dibutuhkannya pedoman untuk pengadaan terintegrasi berbasis kinerja (Performance-based contract) proyek konstruksi	Kemen PUPR		2015-2016
69.	Rancangan peraturan tentang Standar dan kriteria dokumen perusahaan infrastruktur sektor jalan/jembatan tol	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2016
70	Rancangan peraturan tentang Standar dan kriteria penyelesaian sengketa investasi infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2016
71.	Rancangan Pedoman transaksi sistem elektronik terintegrasi bidang jalan	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2016
72.	Rancangan Pedoman Penentuan Variabel Investasi dalam Perusahaan Infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2017
73.	Rancangan Pedoman Prinsip Perusahaan Infrastruktur Ekonomi	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2018
74.	Rancangan Pedoman penerapan transaksi pra-bayar pada pengumpulan tarif infrastruktur publik	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2019
75.	Rancangan Pedoman pengembalian aset pemerintah dalam KPS infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2019
76.	Rancangan Pedoman Pelaksanaan Penjajakan Pasar Investasi Infrastruktur PU-PR	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2019
77.	NSPK bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2015 - 2019
78.	NSPK bidang penyelenggaraan jasa konstruksi	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan jasa konstruksi	Kemen PUPR		2015 - 2019
79.	NSPK bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Dibutuhkannya pedoman terkait pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Kemen PUPR		2015 - 2019
80.	NSPK bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi	Dibutuhkannya pedoman terkait kompetensi produktivitas konstruksi	Kemen PUPR		2015 - 2019

TABEL SL-2.1 Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan I

TUJUAN 1: Meringkatkan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan

SASARAN INDIKATOR KINERJA 1	SATUAN 2	LOKASI 3	TARGET						ANGGARAN (JUTA)						
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	TOTAL 9	2015 10	2016 11	2017 12	2018 13	2019 14	TOTAL 15	
SASARAN STRATEGIS															
1	Meningkatnya ketepatan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan														
(1)	Indeks rasio cakupan infrastruktur PUPR terhadap ketepatan pengembangan kawasan	%	35 WPS	80	85	90	95	100	100						
2	Meningkatnya ketepatan perencanaan, penrograman dan penganggaran														
(1)	Tingkat ketepatan kebijakan perencanaan penrograman terhadap penganggaran penitangan bidang PUPR	%	7 Pulau	80	85	90	95	100	100						
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional														
(1)	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	%		75	78	82	86	90	90						
PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH										525.508	946.849	1.187.816	1.302.676	1.420.816	5.383.165
SASARAN PROGRAM															
1	Meningkatnya ketepatan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun pedesaan														
1	Tingkat ketepatan infrastruktur PUPR dalam kawasan	%	35 WPS	78	84	89	95	100	100						
2	Tingkat ketepatan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS	%	35 WPS	78	83	89	94	100	100						
3	Tingkat ketepatan infrastruktur PUPR antar WPS	%	35 WPS	76	82	88	94	100	100						
2	Meningkatnya ketepatan perencanaan dan penrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun pedesaan														
1	Tingkat ketepatan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	%	35 WPS	80	85	90	95	100	100						
2	Tingkat sinkronisasi program (waktu, ruang, lokasi, sasaran) disertai kebutuhan dengan penrograman	%	35 WPS	78	84	90	95	100	100						

SASARAN INDIKATOR KINERJA 1	SATUAN 2	LOKASI 3	TARGET						ANGGARAN (JUTA)						
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	TOTAL 9	2015 10	2016 11	2017 12	2018 13	2019 14	TOTAL 15	
KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH															
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN															
SASARAN KEGIATAN															
1	Layanan Administrasi Kepegawaian	Laporan	Jakarta	7	8	7	11	12	45	140.342	165.000	180.000	190.000	200.000	875.342
1	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	Laporan	Jakarta	7	8	7	11	12	45	11.475	14.000	16.000	18.515	21.252	81.282
2	Layanan Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi	Laporan	Jakarta	7	9	10	11	12	49	16.730	13.000	14.350	17.185	19.771	75.644
1	Jumlah kegiatan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja	Laporan	Jakarta	4	4	6	6	7	27						
2	Jumlah layanan data informasi	Laporan	Jakarta	3	5	4	5	5	22						
3	Layanan Musun, Kerjasama, dan Informasi	Laporan	Jakarta	9	9	12	13	14	57	21.533	25.000	28.750	28.601	30.841	134.625
1	Jumlah layanan produk dan layanan hukum	Laporan	Jakarta	3	3	4	4	4	18						
2	Jumlah fasilitas kerjasama	Laporan	Jakarta	3	3	4	5	5	20						
3	Jumlah layanan informasi	Laporan	Jakarta	3	3	4	4	5	19						
4	Layanan Administrasi Keuangan, Umum dan SHN	Laporan	Jakarta	8	9	10	11	12	50	9.690	11.100	12.775	14.692	16.895	65.151
1	Jumlah layanan administrasi keuangan, umum dan SHN	Laporan	Jakarta	8	9	10	11	12	50						
5	Layanan Perkantoran	Laporan	Jakarta	4	4	4	4	4	20	88.944	107.891	107.425	118.000	112.800	518.260
1	Jumlah layanan perkantoran	Laporan	Jakarta	4	4	4	4	4	20						
KEGIATAN 1.2: PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
UNIT ORGANISASI: PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASARAN KEGIATAN															
1	Kebijakan dan strategi ketepatan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah	Dokumen Rumusan	Jakarta	4	3	4	4	4	19	72.390	100.000	137.154	147.154	157.154	613.842
1	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategi ketepatan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah yang disusun dan difinalisasi	Dokumen	Jakarta	1	4	3	3	3	14	10.500	13.500	18.000	18.576	18.000	78.576
2	Jumlah pedoman perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR yang disusun dan difinalisasi perencanaanya	Pedoman	Jakarta	1	4	3	3	3	14						
2	Rencana jangka panjang dan rencana strategi pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR	Dokumen	Jakarta	4	9	11	12	12	48	3.490	14.000	19.623	38.160	26.192	91.375
1	Jumlah dokumen rencana strategi serta rumusan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan infrastruktur terpadu PUPR yang disusun dan difinalisasi	Dokumen	Jakarta	4	9	11	12	12	48						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						AMODARAN (JUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Facilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS	lokasi	Jakarta	20	20	20	33	37	139	14.300	27.738	66.050	73.971	88.350	281.569
1	Jumlah pencadangan tanah yang difasilitasi	lokasi	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
2	Jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi	lokasi	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
3	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk area rehabilitasi di 35 WPS	lokasi		18	16	27	31	36	129						
6	Layanan Perkantoran	Laporan	Jakarta	5	5	5	5	5	25	9.082	9.082	16.790	21.000	22.783	78.765
1	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	Laporan	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
KEGIATAN 1.5: PENGEMBANGAN PERKOTAAN															
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN PERKOTAAN															
SASARAN KEGIATAN															
										111.904	250.000	360.000	336.000	363.000	1.354.604
1	Ketijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen	Jakarta	10	4	4	4	4	26	23.074	45.937	54.471	66.756	67.638	251.874
1	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	10	4	4	4	4	26						
2	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	dokumen	Jakarta	17	22	21	21	21	102	42.119	115.000	125.000	135.000	136.515	554.634
1	Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	dokumen	Jakarta	17	22	21	21	21	102						
3	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10	4.135	4.961	5.953	7.144	6.572	30.765
1	Jumlah layanan data dan informasi	laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
4	Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	dokumen rumusan	Jakarta	1	2	2	2	2	9	2.339	4.495	6.848	8.274	10.811	32.868
1	Jumlah rumusan program yang dikemukakan	dokumen rumusan	Jakarta	1	2	2	2	2	9						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						AMOGARAN (JUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Rencana Teknis	Jakarta	5	5	5	5	5	25	20.192	55.998	79.999	84.354	95.998	336.214
1	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disusun dan ditetapkan	Rencana Teknis	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
2	Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Area Inkubasi	Jakarta	13	12	12	12	11	60						
6	Pedoman teknis, rencana, dan program kelayakan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Pedoman	Jakarta	3	4	6	6	6	25	4.955	10.140	12.788	14.602	17.522	59.387
1	Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program kelayakan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Pedoman	Jakarta	3	4	6	6	6	25						
7	Layanan Teknis kelayakan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Laporan	Jakarta	9	9	9	10	11	48	13.299	11.639	13.907	16.760	20.112	75.777
1	Jumlah Layanan Teknis kelayakan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Laporan	Jakarta	9	9	9	10	11	48						
8	Layanan Perkantoran	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5	1.900	2.160	2.542	3.110	3.732	13.384
1	Jumlah laporan perkantoran	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
PROGRAM 2 : PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITAS PENGOUSAHAAN INFRASTRUKTUR															
SASARAN PROGRAM										722.900	503.709	1.143.859	1.365.155	1.507.413	5.763.195
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional														
1	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	%		3	3	3	3	3	15						
2	Meningkatnya persentase BIUK yang berkualitas besar														
1	Persentase kenaikan BIUK menjadi berkualitas Besar	%		10	10	10	10	10	50						
3	Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak														
1	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi	%		5	5	5	5	5	40						
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten														
1	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%		2	4	5	7	9	27						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						AMOGARAN (JUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Meningkatnya utilisasi produk unggulan														
1	Persentase kenaikan tingkat utilisasi produk unggulan	%		3	3	3	3	3	15						
KEGIATAN 2.1: PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR															
SASARAN KEGIATAN										47.550	48.928	52.424	55.045	57.797	262.744
1	Pengaturan pembinaan investasi infrastruktur	Draft MSPK		4	4	4	4	4	20						
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur	Draft NSPK		4	4	4	4	4	20						
2	Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur dan Pengelolaan Risiko	Profil		4	4	4	4	4	20						
1	Jumlah profil pembinaan investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko	Profil		4	4	4	4	4	20						
3	Pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan Bulat Layanan		13	13	13	13	13	66						
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulat Layanan		13	13	13	13	13	66						
KEGIATAN 2.2 : PEMBINAAN PENYELENGGAAN JASA KONSTRUKSI															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA PENYELENGGAAN JASA KONSTRUKSI															
SASARAN KEGIATAN										60.178	63.193	66.344	69.662	73.145	332.512
1	Pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Draft MSPK		7	7	7	7	7	35						
1	Jumlah draft NSPK pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Draft NSPK		7	7	7	7	7	35						
2	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi	Profil		5	5	5	5	5	25						
1	Jumlah profil pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Profil		5	5	5	5	5	25						
3	Pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan Bulat Layanan		13	13	13	13	13	66						
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulat Layanan		13	13	13	13	13	66						
KEGIATAN 2.3: PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI															
SASARAN KEGIATAN										57.963	56.918	62.914	66.060	69.363	315.319
1	Pengaturan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Draft MSPK		8	8	8	8	8	40						
1	Jumlah draft NSPK pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Draft NSPK		8	8	8	8	8	40						

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						AMODARAN (JUTA)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 Pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Profil		8	8	8	8	8	40						
1 Jumlah profil pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Profil		8	8	8	8	8	40						
3 Pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan Bulanan Layanan		13	13	13	13	13	65						
1 Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulanan Layanan		13	13	13	13	13	65						
KEGIATAN 2.4: PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN														
1 Pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Draft NSPK	Jakarta	26	30	36	38	27	155						
1 Jumlah draft NSPK kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Draft NSPK	Jakarta	26	30	36	38	27	155						
2 Pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Profil	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
1 Jumlah profil kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Profil	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
3 Pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan Bulanan Layanan	Jakarta	13	13	13	13	13	65						
1 Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulanan Layanan	Jakarta	13	13	13	13	13	65						
KEGIATAN 2.5: KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI														
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN														
SASARAN KEGIATAN														
1 Kejasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Profil		1	1	1	1	1	5						
1 Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Profil		1	1	1	1	1	5						
2 Pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan Bulanan Layanan		13	13	13	13	13	65						
1 Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulanan Layanan		13	13	13	13	13	65						
									387.995	551.097	752.841	854.273	1.155.987	3.781.953

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						AMODARAN (JUTA)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KEGIATAN 2.6: PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI														
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN														
1 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi	Dokumen/Laporan		5	5	5	5	5	25						
1 Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi	Dokumen/Laporan		5	5	5	5	5	25						
2 Pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan Bulanan Layanan		13	13	13	13	13	65						
1 Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulanan Layanan		13	13	13	13	13	65						
									113.333	116.000	124.950	131.197	137.757	623.236

TABEL BL-2.2. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan 2

TUJUAN 2 : Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan keselamatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (LUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
SASARAN STRATEGIS															
1	Meningkatnya dukungan untuk ketahanan pangan dan energi	%	45,83	50,33	54,83	58,33	63,43	63,43							
(1)	Tingkat dukungan realisasi pangan dan ketahanan energi	%	45,83	50,33	54,83	58,33	63,43	63,43							
2	Meningkatnya ketahanan air	%	28,96	35,00	45,88	56,08	67,88	67,88							
(2)	Tingkat dukungan untuk ketahanan air nasional	%	28,96	35,00	45,88	56,08	67,88	67,88							
SASARAN PROGRAM									28.852.951	95.218.188	72.487.428	76.528.287	75.888.385	219.981.738	
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku														
1	Penggiatan aset layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m3/etik	8,65	12,00	11,87	13,26	22,00	37,37							
2	Pengembalian fungsi dan aset layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	m3/etik	8,28	1,70	2,39	2,98	8,84	22,90							
3	Terjaganya fungsi dan aset layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m3/etik	49,23	57,88	69,88	81,75	94,75	94,75							
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air														
1	Penggiatan kapasitas tampung sumber air	juta m3	1.024,58	-	102,81	146,62	624,15	1.707,97							
2	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	juta m3	316,84	788,40	762,84	764	754	3.410							
3	Terjaganya kapasitas tampung sumber air	juta m3	16.368	16.969	16.982	16.395	17.087	17.396,85							
3	Meningkatnya kinerja layanan tenaga														
1	Penggiatan layanan jaringan tenaga	hektar	181.282,78	244.952,37	265.184,88	236.847,08	216.700,03	1.142.963							
2	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan tenaga	hektar	477.960,57	681.490,27	976.102,81	644.548,04	508.889,51	3.083.300							
3	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan tenaga	hektar	3.742.033	3.345.174	3.424.360	3.579.684	3.804.791	3.884.791							
4	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air														
1	Penggiatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	hektar	-	-	-	-	-	290.300							

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (LUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
3	Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air														
1	Peningkatan pemenuhan kawasan lindung WPD konservasi pada kawasan pertanian	%	30	30	30	30	30	100							
4	Meningkatnya ketepatan lalu lintas pengelolaan SDM	index	2,24	2,99	2,24	3,28	4,00	4,00							
1	Peningkatan indeks RSD (index)	index	2,24	2,99	2,24	3,28	4,00	4,00							
5	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air														
1	Peningkatan potensi energi sumber air	MW	113,16	0,80	1,14	5,30	22,71	143,51							
REKAPITULASI: DUKUNGAN BAKAN-JERAM DAN "BERSI-LAHNYA"															
LUAS DOKUMEN/BIK SIPRITAMAT DIREKTORAT JENDERAL, BDA															
SASARAN KEGIATAN									548.236,32	577.265,26	816.427,48	681.713,62	730.837,65	3.431.459,87	
1	NSPK, pemantauan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan antara, SBRU, lingkungan, informasi publik, dan lahan	NSPK						24							
1	Jumlah NSPK, penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan antara, SBRU, lingkungan, informasi publik, dan lahan	NSPK	0	5	0	5	0	25							
2	Layanan teknis penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan antara, SBRU, lingkungan, informasi publik, dan lahan	Penca' Masyarakat' Dunia Usaha		19	16	19	16	46		2.083	3.090	4.008	6.900	14.084	
1	Jumlah Penca' masyarakat dunia usaha yang dibina/bimbing teknis penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan antara, SBRU, lingkungan, informasi publik, dan lahan	Penca' Masyarakat' Dunia Usaha		19	16	19	16	46							

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAHAN (JUZA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
3. Layanan dukungan manajemen pemerintahan regulasi dan pemberdayaan hukum, serta administrasi pengelolaan SDA dan usaha, MRU, keuangan, informasi publik, dan lahan	BBWS/BWS								58.624	64.142	74.933	193.837	123.591	427.319
1. Layanan dukungan manajemen pemerintahan regulasi dan pemberdayaan hukum, serta administrasi pengelolaan SDA dan usaha, MRU, keuangan, informasi publik, dan lahan	BBWS/BWS													
4. Layanan pemerintahan	Bulan								668.282	610.827	646.236	655.891	672.141	2.653.383
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12						
KEGIATAN 3: PEMBERIAN PENYALINGAN SDA														
TUJUAN STRATEGIS: TERPROMOSI KE PEMERINTAHAN SDA														
SASARAN REGULASI														
1. NSPK telah kelola pengelolaan SDA terpadu	NSPK		1	1	1	1	1	1	109.650,21	100.971,27	73.171,22	27.427,18	86.473,55	467.300,33
1. Jumlah NSPK telah kelola pengelolaan SDA terpadu	NSPK		1	1	1	1	1	1	9.343,00	10.638	15.084	32.078	33.387	93.823
2. Jumlah MPTM/MSU/MSK/MSK/MSK terpadu	BBWS/BWS		0	33	33	33	33	33	88.700,94	24.933	8.187	31.534	37.248	181.597
1. Jumlah MPTM/MSU/MSK/MSK/MSK terpadu yang diberikan dukungan manajemen terpadu pengelolaan SDA terpadu	BBWS/BWS		0	33	33	33	33	33						
3. Jumlah telah kelola pengelolaan SDA terpadu	Pemula Madyan Dewa Usaha			5	5	5	5	5	20.360	38.655	18.791	33.732	33.732	88.959
1. Jumlah Pemula/Manajemen terpadu yang diberikan terpadu pengelolaan SDA terpadu	Pemula Madyan Dewa Usaha			2	5	5	5	5						
4. Layanan pemerintahan	Bulan		12	12	12	12	12	12	16.775	16.50	28.243	22.320	34.592	108.413
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12						
KEGIATAN 4: PEMBERIAN PENYALINGAN SDA														
TUJUAN STRATEGIS: TERPROMOSI KE PEMERINTAHAN SDA														
LEFIT DEKORASI: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JANGKAWAN SDA														
SASARAN REGULASI														
1. NSPK telah kelola dan pengelolaan SDA	NSPK		1	1	1	1	1	1	94.073,88	79.130,75	91.488,54	87.872,72	83.243,81	432.809,77
1. Jumlah NSPK pengelolaan dan pengelolaan SDA	NSPK		1	1	1	1	1	1	930,37	1.000	1.180	1.210	1.331	6.147,57

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAHAN (JUZA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
3. Layanan teknis perencanaan dan penganggaran SDA	Pemula Madyan Dewa Usaha			5	5	5	5	5	28		2.683	3.680	4.908	5.906	16.884
1. Jumlah Pemula/Manajemen terpadu yang diberikan terpadu perencanaan dan penganggaran	Pemula Madyan Dewa Usaha			5	5	5	5	5	20						
3. Layanan dukungan manajemen pemerintahan dan perencanaan SDA	BBWS/BWS								48.240	44.632	48.730	47.918	49.395	236.717	
1. Jumlah BBWS/BWS yang diberikan dukungan manajemen pemerintahan dan perencanaan SDA	BBWS/BWS														
4. Layanan pemerintahan	Bulan		12	12	12	12	12	12	25.653	28.213	31.640	34.944	37.559	158.019	
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							
KEGIATAN 4: PEMBERIAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PEMANGKUP AIR LAHANG															
TUJUAN STRATEGIS: MASTR BANGUNAN															
SASARAN REGULASI															
1. NSPK bangunan, embung dan bangunan pemangkupan air lahang	NSPK		1	1	1	1	1	1		93.261,45	38.894,78	88.820,25	35.493,17	258.470,75	
1. Jumlah NSPK bangunan, embung dan bangunan pemangkupan air lahang	NSPK		1	1	1	1	1	1		2.688	2.289	2.420	2.882	8.282	
2. Layanan teknis bangunan, embung dan bangunan pemangkupan air lahang	Pemula Madyan Dewa Usaha			5	5	5	5	5	28		13.370	18.021	17.023	18.380	63.793
1. Jumlah Pemula/Manajemen terpadu yang diberikan terpadu bangunan, embung dan bangunan pemangkupan air lahang	Pemula Madyan Dewa Usaha			5	5	5	5	5	20						
3. Layanan dukungan manajemen dan teknis bangunan, embung dan bangunan pemangkupan air lahang	BBWS/BWS		33	33	33	33	33	33		28.628	37.383	39.953	42.899	148.865	
1. Jumlah BBWS/BWS yang diberikan dukungan manajemen dan teknis bangunan, embung dan bangunan pemangkupan air lahang	BBWS/BWS		33	33	33	33	33	33							
4. Layanan pemerintahan	Bulan		12	12	12	12	12	12		33.348	35.288	37.324	37.829	143.788	
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							

SARAFAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAHAN (AUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
KEGIATAN 4: PEMBERAHAN HIDROPIKES, PENGEMBANGAN PASIR, LAHAR, LIMBAH BERSIH, DAN PEREMBAHAN PANTAI															
LUAS DOKUMENTASI DIREKTORAT SIGAM DAN PANTAI															
SARAFAN KINERJA															
1	HSPH persediaan pasir, lahar gunung berapi, dan pengemasan pantai	NSGPK		1	1	1	1	1	5	108.187,77	93.385,46	102.869,82	118.734,23	121.481,22	549.537,50
	1 Jumlah HSPH persediaan pasir, lahar gunung berapi, dan pengemasan pantai	NSGPK		1	1	1	1	1	5		3.000	3.000	2.420	2.482	8.282
3	Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengemasan pantai	Penda masyarakat dunia usaha		-	3	3	3	3	20		3.000	3.000	4.900	5.800	14.800
	1 Jumlah Penda masyarakat dunia usaha yang diberi bimbingan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengemasan pantai	Penda masyarakat dunia usaha			3	3	3	3	20						
3	Layanan teknis pemeliharaan GPM drainase di bawah	Penda		-	20	20	20	20	80		3.000	3.000	4.900	5.800	14.800
	1 Jumlah Penda yang diberi bimbingan teknis tentang pemeliharaan GPM drainase di bawah	Penda			20	20	20	20	80						
4	Layanan dukungan manajemen dan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengemasan pantai	SDS/SDWS		30	33	33	33	33	33	83.976	87.848	88.798	95.828	87.874	387.734
	1 Jumlah SDS/SDWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengemasan pantai	SDS/SDWS		30	33	33	33	33	33						
5	Layanan teknis desain pengendalian banjir	SDS/SDWS		30	33	33	33	33	33		3.000	3.000	4.900	5.800	14.800
	1 Jumlah SDS/SDWS yang diberi bimbingan teknis desain pengendalian banjir	SDS/SDWS		30	33	33	33	33	33						
6	Layanan pelaksanaan	Bulan		12	12	12	12	12	12	74.222	36.000	35.000	35.900	36.000	210.722
	1 Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12						
KEGIATAN 5: PEMBERAHAN BANGSA, RAWA, DAN "KREBAK"															
LUAS DOKUMENTASI DIREKTORAT SIGAM DAN RAWA															
SARAFAN KINERJA															
1	HSPH lokasi pemukiman, lokasi rawa, dan lokasi tambak	NSGPK		1	1	1	1	1	5	132.112,526	121.016,545	147.072,565	153.820,545	150.370,500	737.875,100
	1 Jumlah HSPH lokasi pemukiman, lokasi rawa, dan lokasi tambak	NSGPK		1	1	1	1	1	5	1.883,75	3.000	3.780	2.220	2.482	13.365

SARAFAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAHAN (AUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
3	Layanan teknis lokasi pemukiman, lokasi rawa, dan lokasi tambak	Penda masyarakat dunia usaha		-	5	5	5	5	20		43.642	43.642	46.377	48.922	182.583
	1 Jumlah Penda masyarakat dunia usaha yang diberi bimbingan teknis pemukiman dan pelaksanaan pemukiman/peningkatan dan rehabilitasi lokasi pemukiman, lokasi rawa, dan lokasi tambak	Penda masyarakat dunia usaha			5	5	5	5	20						
3	Layanan teknis pemeliharaan GPM lokasi B. Daerah	Penda		-	5	5	5	5	20		3.000	3.000	4.900	5.800	14.800
	1 Jumlah Penda yang diberi bimbingan teknis tentang pemeliharaan GPM lokasi B. Daerah	Penda			5	5	5	5	20						
4	Layanan dukungan manajemen dan teknis pemukiman, lokasi rawa, dan lokasi tambak	SDS/SDWS		30	33	33	33	33	33	114.736	84.168	87.827	70.973	74.486	376.136
	1 Jumlah SDS/SDWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pemukiman, lokasi rawa, dan lokasi tambak	SDS/SDWS		30	33	33	33	33	33						
5	Layanan pelaksanaan	Bulan		12	12	12	12	12	12	48.024	28.000	28.000	34.900	37.000	180.824
	1 Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12						
KEGIATAN 7: PEMBERAHAN PEMBELAAN AIR BAWA DAN AIR TANAH															
LUAS DOKUMENTASI PUSAT AIR BAWA DAN AIR TANAH															
SARAFAN KINERJA															
1	HSPH persediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	NSGPK		1	1	1	1	1	5		43.316,38	49.224,18	52.880,38	56.256,17	185.587,11
	1 Jumlah HSPH persediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	NSGPK		1	1	1	1	1	5		3.000	3.000	2.420	2.482	8.282
3	Layanan teknis pengelolaan air tanah dan air baku	Penda masyarakat dunia usaha		-	5	5	5	5	20		6.001,044	6.187,237	10.874,960	11.188,432	34.782
	1 Jumlah Penda masyarakat dunia usaha yang diberi bimbingan teknis pemukiman dan pelaksanaan pemukiman/peningkatan dan rehabilitasi lokasi pemukiman, lokasi rawa, dan lokasi tambak	Penda masyarakat dunia usaha			5	5	5	5	20						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAHAN (JUVA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
3. Layanan dukungan manajemen dan teknis pengelolaan air tanah dan air baku	BONDORWIS		32	32	32	32	32	32	-	21.825,417	28.251,832	28.274,417	28.274,341	148.154	
1. Jumlah BONDORWIS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pengelolaan air tanah dan air baku	BONDORWIS		32	32	32	32	32	32							
4. Layanan pemantauan	Bulan		12	12	12	12	12	12		18.000	15.000	12.000	13.370	65.010	
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							
REKAM YAKSI: PEMERIKSAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BERSYARAS PANGSUNGOLONGAN DARUHA* KAWAT BENCANA															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BALAI OPERASI DAN PEMELIHARAAN															
SASARAN KEGIATAN															
1. HSPK OP sarana prasarana SDA	NG/PK		6	6	6	6	6	6	26	12.557,35	13.313	15.184	16.714	18.385	78.663
1. Jumlah HSPK pemantauan OP sarana prasarana SDA	NG/PK		6	6	6	6	6	6	26						
2. Layanan teknis pemantauan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	Penda masyarakat dunia usaha		0	25	20	25	20	100	-	192.048	209.122	227.094	247.322	878.637	
1. Jumlah Penda masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis pemantauan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	Penda masyarakat dunia usaha			25	20	25	20	100							
3. Layanan dukungan manajemen dan teknis pemantauan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	BONDORWIS		33	33	33	33	33	33	33	384.733,31	358.923	289.371	232.719	247.657	1.173.810
1. Jumlah BONDORWIS yang diberi dukungan manajemen dan teknis OP sarana dan prasarana SDA	BONDORWIS		33	33	33	33	33	33							
4. Layanan dukungan manajemen dan teknis penyusunan dan penetapan pola kawasan rawan bencana	BONDORWIS		33	33	33	33	33	33	-	3.088	2.289	2.420	2.662	6.322	
1. Jumlah BONDORWIS yang diberi bimbingan teknis penyusunan pola kawasan rawan bencana	BONDORWIS		33	33	33	33	33	33							
5. Fasilitas perbaikan pemetaan penduduk sipil dan	Unit		-	34	34	34	34	34	-	36.542	38.111	41.099	36.864	151.625	
1. Jumlah pemetaan yang dilakukan	Unit		-	1	1	1	1	1	4						
2. Jumlah bahan bangunan yang ditukarkan	Unit		-	33	33	33	33	33	33						
6. Layanan dukungan manajemen dan teknis tanggap darurat bencana	BONDORWIS		33	33	33	33	33	33	33	694.732,39	308.089	289.089	339.300	389.899	1.719.762
1. Jumlah BONDORWIS yang diberi bimbingan teknis tanggap darurat bencana	BONDORWIS		33	33	33	33	33	33							
7. Layanan pemantauan	Bulan		12	12	12	12	12	12		83.334	69.687	78.634	84.297	32.727	395.659
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAHAN (JUVA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
REKAM YAKSI: DUKUNGAN MANAJEMEN DASAR															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BALAI OPERASI SUMBER DAYA AIR MANISRAL															
SASARAN KEGIATAN															
1. HSPK pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAH	NG/PK		4	4	4	4	4	4	5	12.085,39	13.516,35	14.862,39	14.811,23	15.200,78	70.337,24
1. Jumlah HSPK dukungan sekretariat Dewan SDAH	NG/PK		4	4	4	4	4	4	5		4.083,03	4.100,00	4.210,04	4.331,00	4.844,08
2. Layanan dukungan manajemen pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAH	Dokumen		4	4	4	4	4	4	114	3.807,44	3.633,31	3.273,36	3.066,28	2.776,61	16.778,44
1. Jumlah dokumen DSDAN yang diturunkan	Dokumen			4	4	4	4	4	114						
3. Pelayanan rasional pengelolaan SDA yang dilaksanakan	Dokumen		4	4	4	4	4	4	4	6.453,08	6.187,55	6.599,56	6.646,53	7.418,77	35.475,34
1. Jumlah dokumen kebijakan nasional yang dilaksanakan	Dokumen			4	4	4	4	4	4						
4. Layanan pemantauan	Bulan		12	12	12	12	12	12		2.548	2.000	3.080	3.380	3.720	15.518
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							
REKAM YAKSI: PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA															
UNIT ORGANISASI: BALAI BESAR BEKUNDAH															
SASARAN KEGIATAN															
1. Insan berdaya	NG/PK		4	4	4	4	4	4	5	19.810,00	18.485,15	20.780,51	22.216,64	23.773,14	105.177,77
1. Jumlah HSPK beasiswa berdaya	NG/PK		4	4	4	4	4	4	5	2.262,00	2.483,29	2.737,02	3.810,03	3.311,01	18.916,32
2. Layanan teknis pembinaan berdaya	Penda masyarakat dunia usaha		4	4	4	4	4	4	39	-	183,83	180,00	180,00	180,00	438,83
1. Jumlah Penda masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis beasiswa berdaya	Penda masyarakat dunia usaha			4	4	4	4	4	39						
3. Layanan dukungan manajemen dan teknis beasiswa berdaya	BONDORWIS		20	20	20	20	20	20	29	14.172,79	14.017,15	14.946,74	15.718,51	18.633,85	75.359,03
1. Jumlah BONDORWIS yang diberi dukungan manajemen dan teknis beasiswa berdaya	BONDORWIS		20	20	20	20	20	20	29						
4. Layanan pemantauan	Bulan		12	12	12	12	12	12		2.548	2.000	3.080	3.380	3.720	15.518
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAH (AUTA)																		
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL												
KEGAYATAN 11: PENGELOLAAN BENDUNGAN, ERUPSI DAN BANGUNAN PEMAMPUNG AIR LAINNYA																										
UNIT ORGANISASIONAL: BMS/BS/BS																										
SASARAN KEGIATAN																										
1	Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan pemampung air lainnya	Pemda masyarakat/ dinas teknis	-	13	90	18	10	-40	3.940.262,00	11.628.818,41	18.322.389,95	21.615.953,05	22.598.987,31	83.542.991,71												
1	Jumlah Bendaharawan/Adm swake yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pemupung pemampungan dan rehabilitasi bendung, embung dan bangunan pemampung air lainnya	Pemda masyarakat/ dinas teknis	-	5	5	5	5	20																		
2	Jumlah Bendaharawan/Adm swake yang diberi bimbingan teknis perencanaan OP bendungan, embung dan bangunan pemampung air lainnya	Pemda masyarakat/ dinas teknis	-	5	5	5	5	20																		
2	Tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan pemampung air lainnya yang dihabiskan	Hektar	2.294	3.882	11.970	11.488	3.937	36.907	1.000.000,00	1.690.900,00	1.800.000,00	1.900.000,00	4.690.900													
1	Luas tanah yang dihabiskan	Hektar	2.294	3.882	11.970	11.488	3.937	36.907																		
3	Rencana teknis dan dokumen anggaran bendungan, embung dan bangunan pemampung air lainnya yang dibangun dan dihabiskan/direhabilitasi	Dokumen	48	37	36	33	22	167	10.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	40.000													
1	Jumlah rencana teknis dan dokumen anggaran bendungan, embung dan bangunan pemampung air lainnya yang dibangun dan dihabiskan/direhabilitasi	Dokumen	48	37	36	33	22	167																		
4	Bendungan baru yang dibangun	Bendungan	13	8	8	11	8	48	4.917.581,41	5.376.990,90	8.195.075,77	7.708.227,70	34.838.533													
1	Jumlah konstruksi bendungan baru yang dihabiskan	Bendungan	13	8	8	11	8	48																		
5	Bendungan dalam tahap pelaksanaan (di going)	Bendungan	16 on going 13 baru/2 rencana	22 on going/13 baru/9 rencana	31 on going/13 baru/5 rencana	34 on going/11 baru/13 rencana	36 on going/13 baru/5 rencana	65 On Going/19 Baru/29	4.322.514,92	18.464.330,50	10.980.727,70	8.950.151,01	34.938.129													
1	Jumlah konstruksi bendungan dalam tahap pelaksanaan (di going)	Bendungan	16	22	31	34	36	65																		
6	Pemasaran sumber energi yang dibangun	Buah	-	-	3	5	3	11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000													
1	Jumlah konstruksi pasarnya sumber energi yang dihabiskan	Buah	-	-	3	5	3	11																		

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISRAH (AUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
7	Erupsi dan bangunan pemampung air lainnya yang dibangun/direhabilitasi	Buah	306	154	190	235	250	1.380	734.975,70	1.160.000,00	1.990.900,00	1.350.000,00	3.980.000,00	8.544,074
1	Jumlah konstruksi embung dan bangunan pemampung air lainnya yang dihabiskan	Buah	306	154	190	235	250	1.380						
8	Bendungan yang direhabilitasi	Bendungan	8	10	10	10	10	48	151.727,00	28.223,83	81.379,90	283.444,11	322.351,40	817,507
1	Jumlah konstruksi bendungan yang direhabilitasi	Bendungan	8	10	10	10	10	48						
9	Erupsi dan bangunan pemampung air lainnya yang direhabilitasi	Buah	50	182	114	130	140	620	540.114,00	712.783,17	791.577,20	690.550,00	707.640,54	2.863,597
1	Jumlah konstruksi embung dan bangunan pemampung air lainnya yang direhabilitasi	Buah	50	182	114	130	140	620						
10	Bangunan pengontrol sedimen (check dam) yang dibangun	Buah	100	20	20	20	30	180	20.214,74	30.000,00	23.900,00	20.000,00	29.000,00	128.214,74
1	Jumlah konstruksi bangunan pengontrol sedimen (check dam) yang dihabiskan	Buah	100	20	20	20	30	180						
11	Bangunan pengontrol sedimen (check dam) yang direhabilitasi	Buah	8	8	4	8	8	28	11.300	28.000,00	27.500,00	30.200,00	33.275,00	107.300,00
1	Jumlah konstruksi bangunan pengontrol sedimen (check dam) yang direhabilitasi	Buah	8	8	4	8	8	28						
12	Bangun yang direhabilitasi	Bangun	13	7	7	7	8	42	107.827,51	66.064,88	58.890,88	58.300,00	58.890,88	317.822,47
1	Jumlah bangun yang direhabilitasi	Bangun	13	7	7	7	8	42						
13	Damau yang direhabilitasi	Damau	3	5	6	6	6	25	80.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.230.000,00
1	Jumlah damau yang direhabilitasi	Damau	3	5	6	6	6	25						
14	Kawatir rawa yang dikonstruksi	Kawatir	-	0	0	0	0	0		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1	Jumlah kawatir rawa yang dikonstruksi	Kawatir	-	0	0	0	0	0						
15	Mata air yang dibendung	Mata air	-	5	5	5	5	20		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1	Jumlah mata air yang dibendung	Mata Air	-	5	5	5	5	20						
16	Damau dan gati sempadannya yang diperbaiki/pelengkapannya	Damau	-	6	6	6	6	24		66.000,00	63.000,00	58.300,00	58.890,00	246.000,00
1	Jumlah damau dan gati sempadannya yang diperbaiki/pelengkapannya	Damau	-	6	6	6	6	24						
17	Layanan pemeliharaan	Bulan	12	12	12	12	12	48	-6.900	45.000	-6.000	54.560	80.211	255,261
1	Jumlah bulan layanan	Bulan	12	12	12	12	12	48						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET						MISALAH (JUZA)								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
REGMATY 12: PENGELOMPOKAN BANGUNAN, LAHAR GUNUNG BERAP, DAN PENGAMANAN PANTAI																	
UNIT ORGANISAS : BEMW/BWS																	
SASARAN KESEHATAN																	
1	Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pendak masyarakat/ dusun usaha	-	93	93	93	93	93	-40	8.125.936,87	12.506.148,44	16.858.633,19	15.423.394,04	17.336.515,79	68.365.357,68		
1	Jumlah Pendak masyarakat/ dusun usaha yang diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pendak masyarakat/ dusun usaha	-	3	3	3	3	3	-20	1.042.153,29	18.093,93	16.900,00	90.000,00	19.900,00	5.582.156,24		
2	Jumlah Pendak masyarakat/ dusun usaha yang diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pendak masyarakat/ dusun usaha	-	3	3	3	3	3	-20								
2	Tanah untuk konstruksi bangunan pengamanan banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai yang dibebaskan	Hektar	510	1.005	1.505	1.505	1.500	1.500	6.825	1.006.693,89	1.003.895,89	1.008.300,00	1.009.690,89	1.009.900,00	4.849.900,00		
1	Luas tanah yang dibebaskan	Hektar	510	1.005	1.505	1.505	1.500	1.500	6.825								
3	Pemenuhan teknis dan dokumen lingkungan konstruksi bangunan pengamanan banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai yang dibangun/ditingkatkan dan dibiayai/dibiayai	Dokumen	41	43	49	48	48	48	237	16.000,00	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	40.000,00		
1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunan pengamanan banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai yang dibangun/ditingkatkan dan dibiayai/dibiayai	Dokumen	41	43	49	48	48	48	237								
4	Hambatan sungsang dan pembatalan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Km	294,38	480,00	511,00	527,00	493,14	2.312,88	5.762.899,87	7.413.392,87	7.297.225,51	6.187.430,89	29.842.825,39				
1	Panjang konstruksi sungsang sungsang dan pembatalan tanggul yang dibebaskan	Km	294,38	480,00	511,00	527,00	493,14	2.312,88									
5	Panjang tanggul non pertahanan dan perbaikan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Km	0	188	114	119	241	768	-	1.769.738,87	1.733.899,31	1.882.292,46	2.499.240,82	7.832.169,82			
1	Panjang konstruksi bangunan pertahanan dan perbaikan tanggul yang dibebaskan	Km	0	188	114	119	241	768									

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET						MISALAH (JUZA)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
6	Panjang kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan	Km	0	3	3	2	3	18	-	306.000,00	303.000,00	299.300,00	299.600,00	1.807.900,00
1	Panjang konstruksi kanal banjir yang dibebaskan	Km	0	3	3	2	3	18						
7	Stasiun pompa banjir yang dibangun	Buah	0	3	3	2	3	9	-	156.000,00	103.000,00	109.300,00	130.000,00	498.300,00
1	Jumlah konstruksi stasiun pompa yang dibebaskan	Buah	0	3	3	2	3	9						
8	Pemeliharaan normal yang dibangun	Stasiun	0	2	3	2	3	8	206.000,00	203.000,00	209.300,00	209.600,00	807.900,00	
1	Jumlah konstruksi pemeliharaan normal yang dibebaskan	Stasiun	0	2	3	2	3	8						
9	Stasiun pemadam & Warning System (PPWS) yang dibangun	BEMW/BWS	3	10	10	10	10	43	166.000,00	103.000,00	109.300,00	109.600,00	487.900,00	
1	Jumlah BEMW/BWS yang memiliki PPWS	BEMW/BWS	3	10	10	10	10	43						
10	Pemecah lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan	Buah	64	50	50	64	64	288	413.542,19	617.094,48	683.443,28	455.346,27	522.713,45	2.449.044,27
1	Jumlah konstruksi pemecah lahar gunung berapi yang dibebaskan	Buah	64	50	50	64	64	288						
11	Bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibangun/ditingkatkan	Km	81,81	84,77	80,99	108,43	133,70	529,00	1.811.888,11	1.017.390,26	1.467.822,08	1.877.171,74	1.834.350,04	7.394.318,11
1	Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibebaskan	Km	81,81	84,77	80,99	108,43	133,70	529,00						
12	Tembok pemecah gelombang (sea wall) yang dibangun/ditingkatkan	Km	-	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	172.893,93	283.790,38	688.059,64	380.330,28	1.485.074,11	
1	Panjang konstruksi tembok pemecah gelombang (sea wall) yang dibangun/ditingkatkan	Km	-	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00						
13	Selamun drainase yang dibangun/ditingkatkan**	Km	-	1	1	1	1	4	669.000,00	669.000,00	726.000,00	700.000,00	2.764.000,00	
1	Panjang konstruksi selamun drainase yang dibebaskan	Km	-	1	1	1	1	4						
14	Bangunan sarana pemecah gelombang yang dibangun/ditingkatkan**	Buah	-	-	-	-	-	-	210.000,00	220.000,00	242.000,00	296.000,00	968.000,00	
1	Jumlah konstruksi bangunan sarana pemecah gelombang yang dibangun/ditingkatkan	Buah	-	-	-	-	-	-						
15	Tanggul yang dibebaskan	Km	678,34	135,21	225,30	149,00	152,00	769,85	134.290,30	1.114.390,35	1.215.881,73	685.407,32	881.078,50	4.751.047,90
1	Panjang konstruksi sungsang sungsang dan pembatalan tanggul yang dibebaskan	Km	126,31	126,21	225,30	149,00	166,00	703,82						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISERAN (AJUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
16 Perbaikan tebing yang diperbaiki	Km		6,64	40,00	75,36	99,89	64,75	259,75		361.367,58	485.227,34	307.302,44	294.942,83	1.423.800,00
1 Panjang konstruksi bangunan penyangga dan perkuatan	Km		6,64	40,00	75,36	99,89	64,75	259,75						
17 Kanal banjir yang diperbaiki	Km		4	3	3	2	3	19		15.000,00	15.000,00	19.300,00	19.000,00	58.000,00
1 Panjang konstruksi kanal banjir yang diperbaiki	Km			3	3	2	3	19						
18 Basakan pompa banjir yang diperbaiki	Buah		0	3	3	2	3	9		1.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	9.000,00
1 Jumlah konstruksi mesin pompa yang diperbaiki	Buah			3	2	2	3	9						
19 Pekerjaan relasi yang diperbaiki	Buah		4	4	4	4	4	4		64.000,00	63.000,00	64.300,00	63.000,00	290.000,00
1 Jumlah konstruksi pekerjaan relasi yang diperbaiki	Buah			1	1	1	1	4						
20 Pengontrol lahar gunung bempu yang diperbaiki	Buah		74	14	20	30	30	85	324.500,00	161.300,00	167.330,00	137.100,00	66.000,00	714.330,00
1 Jumlah konstruksi pengontrol lahar gunung bempu yang diperbaiki	Buah		21	14	20	20	20	85						
21 Rangkaian pemecah gelombang (break water) yang diperbaiki	Km		0,07	2,73	3,03	2,85	2,85	11,90	3.346,24	34.000,00	154.725,00	66.073,04	47.575,04	214.330,34
1 Panjang konstruksi bangunan pemecah gelombang pantai water yang diperbaiki	Km		0,07	2,73	3,03	2,85	2,85	11,90						
22 Terbang pendarat gelombang (sea wall) yang diperbaiki	Km		-	3,13	0,10	0,10	0,10	0,40		1.839,20	1.900,10	1.900,20	2.100,00	7.667,50
1 Panjang konstruksi pemecah gelombang (sea wall) yang diperbaiki	Km		-	3,13	0,10	0,10	0,10	0,40						
23 Daman pengendalian banjir yang dipelihara	Dokumen		-	1	1	1	1	4		10.000,00	10.000,00	12.100,00	13.310,00	45.410,00
1 Tingkat pengendalian banjir yang dipelihara	Dokumen		-	1	1	1	1	4						
24 Sungai dan garis sempadannya yang dipayungi pedesertaannya	Sungai		-	20	20	20	20	80		206.000,00	203.000,00	208.300,00	208.000,00	800.000,00
1 Jumlah sungai dan garis sempadan yang dipayungi pedesertaannya	Sungai		-	20	20	20	20	80						
25 Layanan pemantauan	Bulan		12	12	12	12	12	48	54.000	54.000	65.300	71.000	70.700	274.000
1 Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	48						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISERAN (AJUTA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
REVISI: 10. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALANAN (RIGAS) PERMUKAAN, BAWA DAN TAMBAK														
UNIT OPERASIONAL: BAWA/BWS														
SASARAN 10.10.10														
1 Layanan teknis inspeksi pemecahan rigasi rawa dan rigasi tambak	Pemda masyarakat dan swasta		-	10	10	10	10	40	3.864.797	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.904.797,00
1 Jumlah Pemda/masyarakat/swasta usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kualitas rigasi pemecahan, rigasi rawa dan rigasi tambak	Pemda masyarakat dan swasta			0	0	0	0	0						
2 Jumlah Pemda/masyarakat/swasta usaha yang diberi bimbingan teknis pemecahan GP rigasi pemecahan, rigasi rawa dan rigasi tambak	Pemda masyarakat dan swasta			0	0	0	0	0						
3 Tanah untuk konstruksi bendung dan rigasi pemecahan rawan/rigasi tambak yang dipelihara	Hektar		4.815	5.642	5.834	4.416	3.345	23.742		408.000	480.000	480.000	480.000	4.800.000
1 Luas tanah yang dipelihara	Hektar		4.812,85	5.642,80	5.823,84	4.415,06	3.342,05	23.742,16						
3 Pemecahan teknis dan dokumen lingkungan bendung dan rigasi pemecahan, rigasi rawa dan rigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara/rehabilitasi	Dokumen		44	53	50	50	50	244		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan rigasi pemecahan, rigasi rawa dan rigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara/rehabilitasi	Dokumen		44	53	50	50	50	244						
4 Jaringan rigasi pemecahan rawan/rigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara/rehabilitasi	Km		3.900,28	411,34	391,44	394,82	376,30	4.166,89		372.500	671.800	835.400	720.800	3.212.600,33
1 Panjang konstruksi jaringan rigasi pemecahan rawan/rigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara/rehabilitasi	Km		3.900,28	411,34	391,44	394,82	376,30	4.166,89						
5 Jaringan rigasi pemecahan rawan/rigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara/rehabilitasi	Km		11	12	12	12	12	49		175.200	170.300	174.300	170.300	670.100
1 Panjang konstruksi jaringan rigasi pemecahan rawan/rigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara/rehabilitasi	Km		11	12	12	12	12	49						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET				MISALAH (AUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
6. Berdang rigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan keseluruhnya	Berdang		34	2	6	3	3	28		267.589	454.180	633.968	287.501	5.733.754
1. Jumlah konstruksi berdang rigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan	Berdang		32	3	6	3	3	33						
7. Tanah untuk konstruksi berdang dan rigasi pemukiman kewenangan Daerah yang dilaksanakan	Hektar		-	7.222	7.280	6.408	5.788	26.619		568.000,00	546.900,00	580.000,00	569.000,00	2.880.000,00
1. Luas tanah yang dibebaskan	Hektar		-	7.222	7.280	6.408	5.788	26.619						
8. Jaringan rigasi pemukiman kewenangan Daerah yang dilaksanakan keseluruhnya*	Km		-	3.578,74	3.890,00	3.251,73	2.955,26	13.423,04		(506.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)	-2.000.000,00
1. Panjang jaringan rigasi pemukiman kewenangan Daerah yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		-	3.578,74	3.890,00	3.251,73	2.955,26	13.423,04						
9. Berdang rigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan keseluruhnya*	Berdang		-	12	9	14	8	44		248.000	180.000	280.000	180.000	890.000
1. Jumlah konstruksi berdang rigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan	Berdang		-	12	9	14	8	44						
10. Jaringan rigasi rawa yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		267,48	382,91	559,26	498,33	844,16	2.362,14	516.400,71	764.024	1.136.170	880.963	3.890.963	
1. Panjang jaringan rigasi rawa yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		267,48	382,91	559,26	498,33	844,16	2.362,14						
11. Jaringan rigasi tambak yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		82,96	34,12	34,80	34,08	4,00	159,28	121.104,40	48.180	45.288	43.913	86.500	287.504
1. Panjang jaringan rigasi tambak yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		82,96	34,12	34,80	34,08	4,00	159,28						
12. Jaringan rigasi pemukiman kewenangan Pusat yang dilaksanakan keseluruhnya*	Km		6.902,53	3.899,70	3.723,40	3.477,29	2.901,85	20.783,77	3.397.800,00	1.600.131	1.750.288	1.488.054	1.375.517	8.753.235
1. Panjang konstruksi jaringan pemukiman kewenangan Pusat yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		6.902,53	3.899,70	3.723,40	3.477,29	2.901,85	20.783,77						
13. Berdang rigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan keseluruhnya*	Berdang		4	11	8	6	7	36		37.080	18.000	60.000	54.000	75.000
1. Jumlah konstruksi berdang rigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan keseluruhnya	Berdang		4	11	8	6	7	36						
14. Jaringan rigasi pemukiman kewenangan Daerah yang dilaksanakan keseluruhnya*	Km		-	6.483,38	6.817,36	6.358,30	4.164,96	21.224,00		1.178.725	3.489.682	3.489.682	1.427.800	3.885.907
1. Panjang konstruksi jaringan pemukiman kewenangan Daerah yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		-	6.483,38	6.817,36	6.358,30	4.164,96	21.224,00						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET				MISALAH (AUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
15. Berdang rigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan keseluruhnya*	Berdang		-	11	9	1	8	36		32.000	18.000	12.000	16.000	82.000
1. Jumlah konstruksi berdang rigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan keseluruhnya	Berdang		-	11	9	1	8	36						
16. Jaringan rigasi rawa yang dilaksanakan keseluruhnya*	Km		1.000,81	2.825,99	1.716,36	1.388,39	1.348,40	8.089,35	880.917,21	3.428.383	2.882.810	2.417.348	1.889.894	13.245.163
1. Panjang konstruksi jaringan rawa yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		1.000,81	2.825,99	1.716,36	1.388,39	1.348,40	8.089,35						
17. Jaringan rigasi tambak yang dilaksanakan keseluruhnya*	Km		285,75	154,75	145,52	132,38	189,41	837,19	281.820,98	213.681	189.541	188.504	184.766	844.517
1. Panjang konstruksi jaringan tambak yang dilaksanakan keseluruhnya	Km		285,75	154,75	145,52	132,38	189,41	837,19						
18. Layanan pakekteran	Bulan		12	12	12	12	12	12	87.800	62.733	185.200	110.200	127.420	571.223
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12						
KEGATIFAN 06: PENYEDIAAN DAN PENGELOMPOKAN AIR TAWAR DAN AIR BAKU														
UNIT ORGANISASI : DWS/BIWIS														
SASARAN KINERJA														
1. Layanan teknis sarana prasarana penyediaan air bersih dan air baku	Penda masyarakat dan swasta		-	13	10	10	10	40	2.334.464	5.905.345,88	5.988.885,34	3.788.805,70	5.527.347,38	25.575.800,06
1. Jumlah Penda masyarakat dan swasta yang diberi pelayanan teknis penyediaan air bersih dan air baku	Penda masyarakat dan swasta		-	13	10	10	10	40						
2. Tanah untuk konstruksi sarana prasarana penyediaan air bersih dan air baku yang dibebaskan	Hektar		6	11	11	11	11	50		200.000	280.000	280.000	280.000	890.000
1. Luas tanah yang dibebaskan	Hektar		6	11	11	11	11	50						
3. Pencara teknis dan Jabatan Inspeksi sarana prasarana penyediaan air bersih dan air baku	Dokumen		30	30	30	30	30	120		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
1. Jumlah rencana teknis dan dokumen Inspeksi sarana prasarana penyediaan air bersih dan air baku yang disampaikan dan ditandatangani	Dokumen		30	30	30	30	30	120						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISERAN (JUVA)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
4 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun/direhabilitasi	Titik		5	5	5	5	5	25		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
1 Jumlah kontraktor sumur air tanah untuk air baku yang dilaksanakan	Titik		5	5	5	5	5	25						
5 Embung untuk air baku yang dibangun/direhabilitasi	Buah		60	30	30	30	30	90		200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
1 Jumlah kontraktor embung untuk air baku yang dilaksanakan	Buah		18	20	20	20	20	80						
6 Saluran pembawa yang dibangun/direhabilitasi	Km		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		4.108.273	4.172.236	4.479.050	3.993.020	16.752.579
1 Panjang konstruksi saluran pembawa yang dilaksanakan	Km		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000						
7 Intake air baku yang dibangun/direhabilitasi	Buah		100	100	100	100	100	500		200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
1 Jumlah kontraktor intake air baku yang dilaksanakan	Buah		100	100	100	100	100	500						
8 Sumur JET yang dibangun/direhabilitasi	Titik		100	100	100	100	100	500		87.000	87.000	87.000	87.000	380.000
1 Jumlah kontraktor sumur JET yang dilaksanakan	Titik		5	5	5	5	5	25						
2 Jumlah instalasi CP sumur JET	Dokumen		100	100	100	100	100	500						
3 Jumlah instalasi CP sumur JET	Dokumen		5	5	5	5	5	25						
9 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun	Km		320,50	494,50	493,83	348,20	214,20	1.369,23		293.836,24	-	-	-	293.836,24
1 Panjang konstruksi jaringan Irigasi Air Tanah yang dilaksanakan	Km		320,50	494,50	493,83	348,20	214,20	1.369,23						
10 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	Titik		-	15,3	15,0	15,0	15,0	60,0		3.300	3.300	3.300	3.300	12.900
1 Jumlah kontraktor sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	Titik		-	15	15	15	15	60,0						
11 Embung untuk air baku yang direhabilitasi	Buah		6	5	5	5	5	26		7.000	7.000	7.000	7.000	30.000
1 Jumlah kontraktor embung untuk air baku yang direhabilitasi	Buah		6	5	5	5	5	26						
12 Saluran pembawa yang direhabilitasi	Km		1.016,43	146,67	246,46	452,59	1.425,40	3.387,47		402.896	148.585	171.080	20.719	56.930
1 Panjang konstruksi saluran pembawa yang direhabilitasi	Km		1.016,43	146,67	246,46	452,59	1.425,40	3.387,47						
13 Intake air baku yang direhabilitasi	Buah		278	20	31	84	210	523		40.100	62.100	120.000	420.000	642.200
1 Jumlah kontraktor intake air baku yang direhabilitasi	Buah		278	20	31	84	210	523						
14 Kanal direhabilitasi	Titik		300	320	300	280	280	1.480		117.273	110.000	80.000	80.410	407.683
1 Jumlah kontraktor sumur JET yang direhabilitasi	Titik		300	320	300	280	280	1.480						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET					MISERAN (JUVA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
15 Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi	Km		0,050	0,084	0,079	0,068	0,062	0,343		577.255,91	50.243	47.540	40.790	37.034	292.744
1 Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi	Km		0,050	0,084	0,079	0,068	0,062	0,343							
16 Layanan pemeliharaan	Bulan		12	12	12	12	12	12		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1 Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							
KEGANTAN 02: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PEKERJAAN GDA															
UNIT OPERASIONAL: PEMERINTAH KABUPATEN KARAS															
1 Layanan teknis: OP sarana prasarana SDA	Pendapatan masyarakat dunia usaha		-	25	25	25	25	25		287.882,81	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	427.882,81
1 Jumlah kontrak pelayanan dunia usaha yang dilaksanakan	Pendapatan masyarakat dunia usaha		-	25	25	25	25	25							
2 Bendungan yang dipertahankan dan dipelihara	Bendungan		08	210	210	229	229	229		1.371.073,25	1.383.641,01	1.600.969,72	1.821.727,07	6.080.209	
1 Jumlah bendungan yang dipertahankan dan dipelihara	Bendungan		204	210	210	229	229	229							
3 Unit pengaliran bendungan yang dipertahankan dan dipelihara	%		-	25	25	25	25	25		27.373,15	75.000,00	75.000,00	75.000,00	298.373,15	
1 Jumlah unit pengaliran bendungan yang dipertahankan dan dipelihara	%		-	25	25	25	25	25							
4 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dipertahankan dan dipelihara	Buah		1.351	1.370	1.404	1.471	1.399	1.369		334.083,05	290.000,00	334.000,00	370.000,00	1.228.083,05	
1 Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dipertahankan dan dipelihara	Buah		1.061	1.370	1.404	1.471	1.399	1.369							
5 Sumur air tanah untuk air baku yang dipertahankan dan dipelihara	Titik		-	3	30	19	20	30		25.100,00	307.200	420.644	488.941	547.905	
1 Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dipertahankan dan dipelihara	Titik		-	3	30	19	20	30							
6 Embung untuk air baku yang dipertahankan dan dipelihara	Buah		-	10,00	50,00	50,00	70,00	70,00		25.100,00	307.200	420.644	488.941	547.905	
1 Jumlah embung untuk air baku yang dipertahankan dan dipelihara	Buah		-	10,00	50,00	50,00	70,00	70,00							
7 Unit air baku yang dipertahankan dan dipelihara	Buah		-	100	200	300	400	400		25.100,00	307.200	420.644	488.941	547.905	
1 Jumlah intake air baku yang dipertahankan dan dipelihara	Buah		-	100	200	300	400	400							
2 Panjang saluran pembawa air baku yang dipertahankan dan dipelihara	Km		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET				MISERAN (AUTA)								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
8. Tangkai yang dipelihara	Km		3.736,34	2.270,50	3.736,34	3.279,59	3.746,34	3.746,59	277.487,74	462.346,80	541.790,00	643.900,00	749.390,00	2.751.907,74	
1. Panjang jalan yang dipelihara	Km		2.732,31	2.270,50	2.732,31	2.279,59	2.742,51	2.742,51							
9. Kanal banjir yang dipelihara dan dipelihara	Km		0	0	0	0	0	0			12.800,00	12.300,00	8.800,00	32.800,00	
1. Panjang konstruksi kanal banjir yang dipelihara dan dipelihara	Km			0	0	0	0	0							
10. Saluran pompa banjir yang dipelihara dan dipelihara	Unit		1	1	4	0	0	0			560,00	2.000,00	3.300,00	4.800,00	9.500,00
1. Jumlah konstruksi instalasi pompa yang dipelihara	Unit		1	1	4	0	0	0							
11. Pekerjaan pemeliharaan yang dipelihara dan dipelihara	Substansi		-	-	3	4	0	4			1.500,00	3.300,00	4.500,00	9.900,00	
1. Jumlah pemeliharaan pemeliharaan saluran yang dipelihara dan dipelihara	Duak			0,00	2	4	0	0							
12. Pengontrolan lahan pemukiman yang dipelihara	Buah		797	327	500	445	508	508	32.380,00	65.480,00	75.430,00	88.300,00	131.980,00	394.000,00	
1. Jumlah pemeliharaan lahan pemukiman yang dipelihara	Buah		267	327	330	445	508	508							
13. Bangunan pemukiman padat yang dipelihara	Km		136,66	136,42	136,22	142,26	146,00	146,00	63.845,14	68.210,00	68.410,00	71.170,00	72.600,00	342.410,14	
1. Panjang pemukiman pemukiman padat yang dipelihara	Km		135,55	135,42	135,22	142,35	145,00	145,00							
14. Papan Peringatan & Warning System (PPWS) yang dipelihara dan dipelihara	Buah		-	-	90	30	30	30		3.770,000	3.000,000	2.000,000	2.000,000	11.770,000	
1. Jumlah PPWS yang dipelihara dan dipelihara	Duak		-	-	90	30	30	30							
15. Bangunan pemeliharaan sistem (check dam) yang dipelihara dan dipelihara	Km		-	100	120	140	160	160	0,00	20.000,00	24.000,00	26.000,00	32.000,00	104.000,00	
1. Jumlah bangunan pemeliharaan sistem (check dam) yang dipelihara dan dipelihara	Km		-	100	120	140	160	160							
16. Sungai yang dipelihara	Sungai		0	13	26	20	26	26		417.960,00	455.430,00	554.700,00	637.300,00	2.145.300,00	
1. Jumlah sungai yang dipelihara	Sungai			13	26	20	26	26							
17. Danau yang dipelihara	Danau		0	2	7	18	16	18		560,00	2.130,00	3.300,00	3.600,00	9.700,00	
1. Jumlah danau yang dipelihara	Danau		0	2	7	18	16	18							
18. Kawasan rawa yang dipelihara	Kawasan		0	0	0	16	25	25			4.000,00	8.300,00	12.500,00	24.500,00	
1. Jumlah kawasan rawa yang dipelihara	Kawasan		0	0	0	16	25	25							
19. Mata air yang dipelihara	Mata air		0	0	0	10	10	10			500,00	1.300,00	1.500,00	3.800,00	
1. Jumlah mata air yang dipelihara	Mata air		0	0	0	10	10	10							

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET				MISERAN (AUTA)								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
20. Jaringan irigasi pemeliharaan kawasan Puncak yang dipelihara dan dipelihara	Km								547.916						547.916,00
1. Panjang jaringan irigasi pemeliharaan kawasan Puncak yang dipelihara dan dipelihara	Km														
21. Jaringan irigasi kawasan Puncak yang dipelihara dan dipelihara	Berbagai		0	24	3	4	3	21		4.390	580	1.200	600	7.000,00	
1. Jumlah jaringan irigasi kawasan Puncak yang dipelihara dan dipelihara	Berbagai			24	2	9	2	24							
22. Jaringan irigasi rawa yang dipelihara dan dipelihara	Km		7.634	7.439	7.813	8.381	8.972	8.972	239.814					239.814,00	
1. Panjang jaringan irigasi rawa yang dipelihara dan dipelihara	Km		7.634	7.439	7.813	8.381	8.972	8.972							
23. Jaringan irigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara	Km		299	565	793	855	886	886	37.670					37.670,00	
1. Panjang jaringan irigasi tambak yang dipelihara dan dipelihara	Km		299	565	793	855	886	886							
24. Saluran JRT yang dipelihara dan dipelihara	Tek		0	106	276	444	504	568	85.917	16.688	27.088	54.400	56.800	300.617,16	
1. Jumlah saluran JRT yang dipelihara dan dipelihara	Tek			100	270	444	504	568							
25. Jaringan irigasi alternatif yang dipelihara dan dipelihara	Km		0,00	3083,20	4487,70	4877,83	5325,33	5325,33						8,08	
1. Panjang jaringan irigasi alternatif yang dipelihara dan dipelihara	Km			3083,20	4487,70	4877,83	5325,33	5.325,33							
26. Unit pengelola irigasi yang dipelihara	Km		0	23	23	23	23	23		77.000	83.000	35.300	85.800	327.000,00	
1. Jumlah unit pengelola irigasi yang dipelihara	Km			23	23	23	23	23							
27. Peta kawasan rawan bencana yang dipelihara	WS		0	16	16	16	16	16		158.000	183.000	190.300	168.000	600.000,00	
1. Jumlah WS yang memiliki peta kawasan rawan bencana	WS			16	16	16	16	16							
28. Perawatan dan perbaikan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan RMA	WS			20	24	26	25	28		32.000	32.000	32.300	38.000	120.000,00	
1. Jumlah pemeliharaan yang dipelihara dan dipelihara	WS			16	16	16	16	16							
2. Jumlah bangunan pemeliharaan yang dipelihara dan dipelihara	WS			10	10	10	10	10							
29. Kegiatan-Respon Nasional Pemulihan Penyelamatan Air yang dilaksanakan	Kegiatan			40	40	41	41	41		28.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	117.000,00	
1. Jumlah kegiatan Respon Nasional Penyelamatan Air yang dilaksanakan	Kegiatan			40	40	41	41	41							
30. Layanan pemeliharaan	Bulan		12	12	12	12	12	12		60.000	70.000	80.000	90.000	300.000,00	
1. Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	12	12							

SARAFAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LEKAS	TARGET								MISSTRAN (JUZA)													
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL										
NEGATIF: PENINGKATAN TATA HECLA PENGELAIAN SDA TERPADU																								
UNIT ORGANISAS : BWS/BWS																								
SABARAN KEDIRIAN													1.380.755,79	1.150.281,21	1.272.546,21	1.320.017,71	1.380.861,36	6.504.462,28						
1	Layanan listrik desa kelola pengelolaan SDA terpadu	Penda reayorabot data kelola	-	11	30	18	30	30	30	30	30	665.815,60	914.721,21	971.871,21	950.385,21	822.575,61	4.585.868,25							
	1	Jumlah Pemeliharaan/kegiatan usaha yang diidentifikasi/teknis	-	11	30	15	10	10	10	10	-0													
2	Komunikasi dan layman publik yang diidentifikasi	%	-	23	20	28	20	20	20	20	20	43.682,60	47.645,75	52.480,13	57.071,44	391.013,31								
	1	Pemeliharaan pemeliharaan penyediaan informasi dan layanan publik	-	23	20	25	20	20	20	20	20													
3	Rolles data dan informasi SDA yang diidentifikasi	%	-	28	20	28	20	20	20	20	20	175.673,83	142.891,26	157.224,38	171.214,91	855.098,94								
	1	Pemeliharaan pemeliharaan penyediaan informasi SDA	-	28	20	25	20	20	20	20	20													
4	Rencana pengelolaan SDA WIS kawasan PISAL yang diidentifikasi	Dokumen	54	15	7	7	7	7	7	7	50	48.000,00	48.900,00	48.000,00	163.800,00	280.930,00								
	1	Jumlah rencana pengelolaan SDA WIS kawasan PISAL	Dokumen	10	15	-	-	-	-	-	20													
	2	Jumlah rencana teknis pengelolaan SDA WIS	Dokumen	4	3	7	7	7	7	7	30													
5	Data hidrologi dan kualitas air yang diidentifikasi	%	-	28	20	28	20	20	20	20	20	80.000,00	58.900,00	55.800,00	53.800,00	227.500,00								
	1	Pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan data hidrologi dan kualitas air	%	-	28	20	20	20	20	20	20													
6	Pakemondasi leleka yang diidentifikasi	%	-	23	20	28	20	20	20	20	20	30.000,00	28.900,00	20.000,00	33.000,00	80.900,00								
	1	Pemeliharaan layanan informasi leleka yang diidentifikasi	%	-	23	20	25	20	20	20	20													
7	Kemampuan pengelolaan SDA yang diidentifikasi	%	-	23	20	28	20	20	20	20	20	20.000,00	20.900,00	20.000,00	20.000,00	80.900,00								
	1	Pemeliharaan pemeliharaan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan SDA	%	-	23	20	25	20	20	20	20													
8	Layanan perikanan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	304.940	20.000	22.000	24.000	20.000	487.768							
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12													

Keterangan:
 1) - Menyangkut kemampuan Desa yang penilaiannya dilakukan melalui realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
 2) - Menyangkut tugas tambahan dan Monev PUPR, belum dilakukan pada pagu Rencana Rp 314 T
 3) Untuk kegiatan pertanian dengan target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 yang diidentifikasi Monev SDA dengan Rp 316,96 Triliun. Sedangkan Monev No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, target yang ditetapkan sama, namun skema pendanaan lain menjadi Rp 208,58 Triliun (total Rp 107,68 Triliun).
 Apabila dilihat pencairan secara umum pencairan pada RPJMN 2015-2019, maka beberapa target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, atau terlambat, akibat dari keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, dan realokasi anggaran yang terjadi.
 4) Terdapat perbedaan struktur kegiatan, sasaran kegiatan (output dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan struktur yang ada pada RPJMN 2015-2019, dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kaidah Anggaran dan Informasi Kinerja (ADIK).
 Beberapa output pada RPJMN 2015-2019 merupakan outcome (contoh: output jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan header-outcome, sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan ke-output).
 Namun demikian, target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru.

TABEL 9b-3.3. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan II

TUJUAN II: Menerenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpakaian konektivitas daratan dan maritim

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUMLAH)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SASARAN STRATEGIS														
1	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing													
(1)	Tingkat Konektivitas Jalan Nasional	%	73	74	75	76	77	77						
2	Meningkatnya kemandapan jalan nasional													
(1)	Tingkat kemandapan jalan nasional	%	80	81	84	87	88	88						
SASARAN PROGRAM														
1	Mensukseskan waktu tempuh pada koridor utama													
1	Maka: Tempah Pada Koridor Utama	Jam/100 Km	2,7	2,9	2,5	2,4	2,2	2,2						
2	Meningkatnya pelayanan jalan nasional													
1	Tingkat pengansar jalan nasional	miljar/ kendaraan km	101	106	122	127	133	133						
3	Meningkatnya fasilitas terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan													
1	Tingkat fasilitas terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan	%	0	25	90	75	100	100						

KEGIATAN 1: PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI: BALAI PELAKSANA JALAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUMLAH)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SASARAN KEGIATAN														
1	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Dokumen	81	61	81	81	61	369	68.716.328	68.824.348	43.837.789	48.625.934	38.790.149	247.813.670
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan	Dokumen	19	18	19	19	18	85	4.295.088	4.133.905	4.120.080	4.123.000	4.120.000	20.748.989
2	Jumlah Dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan jembatan	Dokumen	25	25	25	25	25	125						
3	Jumlah dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan	Dokumen	17	17	17	17	17	85						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						
1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						
3	Perencanaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional	KM M	33.260 306.589	47.586 453.228	47.780 404.189	47.812 454.882	47.718 456.073	53.390 495.884	48.250.288	58.734.348	39.937.289	44.565.314	34.870.144	221.267.989
1	Panjang jalan yang terlihat	KM	33.244	46.804	48.746	46.708	46.753	47.017						

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUMLAH)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGANGKASAN														
2	Panjang jembatan yang terbantu	M	348.034	445.875	448.875	445.875	445.875	445.875	445.875					
3	Panjang jalan yang dibangun	KM	2.856	213	271	308	284	3.973						
4	Panjang jembatan yang diperbaiki	M	7.777	3.544	3.044	3.044	3.944	18.965						
5	Panjang jalan yang dibangun	KM	450	415	538	650	556	2.809						
6	Panjang jembatan yang dibangun	M	7.289	4.316	5.241	5.894	7.155	28.889						
7	Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun	KM	39	38	32	31	26	160						
8	Durasi jalan daerah	KM	0	125	125	125	125	500						

KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGANGKASAN

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUMLAH)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SASARAN KEGIATAN														
1	Kejelasan sistem, pelayanan publik dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	Dokumen	12	12	12	12	12	60	884.968	850.930	856.089	858.692	856.008	4.264.889
1	Jumlah laporan kepegawaian dan etika	Dokumen	3	3	3	3	3	15						
2	Jumlah laporan keuangan dan umum	Dokumen	3	3	3	3	3	15						
3	Jumlah Dokumen penyelesaian sengketa prosedur perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemerintah kabupaten/rakun	Dokumen	5	5	5	5	5	25						
4	Jumlah dokumen/Pengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen	3	3	3	3	3	15						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	24	24	24	24	24	120						
1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60						
2	Jumlah laporan layanan publik (RAB P)	Laporan	12	12	12	12	12	60						
3	Penanggulangan bencana alam	Paket Bantuan	33	33	33	33	33	165						
1	Jumlah bantuan tanggap darurat/kabupaten/ provinsi yang ditalurkan	Paket Bantuan	33	33	33	33	33	165						

KEGIATAN 3: PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUMLAH)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SASARAN KEGIATAN														
1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan dan evaluasi kinerja	Dokumen	9	9	9	9	9	45	120.228	180.936	190.089	188.692	190.008	528.228
1	Jumlah Dokumen kelayakan Perencanaan dan Sistem Jaringan	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
2	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5						
3	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
4	Jumlah Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
5	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2	2	2	10						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARUHT					ANGGARAN LAJUT						
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	12	12	60						
1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	12	12	60						
KEGIATAN 4: PENGATURAN DAN PERBAHIAN PEMBIHUNGAN JALAN															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN															
SASARAN NEGARA										196.272	120.000	120.000	120.000	120.000	676.272
1	Pengaturan, Penilaian Manajemen konstruksi, Teknik geometrik, arketekas, drainase, geoteknik dan manajemen leirng jalan	Dokumen		10	10	10	10	10	50						
1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
2	Jumlah Dokumen Manajemen Konstruksi	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
3	Jumlah Dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
4	Jumlah Dokumen Geoteknik dan Manajemen Lirng	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
5	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	12	12	60						
1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	12	12	60						
KEGIATAN 5: PENGATURAN DAN PERBAHIAN PRESERVASI JALAN															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT PRESERVASI JALAN															
SASARAN NEGARA										102.000	85.000	85.000	85.000	85.000	442.000
1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekayasa, pemeliharaan jalan	Dokumen		10	10	10	10	10	50						
1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
3	Jumlah Dokumen Teknik Rekayasa	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
4	Jumlah Dokumen Teknik Pemeliharaan	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
5	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	12	12	60						
1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	12	12	60						
KEGIATAN 6: PENGATURAN DAN PERBAHIAN JEMBATAN															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JEMBATAN															
SASARAN NEGARA											85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus	Dokumen		-	10	10	10	10	-40						
1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		-	2	2	2	2	8						

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARUHT					ANGGARAN LAJUT						
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
3	Jumlah Dokumen teknik jembatan	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
4	Jumlah Dokumen teknik terowongan dan jembatan khusus	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
5	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		-	12	12	12	12	-48						
1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		-	12	12	12	12	-48						
KEGIATAN 7: PENGATURAN DAN PERBAHIAN JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH															
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH															
SASARAN NEGARA										4.847.000	8.785.000	7.122.000	4.773.700	3.936.100	20.473.800
1	Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah	Dokumen		-	8	8	8	8	32						
1	Jumlah dokumen manajemen dan evaluasi jalan daerah	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
2	Jumlah dokumen teknik jalan daerah	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
3	Jumlah Dokumen perencanaan jalan metropolitan dan kota besar	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
4	Jumlah Dokumen Perencanaan jalan bebas hambatan	Dokumen		-	2	2	2	2	8						
5	Jumlah Hebat Pembelian Tanah	Ha		-					15.000						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		-	12	12	12	12	-48						
1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		-	12	12	12	12	-48						
KEGIATAN 8: PENGATURAN, PEMBAHIAN DAN PENGAWASAN JALAN TOL															
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGATUR JALAN TOL															
SASARAN NEGARA										85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	425.000
1	Pengaturan, Pengubahan, Pengawasan Jalan Tol	Dokumen		13	13	13	13	13	65						
1	Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Pengoperan Pengawasan Jalan Tol	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
2	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyelapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengawasan Jalan Tol	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
3	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Penilaian Pejalan Pengawasan Jalan Tol	Dokumen		2	2	2	2	2	10						
4	Jumlah Laporan Kelangkaan, Keperawatan, Keuangan, Hukum dan Humas	Dokumen		3	3	3	3	3	15						
5	Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergilir atau Pengadaan Tanah Jalan Tol (SUJ)	Dokumen		1	1	1	1	1	5						

SISWA		SATUAN	LOKASI	TARUHI					ANGGARAN LUTAL							
INDIKATOR KIBERJA	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergilir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen		1	1	1	1	1	5							
1	Jumlah Laporan Pengawasan Dana Hasil Penghasilan Jalan Tol (BLU)	Dokumen		1	1	1	1	1	5							
2	Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (BLU)	Dokumen		1	1	1	1	1	5							

TABEL 5L-2.A. Matriks Program, Kegiatan dan Penguasaan Tujuan II

TUJUAN 4:

Meningkatkan pembanguan bidang pekerjaan umum dan perantara rayak untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"

SASARAN/ INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	LOKASI	TARJET						ANGGARAN (Rp. Jari)														
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL									
SASARAN STRATEGIS																							
1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perantara																							
(1) Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perantara	%		81	84	88	91	95	95															
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman																							
(1) Tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	%		77	83	90	96	100	100															
3. Meningkatnya penyelesaian dan pembiayaan perumahan																							
(1) Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%		84	88	91	96	98	98															
PROGRAM 1 : PEMBINAAN DAN PEMBEBANAN SPINRASTRUKTUR PERUMAHAN																							
SASARAN PROGRAM													15.826.847	24.791.113	38.814.548	16.868.869	31.912.881	128.107.862					
1. Meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan kabupaten di rumah bagi masyarakat																							
1.1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%		10	92	90	94	100	100															
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan kabupaten huteran dan permukiman yang layak																							
1.1 Persentase pemenuhan lahan permukiman rumah pedesaan	%		0	0	4	2	0	0															
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan akses sanitasi bagi masyarakat																							
1.1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%		86	72	80	82	100	100															
KEGIATAN 1.1 : PENGANTARAN, PEMBINAAN, DAN PELAKSANAAN PEMBEBANAN PERUMAHAN																							
UNIT KERJA, SUBKATEGORI PEMBEBANAN KAWASAN PERUMAHAN													6.862.141	19.684.792	19.823.712	16.271.712	8.988.932	66.648.908					
SASARAN KEGIATAN																							
1. Layanan Perumahan																							
1.1 Jumlah satuan layanan pendukung kegiatan perumahan, Pemukiman, Pengawasan, dan Pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman																							
		Bulan Layanan	12	12	12	12	12	68															
		Salam Layanan	12	12	12	12	12	68															
2. Perubahan Pengembangan Kawasan Permukiman																							
		NSPK	2	2	2	2	2	18															
		1. Jumlah NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman yang terakumulasi	2	2	2	2	2	18															
		NSPK	2	2	2	2	2	18															

SASARAN/ INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	LOKASI	TARJET						ANGGARAN (Rp. Jari)											
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL						
3. Perbaikan dan pengembangan kawasan permukiman																				
Kab/Kota																				
1. Jumlah kabupaten yang mendapatkan pembinaan dan pengoperan pengembangan permukiman		Kab/Kota	118	100	169	190	97	587												
4. Perbaikan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan																				
Ha																				
1. Luas peningkatan kualitas permukiman di 50-341 Ha daerah pedesaan		Ha	2679,77958	8180	9508	8100	6851,47	38421,24916												
		Ha	2679,77958	8180	9508	8100	6851,47	38421,24916												
5. Perbaikan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan																				
Ha																				
1. Luas peningkatan kualitas permukiman di 70-304 Ha daerah pedesaan		Ha	47039	7883	7568	7825	7825	78284												
		Ha	47039	7883	7601	7826	7825	78284												
6. Perbaikan dan Pengembangan Kawasan Desa																				
Ha																				
1. Luas peningkatan kualitas permukiman di 3.089 Ha kawasan desa		Ha	268	906	667	833	833	3089												
		Ha	268	906	667	833	833	3089												
7. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat																				
Kekurangan																				
1. Jumlah kecamatan yang mendapatkan peningkatan masyarakat di 7.583 kabupaten		Kabupaten	1477	1483	1833	1839	1479	7683												
		Kabupaten	1477	1483	1833	1839	1479	7683												
8. Fasilitas kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan RPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas																				
Kutubakar dan kawasan																				
1. Jumlah kabupaten dan kawasan permukiman yang mendapatkan fasilitas dalam pemenuhan RPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas		Kutubakar dan kawasan	0	3	3	3	3	18												
		Kutubakar dan kawasan	0	3	3	3	3	18												
9. Perbaikan indikator kota baru																				
Kutubakar																				
1. Jumlah kabupaten yang dilakukan perbaikan kutubakar		Kutubakar	0	2	3	3	2	18												
		Kutubakar	0	2	3	3	2	18												
KEGIATAN 1.1 : PENGANTARAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOMPOKAN GEJUNG, DAN RUMAH NEGARA																				
UNIT KERJA, SUBKATEGORI RIVA PEMANTAUAN BANGUNAN																				
SASARAN KEGIATAN													1.293.814	1.382.023	1.086.117	1.876.128	3.328.887	8.432.878		
1. Perubahan Perawatan Bangunan Lingkungan																				
1.1 Jumlah NSPK Perawatan Perumahan dan Lingkungan																				
		NSPK	10	2	2	2	2	10												
2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung																				
1. Luas penyelenggaraan bangunan gedung																				
		m2	9.328	15.080	20.890	23.743	48.083	124.828												

SASARAN/ INDUKTOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARJET					TOTAL	ANGGARAN (Rp. Jari)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
			4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
KEGIATAN 1.3: PENGATURAN, PERBAIKAN DAN PENGELOMPOKAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOMPOKAN PENGELOMPOKAN INFRASTRUKTUR SAMA-DAI DAN PERKAMPARAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN								3.815.000	5.465.000	6.995.000	9.217.800	16.371.800	35.045.000	
SASARAN KEGIATAN														
1 Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpadu Skala Kota, Kawasan dan Komunitas														
1	Jumlah KAWASAN yang dibangun di Kabupaten dan Kota/Kabupaten	KAWASANA	7	7	30	30	11	11						
2	Jumlah KAWASAN yang dibangun di Kabupaten dan Kota/Kabupaten	KAWASANA	30	30	120	120	40	40						
3	Jumlah KAWASAN yang dibangun di Kabupaten dan Kota/Kabupaten	KAWASANA	40	40	150	150	50	50						
2 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
1	Jumlah KAWASAN yang dibangun di Kabupaten/Kota/Kabupaten	KAWASANA	32	32	127	127	46	46						
3 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah														
1	Jumlah KAWASAN yang dibangun di Kabupaten/Kota/Kabupaten	KAWASANA	86	86	323	323	117	117						
4 Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu														
1	Jumlah KAWASAN yang dibangun di Kabupaten/Kota/Kabupaten	KAWASANA	102	110	426	426	156	156						
5 Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah														
1	Jumlah KAWASAN yang dibangun di Kabupaten/Kota/Kabupaten	KAWASANA	3	6	18	18	11	11						
6 Infrastruktur Drainase														
1	Jumlah Drainase Terpadu	Ha	800 Ha	800 Ha	1.000 Ha	1.800 Ha	1.800 Ha	1.800 Ha						
7 Pembiayaan, fasilitas, pengurusan dan kampanye serta edukasi														
1	Jumlah KAWASAN yang dibelanjakan pembiayaan, fasilitas, pengurusan dan kampanye serta edukasi pelaksanaan RUPF	KAWASANA	307	307	1.021	1.021	374	374						

SASARAN/ INDUKTOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARJET					TOTAL	ANGGARAN (Rp. Jari)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
			4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
KEGIATAN 1.4: PENGATURAN, PERBAIKAN, PENGELOMPOKAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOMPOKAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								5.195.000	6.168.870	8.826.640	7.542.170	8.866.410	33.895.090	
SASARAN KEGIATAN														
1 Peningkatan Infrastruktur SPAM Regional														
1	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Regional	LN	700	700	365	780	1.850	3.200						
		SR	70.000	70.000	36.500	78.000	185.000	320.000						
2 Peningkatan Infrastruktur SPAM Perkotaan														
1	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM IKK	LN	2.100	2.100	1.168	1.380	1.800	18.200						
		SR	210.000	210.000	116.800	138.000	180.000	1.820.000						
2	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Ibu Kota Provinsi/Kabupaten	LN	-	645	480	640	610	2.970						
		SR	-	64.500	48.000	64.000	61.000	297.000						
3 Peningkatan Infrastruktur SPAM Perdesaan														
1	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat	LN	1.270	1.274	1.034	1.580	1.598	7.274						
		SR	436.360	407.600	451.528	583.140	511.300	2.327.968						
4 Peningkatan Infrastruktur SPAM di Kawasan Perkotaan														
1	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM di Kawasan Kamah Perkotaan	LN	180	108	160	140	110	770						
		SR	18.000	10.800	16.000	14.000	11.000	77.000						
2	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM di Kawasan Nelayan	LN	88	85	43	43	32	218						
		SR	8.760	8.500	4.260	4.080	3.250	23.760						
3	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM di Kawasan Rawan Asupan/Perikanan/Perikanan Terpadu	LN	94	98	111	89	132	482						
		SR	26.880	30.720	34.620	21.080	32.640	107.640						
5 Fasilitas SPAM PDAM														
1	Jumlah PDAM yang dibelanjakan	KAWASANA	122	122	188	87	47	574						
2	Jumlah KAWASAN SPAM BPP yang dibelanjakan	KAWASANA	348	5.548	5.148	5.140	5.140	522						
3	Jumlah KAWASAN SPAM BPP yang dibelanjakan	KAWASANA	122	122	188	87	47	574						
4	Jumlah KAWASAN SPAM BPP yang dibelanjakan	KAWASANA	348	5.548	5.148	5.140	5.140	522						
6 Fasilitas SPAM Non-PDAM														
1	Jumlah LPTD yang dibelanjakan	KAWASANA	8	88	48	68	38	1.618						
2	Jumlah KAWASAN SPAM BPP yang dibelanjakan	KAWASANA	38	38	38	38	38	1.400						
7 Pengaturan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pengembangan Air Minum														
1	Jumlah penyediaan pengaturan, pembiayaan, dan pengawasan pengembangan air minum di Kabupaten/Kota/Kabupaten	KAWASANA	-	907	567	507	507	507						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARJET					ANGGARAN (Rp. ARI)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KEGIATAN 1.5: SUDUNGAN HANJALIMEN BIDANG PERMUKHAAN														
UNIT KERJA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA														
SASARAN KEGIATAN														
1. Peningkatan administrasi pekerjaan	Bulan		12	12	12	12	12	80	274.800	325.481	338.738	324.851	337.716	1.602.616
1.1. Jumlah laporan pemantauan	Bulan		12	12	12	12	12	80						
2. Peningkatan kepegawaian dan etika, keagamaan, pelayanan dan SIMAK-BHM, dan lainnya	Laporan Dokumen Bulan		10 11 12	10 11 12	10 11 12	10 11 12	10 11 12	395	68.169	80.044	88.292	73.404	76.407	256.408
1. Jumlah laporan kepegawaian dan etika	Laporan		23	23	23	23	23	110						
2. Jumlah laporan keagamaan dan etika	Laporan		15	15	15	15	15	75						
3. Jumlah dokumen SIMAK-BHM dan etika	Dokumen		11	11	11	11	11	55						
4. Jumlah Laporan penyusunan rencana penataan perundang-undangan, pembinaan Tataku dan per betas bantuan hukum	Laporan		25	21	21	21	21	100						
3. Jumlah laporan PMSD	Bulan		12	12	12	12	12	60						
3. Peningkatan Habitat	Laporan		3	3	3	3	3	15	3.760	4.459	4.939	5.100	5.550	23.658
4. Penyediaan sarana dan prasarana	Paket Bulan		9 12	9 12	9 12	9 12	9 12	58	8.800	15.189	18.000	20.700	23.300	86.169
5. Bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak	Paket Bantuan		20	20	20	20	20	100	75.565	120.000	120.000	104.791	194.791	545.327
6. Membangun Tabung Pelung Cipta Karya	Anggaran		80	80	80	80	80	400	17.700	55.145	55.145	55.145	55.145	278.240
KEGIATAN 1.6: PENYUSUNAN SUDUNGAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEGIATAN LUAR NEGARA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BUDIDYA PERMUKHAAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT KETERANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKHAAN														
SASARAN KEGIATAN														
1. Peningkatan administrasi pekerjaan	Bulan		12	12	12	12	12	68	273.778	339.971	185.001	361.261	377.581	1.538.671
1.1. Jumlah pengelolaan administrasi	Bulan		12	12	12	12	12	68	46.716	48.585	47.935	48.315	50.845	245.446
2. Kebijakan dan strategi Bidang perumihan	Dokumen		6	6	6	6	6	30	13.800	15.739	16.540	17.308	18.130	78.896
1. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang perumihan jangka panjang dan jangka menengah	Dokumen		0	0	0	0	0	0						
3. Program dan anggaran Bidang perumihan	Laporan		7	7	7	7	7	35	82.938	88.333	79.885	73.731	78.475	372.248
4. Administrasi penyelenggaraan pameran, booth, dan kerja sama internasional	Laporan		8	8	8	8	8	48	11.800	15.739	16.540	17.308	18.130	78.896
1. Jumlah laporan kerja sama dan persiapan administrasi pameran tingkat luar negeri	Laporan		2	2	2	2	2	18						
2. Jumlah dokumen persiapan administrasi pameran, booth, dan kerjasama internasional	Laporan		3	3	3	3	3	15						
3. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pameran, booth, dan kerjasama internasional	Laporan		3	3	3	3	3	15						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARJET					ANGGARAN (Rp. ARI)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KEGIATAN 1.7: SUDUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SANGAT DAN PERSIMPANAN														
UNIT KERJA: BADAN PENYULUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
SASARAN KEGIATAN														
5. Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang perumihan	Laporan		9	9	9	9	9	45	11.810	15.489	16.269	17.078	17.630	78.608
1. Jumlah laporan evaluasi dampak dan manfaat serta kebijakan Bidang perumihan	Laporan		5	5	5	5	5	25						
2. Jumlah dokumen penataan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program Bidang perumihan	Laporan		4	4	4	4	4	20						
6. Peningkatan data dan informasi serta komunikasi publik Bidang perumihan	Laporan		7	7	7	7	7	35	13.500	16.000	17.540	18.518	19.430	85.518
7. Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Bidang Perumihan	Laporan		64	64	64	64	64	320	37.875	102.250	-	107.308	170.250	594.326
KEGIATAN 1.7: SUDUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SANGAT DAN PERSIMPANAN														
UNIT KERJA: BADAN PENYULUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
SASARAN PROGRAM														
1. Meningkatkan cakupan tempat tinggal (kubah) dan memenuhinya rumah tidak layak huni									7.788.020	8.780.390	52.731.873	55.419.349	58.973.568	184.692.890
1. Persentase pemenuhan cakupan tempat tinggal (kubah) berdasarkan penduduk miskin	%		0,83	2,01	2,76	2,93	2,98	11,18						
2. Persentase persentase rumah tidak layak huni	%		1,47	3,04	10,29	14,80	16,71	46,12						
KEGIATAN 2.1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERUMAHAN														
SASARAN KEGIATAN														
1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perumahan	Laporan		76	77	76	77	78	386	230.141	226.830	191.271	169.874	263.861	1.632.977
1.1. Jumlah Laporan Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Organisasi	Laporan	Pusat	8	8	8	8	8	25						
2. Jumlah Laporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Manajemen Kepegawaian	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	10						
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Laporan	Pusat	4	4	4	4	4	20						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Rp. Jari)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
4. Jumlah Laporan Pembinaan dan Fasilitas yang analisis dan diratifikasi pelaksana perundang-undangan bidang Perumahan	Laporan	Pusat	4	5	6	7	8	9	19	11	12	12	14	15
5. Jumlah Laporan Penyelidik Perlebangan/Opot hakum dan Perdas pringun bulak	Laporan	Pusat	4	4	4	4	4	20						
6. Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Kawasan	Laporan	Pusat	4	4	4	4	4	20						
7. Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
8. Jumlah Laporan Penyelidik Administrasi, Uraun dan Pengalasan Dllh, Laporan Pelayanan Perlebangan dan Perlebangan	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
9. Jumlah Laporan penyelenggaraan pengalasan barang milik/karyawun negara di lingkungan dlm perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
10. Jumlah Laporan Pengelolaan Ksp dan Tata Perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
11. Jumlah Laporan Tata Uraun Perumahan	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5						
12. Jumlah Laporan Laporan Kebutuhan, Publikasi dan Dokumentasi	Laporan	Pusat	4	4	4	4	4	20						
13. Jumlah Laporan Fasilitas Perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
14. Jumlah Laporan Tanggop Darurat Bencana Bidang Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5						
15. Perangal Pengalun Data dan Kemitraun	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5						
16. Peralasan dan Fasilitas Perumahan	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5						
17. Kemitraun Berwujud	Laporan	Pusat	4	4	4	4	4	20						
18. Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	Pusat	12	12	12	12	12	60						
19. Laporan Laporan Perencanaan	Laporan	Pusat	12	12	12	12	12	60						
REKORDAN 2.2 : PERUSAHAAN PERUMAHAN PENYEDIAAN PERUMAHAN														
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERUMAHAN PENYEDIAAN PERUMAHAN									183.007	190.300	134.320	148.800	161.870	718.717
SASARAN KEBERLAJUAN									163.167	155.243	134.320	148.800	151.670	717.742
1. Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan Perumahan	Dokumen Laporan		38	35	34	31	34	172						
	Laporan		29	25	21	21	23	109						
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Penyediaan Perumahan	Dokumen	Pusat	4	4	4	4	4	24						
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Penyediaan Perumahan	Dokumen	Pusat	4	4	4	4	4	20						
3. Jumlah Dokumen RPSPK	Dokumen	Pusat	4	4	4	4	4	20						
4. Laporan Fasilitas Ketersediaan Perencanaan Rumah Susun dan Rumah KONDISI	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Rp. Jari)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
4. Laporan Fasilitas Ketersediaan Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah Uraun dan Kemitraun	Laporan	Pusat	4	5	6	7	8	9	19	11	12	12	14	15
5. Jumlah Laporan Kemitraun Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	10						
7. Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kemitraun/ Mitra Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
8. Jumlah Dokumen Pembinaan dan Kemitraun Evaluasi Penyediaan Perumahan	Dokumen	Pusat	2	1	2	1	3	8						
9. Jumlah Laporan Pembinaan Kegiatan Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	10						
10. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	3	4	4	4	4	21						
11. Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
12. Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informatika	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
13. Jumlah Laporan Pengembangan Informatika Perumahan	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5						
14. Jumlah Dokumen Perencanaan Urungan Harian Duta Besar	Dokumen	Pusat	4	4	4	4	4	20						
15. Jumlah Dokumen Perencanaan Urungan Harian Duta Besar	Dokumen	Pusat	4	4	4	4	4	20						
16. Laporan Laporan Perencanaan	Laporan	Pusat	12	12	12	12	12	60						
REKORDAN 2.3 : PEMBINAAN DAN PENYEDIAAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL														
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL									284.300	276.200	1.837.270	1.494.722	1.762.618	5.665.110
SASARAN KEBERLAJUAN														
1. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Kemitraun	Dokumen Laporan		35	35	35	35	35	175						
	Laporan		12	12	12	12	12	60						
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Teknik, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaksana Rumah Umum dan Kemitraun	Dokumen	Pusat	7	7	7	7	7	35						
2. Jumlah Dokumen Pengalasan dan Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Kemitraun	Dokumen	Pusat	7	7	7	7	7	35						
3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan (Bahan Rumah Umum)	Dokumen	Pusat	8	8	8	8	8	40						
4. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pelaksanaan Harian Berimbang	Dokumen	Pusat	8	8	8	8	8	40						
5. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penyelidikan Tanah	Dokumen	Pusat	7	7	7	7	7	35						
6. Laporan Laporan Pembinaan	Laporan	Pusat	12	12	12	12	12	60						
2. Rumah Umum Tapak Layuh Huni yang Dibebaskan MAAKl Bantuan Rumah Umum (PRU)	Unit Laporan		46.290	42.690	196.890	168.960	224.750	875.580						
	Laporan		12	12	12	12	12	60						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp. ARI)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1. Jumlah Rumah Urus Tegal Layak Huni yang Terlewat Melalui Bantuan Rumah Urus (PSU)	Unit	Tersebar di 34 Provinsi	40.780	42.083	180.000	190.800	224.258	878.924	19	11	12	12	14	13
2. Laporan Laporan Perbaikan	Laporan		12	12	12	12	12	12						
RESDAPTAN 2.4 : PEMBUDIDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA														
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH SWADAYA														
SASARAN KEGIATAN														
1. Ketersediaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pemeliharaan rumah hunian yang layak dan terjangkau bagi BMT dalam lingkungan yang aman, sehat, estetis dan sesuai	Datuman / Laporan		9 19	9 19	10 19	9 19	18 19	42 42	1.155.890	3.278.498	8.348.140	10.813.739	18.715.388	34.356.113
1. Jumlah Datuman Perencanaan Teknik Pengungkapan Perumahan Swadaya	Datuman	Pusat	3	3	4	3	4	17						
2. Jumlah Datuman Pembinaan Perumahan Rumah Swadaya	Datuman	Pusat	3	3	3	3	3	15						
3. Jumlah Datuman Pembinaan (Pembangunan IGD) dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya	Datuman	Pusat	3	3	3	3	3	15						
4. Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengungkapan Perumahan Swadaya	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
5. Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi Pengungkapan Rumah Swadaya	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15						
6. Laporan Laporan Perencanaan	Laporan	Pusat	12	12	12	12	12	12						
2. Pemeliharaan rumah dan peningkatan kualitas rumah swadaya	Ramah / Rumah Tersebar di 34 Provinsi		76.000 12	120.000 12	916.000 12	558.000 12	174.000 12	1.736.000 12						
1. Jumlah Rumah Tersebar yang terlewat melalui Bantuan Swadaya Perumahan Baru Rumah Swadaya	Rumah Tersebar	Tersebar di 34 Provinsi	30.000	22.500	60.000	69.500	78.000	258.000						
2. Jumlah Rumah Tersebar yang terlewat melalui Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rumah Tersebar	Tersebar di 34 Provinsi	50.000	102.500	360.000	498.500	508.000	1.908.000						
3. Laporan Laporan Perencanaan	Laporan		12	12	12	12	12	12						
RESDAPTAN 2.5 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS														
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH KHUSUS														
SASARAN KEGIATAN														
1. Perencanaan, Pembiayaan, dan Penyediaan Rumah Khusus	Datuman / Laporan		40 12	34 12	35 12	36 12	38 12	190 12	1.495.840	1.381.436	2.657.324	3.215.849	3.875.218	12.451.867
1. Jumlah Datuman Perencanaan Rumah Khusus dan Negara	Datuman	Pusat	9	9	9	4	4	19						
2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Kebijakan Pembinaan dan Penyelenggaraan Rumah Khusus	Datuman	Pusat	9	7	8	7	8	36						
3. Jumlah Laporan Pembinaan Pengendalian dan Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Rumah Negara	Datuman	Pusat	2	2	2	2	2	18						
4. Jumlah Datuman Pengawasan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Rumah Negara	Datuman	Pusat	7	6	4	4	4	23						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp. ARI)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
6. Jumlah Datuman Pengawasan Pelaksanaan dan Pengendalian Rumah Negara	Datuman		6	5	6	7	9	33	19	11	12	12	14	13
6. Jumlah Datuman Pelaksanaan Pengendalian Rumah Negara	Datuman	Pusat	6	6	6	6	6	30						
7. Jumlah Laporan Pengawasan Rumah Negara	Datuman	Pusat	2	2	2	2	2	18						
8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Rumah Negara	Datuman	Pusat	2	2	2	2	2	18						
9. Jumlah Datuman Pengawasan Rumah Negara	Datuman	Pusat	6	6	6	6	6	36						
10. Laporan Laporan Perencanaan	Laporan		12	12	12	12	12	12						
2. Rumah khusus di daerah perantara, menengah dan perbatasan yang dilengkapi dengan PSU Pendukung	Unit / Laporan		7.328 12	8.808 12	11.868 12	13.088 12	16.088 12	55.088 12						
1. Jumlah Rumah Khusus Tersebar beserta PSU dan Meubeler	Unit	1. Kawasan Perbatasan Negara 2. Pasca Demora dan Konflik 3. Maritim 4. Daerah Tertinggal	1.320	1.000	10.800	12.888	15.000	50.000						
2. Jumlah Rumah Khusus yang direvitalisasi	Unit	1. Kawasan Perbatasan Negara 2. Pasca Demora dan Konflik 3. Maritim 4. Daerah Tertinggal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000						
3. Laporan Laporan Perencanaan	Laporan		12	12	12	12	12	12						
RESDAPTAN 2.6 : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN														
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH SUSUN														
SASARAN KEGIATAN														
1. Perencanaan, Pembiayaan, Realisasi, dan Penyediaan Rumah Susun	Datuman / Laporan / Rumah Susun		7 12	7 12	7 12	7 12	7 12	29 43	4.831.880	3.891.820	26.792.320	26.981.815	41.628.384	136.887.812
1. Jumlah Datuman Akut Teknik (Penyediaan RUM S) Susun	Datuman	Pusat	2	2	2	2	2	12						
2. Jumlah Datuman Perencanaan Penyelenggaraan Rumah Susun	Datuman	Pusat	1	1	1	1	1	5						
3. Jumlah Datuman Fasilitas Penyelenggaraan Rumah Susun	Datuman	Pusat	2	2	2	2	2	18						
4. Jumlah Laporan Pelaksanaan Berbagai Teknik Penyelenggaraan Rumah Susun	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	18						
5. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Rumah Susun	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	18						
6. Jumlah Datuman Pengawasan dan Penyelenggaraan Rumah Susun	Datuman	Pusat	2	2	2	2	2	18						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERLAJUAN	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp. Jari)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1. Jumlah Laporan Penemuan dan Evaluasi Penyelidikan Kasus Bus	Laporan	Pusat	4	5	6	7	8	9	19	11	12	13	14	15
2. Layanan Perawatan	Bulan	Pusat	12	12	12	12	12	12	60	60	60	60	60	300
3. Raman Sate untuk MBE yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya	Unit Layanan		20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
4. Jumlah satuan Rambu Satuan Terbangin beserta PSU dan Mauter	Unit	Terserai di 24 Provinsi	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
5. Jumlah Laporan Perawatan	Laporan		12	12	12	12	12	12	60	60	60	60	60	300
PROGRAM 2 - PERSIAPAN PEMBAYARAN PERUMAHAN														
SASARAN PROGRAM (Jumlah Anggaran Diisi RA 990.0 dan RA 990.07)									341.017	391.833	393.401	408.367	418.409	1.922.008
1. Meningkatkan jumlah tenaga rakit/pakir bergengsi rumah yang mendapat rumah layak melalui bantuan fasilitas perumahan dan pelayanan perumahan *	%		2,28	3,91	6,36	7,63	2,86	22,80	341.017	391.833	393.401	408.367	418.409	1.922.008
1. Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan perumahan dan pelayanan perumahan untuk rumah layak di lingkungan bergengsi rumah	%		2,28	3,91	6,36	7,63	2,86	22,80						
2. Meningkatkan kemampuan tempat tinggal (berbagai model bantuan perumahan dan pelayanan perumahan (RA 990.0 dan RA 990.07) *)	%		0,04	18,23	17,65	26,45	7,73	61,36	18.355.261	25.558.143	43.769.134	16.826.014	26.426.115	104.932.447
1. Persentase pemenuhan kebutuhan tempat tinggal (berbagai model bantuan perumahan dan pelayanan perumahan	%		0,01	18,23	17,68	20,40	7,73	61,36						
KEGIATAN 3.1 - DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELANGKARAN PEMBAYARAN PERUMAHAN UNIT ORGANISASI - SEKRETARAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBAYARAN PERUMAHAN														
SASARAN KRISANTAN									81.183	81.183	81.183	81.183	81.183	405.916
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembayaran Perumahan	Laporan	Jakarta	25	25	25	25	25	125	81.183	81.183	81.183	81.183	81.183	405.916
1. Jumlah laporan rencana organisasi tata laksana dan reformasi organisasi	Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
2. Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan manajemen bagi pegawai	Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
3. Jumlah laporan keuangan	Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
4. Jumlah laporan anggarannya perbaikan perundang-undangan dan pembinaan	Laporan	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
5. Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan dan pendampingan rumah	Laporan	Jakarta	4	4	4	4	4	20						
6. Jumlah laporan ketahanan dan keproseduran	Laporan	Jakarta	0	0	0	0	0	0						
7. Jumlah dokumen anggaran bidang pembayaran perumahan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
SASARAN INDUKTOR														
1. Dukungan kebijakan dan strategi, analisis matriks, program dan pengembangan standar reformasi pelayanan perumahan	Dokumen	Jakarta	8	8	8	8	8	48	11.631	14.321	16.340	17.799	18.337	78.428
1. Jumlah hasil pelaksanaan dan kegiatan dan strategi bidang pelayanan perumahan	Materi Teoritis Dokumen	Jakarta	3	3	3	3	3	15	3.000	3.346	3.390	3.390	3.390	16.524
2. Jumlah dokumen analisis matriks bidang pelayanan perumahan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
3. Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria badan dan kesediaan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
4. Jumlah dokumen perencanaan bidang pelayanan perumahan	Dokumen	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
5. Jumlah dokumen data pengembangan standar reformasi bidang pelayanan perumahan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
2. Laporan evaluasi kinerja dan layanan perkhidmatan	Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15	1.697	1.781	1.870	1.964	2.064	9.378
1. Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan perumahan	Bulan Laporan	Jakarta	12	12	12	12	12	60						
2. Jumlah laporan perkhidmatan	Bulan Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
3. MOU kerjasama pelayanan perumahan	MOU	Jakarta	29	41	51	65	64	250	1.490	2.300	2.900	3.148	3.275	13.048
1. Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah	MOU	Jakarta	23	38	40	64	78	319						
2. Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pelayanan perumahan	MOU	Jakarta	0	2	2	8	5	14						
KEGIATAN 3.2 - PENGELOMPOKAN POLA PEMBAYARAN PERUMAHAN UNIT ORGANISASI - DIREKTORAT POLA PEMBAYARAN PERUMAHAN														
SASARAN KRISANTAN									8.991	9.831	11.399	12.912	11.349	58.648
1. Matriks, HSPK, rencana dan strategi, pengembangan pola pembayaran rumah, reformasi, rumah layak, rumah sate dan rumah swadaya	Materi Teoritis Kurikulum HSPK	Jakarta	9	18	10	16	11	58	8.991	9.831	11.399	12.912	11.349	58.648
1. Jumlah hasil pelaksanaan dan rencana dan strategi pengembangan pola pembayaran perumahan	Materi Teoritis Dokumen	Jakarta	0	4	4	4	5	20						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp. Jari)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
2. Jumlah nurukan NSPK pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis	Jakarta	4	5	6	7	8	9	19	11	12	12	14	15
	Rumusan NSPK	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
3. Jumlah materi teknis pengesahan pola pembiayaan rumah layak dan ramah lingkungan	Materi Teknis	Jakarta	2	2	2	2	2	18						
4. Jumlah materi teknis pengesahan pola pembiayaan rumah layak	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
5. Jumlah materi teknis pengesahan pola pembiayaan mikro	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
6. Jumlah materi teknis pengesahan pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
2. Rumusan Rapermen pola pembiayaan ritel, kredit, rumah layak dan ramah lingkungan, dan rumah swadaya	Rumusan Rapermen	Jakarta	4	4	4	4	4	28	1.900	2.169	2.569	3.616	4.390	14.708
1. Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah layak dan ramah lingkungan	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
2. Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
3. Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
4. Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
3. Laporan evaluasi kinerja diinternal dan layanan perantara	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5	1.000	1.171	1.242	1.318	1.390	8.227
	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	12	12	68						
1. Jumlah Laporan evaluasi kinerja diinternal	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
2. Jumlah laporan perantara	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	12	12	68						
4. Fasilitas Bantuan Uang Muka untuk Rumah Layak yang menggunakan modal (BA-998.07)	Ramah Tangga	Perwakilan	50.000	100.000	150.000	150.000	50.000	400.000	228.000	478.200	621.200	804.800	380.200	2.268.800
	Ramah Tangga	Terseleksi	50.000	100.000	150.000	150.000	50.000	400.000						
KENDARAAN D.1 - PEMBIYAN SISTEM PEMBIYAN PERUMAHAN									11.265	12.875	15.220	18.278	31.843	79.728
UNIT ORGANISASI - DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIYAN PERUMAHAN									1.195	1.363	1.587	18.278	13.318	68.211
SASARAN KEGIATAN														
1. Layanan perantara, materi teknis dan pedoman pembiayaan serta pelaksanaan diseminasi sistem pembiayaan perumahan	Bulan Layanan		12	12	12	12	12	68						
	Materi Teknis/ Dokumen		4	4	4	4	4	28						
	Laporan		8	8	8	8	8	40						

SASARAN/ INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp. Jari)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1. Jumlah laporan perantara	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	12	12	68						
2. Jumlah materi teknis/dokumen/rencana pelaksanaan pembiayaan sistem pembiayaan perumahan	Materi Teknis/ Dokumen	Jakarta	2	2	2	2	2	18						
3. Jumlah materi teknis/dokumen/pedoman pembiayaan sistem pembiayaan perumahan	Materi Teknis/ Dokumen	Jakarta	2	2	2	2	2	18						
4. Jumlah laporan evaluasi kinerja diinternal	Laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
5. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I	Laporan	Aceh, Sumut, Sumbag, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Babel, Kepri, Lampung, Riau, Jabar, DKI Jakarta, Banten	1	1	1	1	1	8						
6. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II	Laporan	Jorong, Jalm, Yogyakarta, Kaltim, Kalimantan, Kaltim, Kaltim, Bal, NTB, NTT	1	1	1	1	1	8						
7. Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III	Laporan	Sulbar, Sulut, Sulawesi, Gorontalo, Sultra, Maluku, Maluku, Papua, Papua Barat	1	1	1	1	1	8						
2. Layanan teknis pembiayaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah di wilayah	LKB/KB/Prorok/Kab/Kota		26 LKB/KB, 24 Prorok dan 250 Kab/Kota	26 LKB/KB, 26 Prorok dan 250 Kab/Kota	26 LKB/KB, 26 Prorok dan 250 Kab/Kota	26 LKB/KB, 26 Prorok dan 250 Kab/Kota	26 LKB/KB, 26 Prorok dan 250 Kab/Kota	26 LKB/KB, 26 Prorok dan 250 Kab/Kota	4.490	5.040	6.437	7.969	8.844	33.558

SASARAN/ INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp. Jari)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3. Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	Jakarta	4	4	4	4	4	20							
2. Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Laporan		8	8	8	8	8	40	12.630	13.911	15.202	16.802	17.418	75.963	
1. Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengabdian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I	Laporan	SUMATERA	1	1	2	2	2	10							
2. Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengabdian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II	Laporan	JAWA-BALI	2	2	2	2	2	10							
3. Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengabdian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III	Laporan	KALIMANTAN-SULAWESI	2	2	2	2	2	10							
4. Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengabdian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV	Laporan	DIY, DKI, PAPUA, PAPUA BARAT, NTT, NTB	1	1	2	2	2	10							

KEGIATAN 3.1 (RUPM) : Dukungan Peningkatan Bantuan Persebaran Perumahan

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGELOLAAN DANA PENYAWAIAN PERUMAHAN (PDU)

SASARAN KEGIATAN									2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1. Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Penawaran Perumahan (PDU), legal dan lainnya lainnya									25.400	31.164	33.034	35.818	37.117	132.533	
1. Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi	Dokumen	Jakarta	25	25	25	25	25	125							
2. Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Penawaran Perumahan (PDU)	Dokumen	Jakarta	1	1	2	2	2	10							
3. Jumlah dokumen legal dan lainnya lainnya	Dokumen	Jakarta	20	20	20	20	20	100							
2. Layanan keagamaan dan rekonsiliasi LJK									600	638	676	714	752	3.380	
1. Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Penawaran Perumahan (PDU)	LJKM, KSD	Terakhir	26	29	49	66	79	259							
2. Jumlah rekonsiliasi dengan LJK	LJKM, KSD	Jakarta	20	20	20	20	20	100							
3. Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, layanan pemantauan									48.977	43.333	45.938	48.891	51.896	238.035	
Laporan		Jakarta	29	29	29	29	29	145							
Buletin Layanan		Jakarta	12	12	12	12	12	60							
1. Jumlah laporan keuangan	Laporan	Jakarta	8	8	8	8	8	40							

SASARAN/ INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp. Jari)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Jumlah verifikasi permohonan pemukiman dana dari LJK pelaksana	Ruman Tinggal	Jakarta	130.080	225.080	270.080	458.304	170.080	1.253.604						
3. Jumlah laporan pemeliharaan database dan akses ke sistem yang terintegrasi	Laporan	Jakarta	1	1	2	2	2	10						
4. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelayanan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
5. Jumlah laporan pemantauan DDU yang berkualitas	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
6. Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Penawaran Perumahan (PDU)	Laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
7. Jumlah laporan RUM	Laporan	Jakarta	14	14	14	14	14	70						
8. Jumlah laporan administratif pemantauan	Buletin Laporan	Jakarta	12	12	12	12	12	60						
9. Jumlah Perawatan dan fasilitas pemukiman	Unit	Jakarta	30	30	30	30	30	150						
4. Output Cadangan	1 Paket	Terakhir	1	1	1	1	1	5	158.940	127.327	148.081	164.761	164.847	703.956

TABEL 91-2.5. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan V

TUJUAN 5: Meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan pemukiman rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan pemukiman rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUPIAH)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
SASARAN STRATEGIS															
1	Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas														
(1)	Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	72,25	71,5	82,75	88	84,5	94,5							
2	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan publik, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana														
(1)	Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan publik, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana	%	80	85	89,5	84	100	100							
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR														
(1)	Tingkat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR	%	51	54	57	60	63	65							
4	Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas														
(1)	Prosedur sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas	%	10	25	40	55	75	75							
5	Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang PUPR														
(1)	Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR	%	87	88	71	73	75	75							
PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TERUS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAYAT															
SASARAN PROGRAM										197.598	214.478	237.218	263.849	287.231	1.210.342
1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR														
1	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	74	75	78	77	78	79							
2	Opini WTP hasil audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
3	Transparansi pelaksanaan program	Publikasi	55%	65%	75%	85%	100%	100%							

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUPIAH)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai	Layanan	80%	75%	80%	90%	100%	100%							
1	Tingkat fasilitas produk publik dan layanan publik	Fasilitas	85%	88%	82%	90%	100%	100%							
KEGIATAN 1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PENYANTALAN DAN EVALUASI, BERTA PEMBIHAIAN															
LENY ORGANISASIONAL : BIDANG PERENCANAAN DAN KEMAJUAN LUAR NEGERI															
SASARAN KEGIATAN										50.548	88.417	73.289	98.458	187.758	388.487
1	Facilitasi pendanaan infrastruktur daerah	Transparansi pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
1	Melakukan proses pengusutan DAK yang transparan	Transparansi pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Pengelolaan administrasi anggaran										7.282	8.192	11.378	14.322	17.778	58.782
1	Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu	Ketepatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Koordinasi perencanaan program dan administrasi kepegawaian luar negeri										4.468	5.562	6.953	8.681	10.854	36.520
1	Melakukan pengisian program, tugas, kompetensi, dan administrasi kepegawaian luar negeri yang tepat waktu	Transparansi pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Penelitian dan evaluasi pelaksanaan program										13.375	13.950	15.208	15.858	17.890	75.375
1	Studi pelaporan pemanfaatan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini	Kualitas Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu	Nilai	74	75	78	77	78	79							
Pengelolaan administrasi Perkantoran										18.543	26.476	26.948	32.318	44.388	138.767
1	Fasilitas Layanan Administrasi Perkantoran	Dulau	12	12	12	12	12	12							
KEGIATAN 2 : PENGOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATAKSIKANA															
LENY ORGANISASIONAL : BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA															
SASARAN KEGIATAN										45.108	48.871	47.953	58.348	52.871	215.555
1	Pengisian, Penetapan dan Evaluasi Organisasi, Tatakelola dan Fasilitas Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	3	3	3	3	3							
1	Jumlah Dokumen Organisasi, Tatakelola, Perencanaan Pegawai dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	3	0	3	0	3							
Pelaksanaan, Pemantauan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian										19.208	19.571	21.073	22.129	23.243	105.215
1	Jumlah Dokumen Mutasi dan Laporan Kinerja Kepegawaian	Dokumen	1.208	4.590	4.900	4.580	4.580	19.208							

SARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Jumlah Dokumen Pengabdian, Pengembangan, dan Penelitian Regional	Dokumen	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	8.400						
3	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	15							
4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Orang	12	12	12	12	12	60							
3	Pengelolaan administratif Perkantoran	Laporan	2	2	2	2	2	10	19.200	15.400	20.475	21.400	22.575	103.145	
1	Jumlah laporan pengelolaan administratif Perkantoran	Laporan	2	2	2	2	2	10							
REKAPITULASI : PENDEKLOAN DAN PENDEKLOAN KEUMAH KEMENTERIAHAN															
LENY ORGANISASI : BIRU KEUMAH										37.000	35.000	37.000	48.000	45.000	189.000
SASARAN KEGIATAN															
1	Pembinaan Bidang Keuangan	Orang	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	5.600							
1	Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pembinaan	orang	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	5.600							
2	Penatausahaan Pembendaharaan	Laporan	6	6	6	6	6	30							
1	Jumlah laporan penatausahaan pembendaharaan	Laporan	6	6	6	6	6	30							
3	Laporan Keuangan	Laporan	17	15	15	15	15	77							
1	Jumlah Laporan penyelesaian laporan keuangan	Laporan	17	15	15	15	15	77							
4	NSPK Bidang Keuangan	Dokumen	8	2	2	2	2	16							
1	Jumlah dokumen peraturan bidang keuangan	Dokumen	8	2	2	2	2	16							
5	Pengelolaan administratif perkantoran	Laporan	3	3	3	3	3	15							
1	Jumlah laporan pengelolaan administratif perkantoran	Laporan	3	3	3	3	3	15							
REKAPITULASI : PENDEKLOAN, HIMPUNAN DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDINGAN-UNDANGAN SERTA BAHAN HUKUM															
LENY ORGANISASI : BIRU HUKUM										34.000	36.300	42.720	48.457	51.000	213.670
SASARAN KEGIATAN															
1	Pengawasan produk hukum dan kebijakan hukum	Dokumen Orang	Jakarta	30	30	30	30	30	150	12.300	13.500	14.944	16.438	18.002	75.399
1	Jumlah produk hukum yang diproses	Dokumen	Jakarta	30	30	30	30	30	150						
2	Jumlah SDM yang dibina	Orang	Jakarta	320	320	320	320	320	1.600						
2	Bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum	Dokumen Orang	Jakarta	85	85	85	85	85	325	12.300	13.500	14.944	16.438	18.002	75.399
1	Jumlah perkara di Kementerian PU/PH yang ditangani	Dokumen	Jakarta	40	40	40	40	40	200						
2	Jumlah opini hukum, buku, dan pelajaran kejaksa yang diteliti	Dokumen	Jakarta	25	25	25	25	25	125						
3	Jumlah SDM yang dibina	Orang	Jakarta	310	310	310	310	310	1.550						

SARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Pengelolaan jengkal dokumentasi dan informasi hukum	Dokumen Orang	Jakarta	80	80	80	80	80	380	1.300	1.430	1.573	1.730	1.883	7.916
1	Jumlah dokumen hukum yang dibayarkan dalam jengkal dokumentasi dan informasi hukum	Dokumen	Jakarta	80	80	80	80	80	380						
2	Jumlah SDM yang dibina	Orang	Jakarta	40	40	40	40	40	200						
4	Proses penetapan rumah negara serta urusan pengalihan status rumah negara	Dokumen	Jakarta	80	80	80	80	80	400	700	770	847	932	1.020	4.274
1	Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan urusan pengalihan status rumah negara	Dokumen	Jakarta	80	80	80	80	80	400						
5	Pengelolaan administratif perkantoran	Laporan	Jakarta	4	4	4	4	4	20	8.200	8.620	9.022	10.014	10.000	58.000
1	Jumlah laporan pengelolaan administratif Perkantoran	Laporan	Jakarta	4	4	4	4	4	20						
REKAPITULASI : PENDEKLOAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAHAN PERKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN RAKYAT															
LENY ORGANISASI : BIRU BMN DAN LAYANAN PENGADAAN										30.000	35.000	35.750	38.500	48.571	188.821
SASARAN KEGIATAN															
1	Pengelolaan, pemantauan dan pembinaan BMN	Laporan Unit Konsep NSPK		30	30	30	30	63	183	21.000	26.300	21.310	22.281	23.900	108.490
1	Jumlah laporan pengelolaan dan pemantauan BMN	Laporan		12	12	12	12	14	64						
2	Jumlah laporan pengawasan Penganggaran dan Pengelolaan BMN	Laporan		6	6	6	6	6	30						
3	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem	Unit		1	1	1	1	1	5						
4	Jumlah konsep NSPK pengantar BMN	Konsep NSPK		0	3	3	3	3	12						
5	Jumlah laporan penatausahaan, Evaluasi dan Pemantauan Pengelolaan BMN	Laporan		6	6	6	6	6	30						
6	Jumlah laporan sosialisasi BMN	Laporan		5	5	5	5	5	25						
2	Pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akan label	Laporan		3	3	3	3	3	15	6.000	6.300	6.615	6.940	7.285	33.140
1	Penyenggaraan, Penyajian, Pelaksanaan, dan Pengada Layanan Pengadaan Barang / Jasa	Laporan		3	3	3	3	3	15						
3	Pengelolaan administratif Perkantoran	Dokumen		4	4	4	4	4	20	6.000	6.400	6.820	7.261	7.724	44.200
1	Jumlah laporan pengelolaan administratif Perkantoran	Dokumen		4	4	4	4	4	20						

SASARAN/ INDIKATOR KEMUDA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PROGRAM 2 : PEMBERKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASARAN PROGRAM															
1 Terselenggaranya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR															
1	Tingkat kelayakan belajar	%	Jakarta	55%	60%	75%	95%	100%	100%						
2	Tingkat laporan data dan teknologi informasi	%	Jakarta	80%	85%	80%	95%	100%	100%						
3	Tingkat laporan informasi politik	Layanan	Layanan	300	300	300	300	300	1020						
KEGIATAN 4 : PENGEMBANGAN, PONDOKAN, DAN PELAKSANA PENERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYA															
UNIT ORGANISASI : BIRO PONDOKAN DAN KUM JMMU															
SASARAN KEGIATAN															
1	Pekerjaan strategis bidang PU dan lainnya	Dokumen	Unit	40	40	40	40	40	200	172.678	231.470	225.368	44.890	45.900	718.446
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya	Dokumen	Unit	40	40	40	40	40	200						
2	Jumlah unit pelengkap yang dibangun	Unit	Unit	1	1	1	-	-	3						
KEGIATAN 5 : SURUNGAN MAULIBREIN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR															
UNIT ORGANISASI : BIRO UMUM															
SASARAN KEGIATAN															
1	Pelaksanaan urusan, Kemudahan/layanan dan Pertanggung	Laporan	Jakarta	5	5	5	5	5	25	106.547	147.854	167.625	176.886	186.786	765.614
1	Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan BMN Bina Lintas	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5	8.014	8.826	6.708	16.889	11.748	48.997
2	Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengawasan dan Kelembagaan di lingkungan Kementerian PUPR	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
3	Laporan Pengelolaan Pemasaran dan Jasa Jasa Gekung Kantor Pusat Kementerian PUPR	Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
2	Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Biro Urusan dan Sekretariat Jenderal	Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15	3.878	4.296	4.650	5.181	5.677	23.874
1	Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal	Laporan	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
3	Administrasi Perkantoran	Laporan	Jakarta	12	12	12	12	12	60	93.348	134.762	146.234	163.653	179.358	718.753
1	Laporan perkantoran	Laporan	Jakarta	12	12	12	12	12	60						

SASARAN/ INDIKATOR KEMUDA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KEGIATAN 1 : PENYELenggaraan DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERUMAHAN															
UNIT ORGANISASI : BIRO DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI															
SASARAN KEGIATAN															
1	Pendataan dan pengelolaan data dan TK	NDPK Orang Peta Buku Sistem		5 450 3 5 15	5 450 3 5 15	5 450 3 5 15	5 450 3 5 15	5 450 3 5 15	25 2.250 15 25 75	49.017	91.900	53.948	57.890	91.900	448.517
1	Jumlah NDPK pengembangan dan pelaksanaan TK di Kementerian PUPR yang selesai	NDPK		5	5	5	5	5	25						
2	Jumlah Sumber Daya Manusia TK yang selesai	Orang		450	450	450	450	450	2.250						
3	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	Sistem		3	3	3	3	3	15						
4	Jumlah Peta Tematik Bidang PU yang dihasilkan dan dipublikasikan	Peta		3	3	3	3	3	15						
5	Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PU-an yang diselesaikan	Buku		5	5	5	5	5	25						
6	Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Menerapkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU	Sistem		12	12	12	12	12	60						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		1	1	1	1	1	5	22.004	34.800	27.008	28.504	34.800	138.500
1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		1	1	1	1	1	5						
3	Pengelolaan data dan informasi Audio Visual Infrastruktur PUPR	Laporan		13	13	13	13	13	65	1.797	1.797	1.850	1.916	1.850	6.154
1	Jumlah Seder Yang Telah Didebita Data dan Informasi Audio Visualnya	Dokumen		7	7	7	7	7	35						
2	Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui laman Informasi Audio Visual	Laporan		4	4	4	4	4	20						
3	Laporan Kegiatan Pembinaan SDM Bidang Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual	Laporan		3	3	3	3	3	10						
4	Layanan publik PMP	Bulan		12	12	12	12	12	60	170	170	180	190	200	910
1	Jumlah Layanan Publik (PMS) PUPR	Bulan		12	12	12	12	12	60						
5	Pengelolaan administrasi Perkantoran (PAP)	Bulan		7	7	7	7	7	35	6.823	6.823	7.170	7.568	8.020	36.434
1	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran	Sektor (bidang)		7	7	7	7	7	35						
2	Jumlah Laporan Perkantoran	Bulan		12	12	12	12	12	60						

SASARAN/ INDIKATOR KEMERUKA	SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (RUTAL)						
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KEGIATAN 6: PENYELIDIKAN DAN PEMBIAYAAN INFORMASI PUBLIK															
UNIT ORGANISASI: SARO KOMUNIKASI PUBLIK															
SASARAN KEGIATAN															
1	Penyenggaraan dan pembinaan informasi publik	Laporan Publikasi Buku Penanaman Informasi	Jakarta	365	365	365	365	365	1.825	25.719	28.800	33.000	38.688	44.925	204.737
				80	80	80	80	80	400						
				339	339	339	339	339	1.389						
1	Jumlah peliputan kegiatan kerentanan	Laporan	Jakarta	365	365	365	365	365	1.825						
2	Jumlah publikasi	Publikasi	Jakarta	80	80	80	80	80	400						
3	Jumlah bahan informasi penerbitan	Buku	Jakarta	200	200	200	200	200	1.000						
4	Jumlah permintaan informasi	Permintaan Informasi	Jakarta	200	200	200	200	200	1.000						
2	Pengelolaan administrasi perkantoran	Dalam	Jakarta	12	12	12	12	12	60	19.303	26.800	26.500	31.000	32.900	163.457
1	Jumlah bulan layanan perkantoran	Selon	Jakarta	12	12	12	12	12	60						
PROGRAM 3: PEMBINAAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS AGENTOR PEMERINTAH PEREKONOMIAN UMUM DAN PEMUNAHAN BAKYAT															
SASARAN PROGRAM															
1	Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Risiko, Efisien dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kelembagaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									109.208	112.884	120.443	128.823	141.738	608.822
1	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	JAKARTA	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3						
2	Proentase Realisasi Hasil Pengawasan yang efektif, tepat dan pantas serta tepat waktu	%	JAKARTA	70%	75%	80%	85%	90%	95%						
3	Proentase Jumlah Unit Kerja/Sektor yang bersih dari penyimpangan material	%	JAKARTA	80%	85%	90%	95%	100%	100%						
KEGIATAN 7: LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN															
UNIT ORGANISASI: SEKTOR TEKNIK SIPERKANTOR JENDRAL															
SASARAN KEGIATAN															
1	Tersusunnya Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektoral Jenderal	Laporan	JAKARTA	8	8	8	8	8	41	84.878	90.583	73.303	78.498	66.325	370.827
				4	4	4	4	4	21	4.291	4.581	4.832	5.245	5.745	24.754
1	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Penanaman dan Penganggaran	Laporan	JAKARTA	4	4	4	4	4	21						
2	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Upr Keman, PU dan PR	Laporan	JAKARTA	2	2	2	2	2	10						
3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian, PU dan PR	Laporan	JAKARTA	2	2	2	2	2	10						

SASARAN/ INDIKATOR KEMERUKA	SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (RUTAL)						
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Tersendainya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan	JAKARTA	7	7	7	7	7	35	3.400	5.839	3.893	4.168	4.582	19.689
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut LHP	Laporan	JAKARTA	4	4	4	4	4	20						
3	Efektifitasnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	Laporan	JAKARTA	1	1	1	1	1	5						
4	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan	Laporan	JAKARTA	2	2	2	2	2	10						
3	Tersendainya Pelaksanaan Audit dan Auditte	Laporan Kep.	JAKARTA	13	13	13	13	13	65	11.575	12.383	13.256	14.178	15.088	66.989
1	Jumlah Laporan Kegiatan Seminars/Forum Koordinasi Sosialisasi Diseminasi/Simtek/Workshop/Rakret P-SDY kegiatan Depren bidang pengawasan	Laporan Kep.	JAKARTA	10	10	10	10	10	50						
2	Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Perencanaan Kebijakan dan Rencana Bidang Pengawasan	Laporan Kep.	JAKARTA	3	3	3	3	3	15						
4	Pengelolaan Layanan Administrasi Perbaikan, Kepegawaian & Ketatausahaan			18	18	18	18	18	90	44.823	47.981	51.318	54.918	66.481	256.413
1	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perbaikan	Laporan	JAKARTA	12	12	12	12	12	60						
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Laporan	JAKARTA	1	1	1	1	1	5						
3	Jumlah Laporan Kegiatan Dilat / Paralel / Auditum dan BLPB	Laporan Kep.	JAKARTA	5	5	5	5	5	25						
KEGIATAN 7: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPH DI BIREUPHAT I															
UNIT ORGANISASI: BIREUPHAT I															
SASARAN KEGIATAN															
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral I			148	148	148	148	148	708	9.292	9.932	10.827	11.371	12.988	53.721
				54	54	54	54	54	270	8.292	8.932	10.827	11.371	12.988	53.721
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral I	LHP	JAKARTA	54	54	54	54	54	270						
KEGIATAN 7: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPH DI BIREUPHAT II															
UNIT ORGANISASI: BIREUPHAT II															
SASARAN KEGIATAN															
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral II			84	84	84	84	84	420	7.398	7.576	8.470	8.963	9.989	42.817
				34	34	34	34	34	170	7.398	7.576	8.470	8.963	9.989	42.817
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral II	LHP	JAKARTA	34	34	34	34	34	170						

SARANAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KREDITAN 1 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELINGGAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASAR PUPPI DI INSPEKTORAT III															
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III															
SASARAN KREDITAN															
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral III	LHP	JAKARTA	148	148	148	148	148	708	11.591	11.832	12.787	13.961	15.827	64.837
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral III	LHP	JAKARTA	148	148	148	148	148	708						
KREDITAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELINGGAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASAR PUPPI DI INSPEKTORAT IV															
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV															
SASARAN KREDITAN															
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral IV	LHP	JAKARTA	88	88	88	88	88	408	8.820	9.447	93.109	10.318	11.888	51.089
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral IV	LHP	JAKARTA	88	88	88	88	88	408						
KREDITAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELINGGAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASAR PUPPI DI INSPEKTORAT V															
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V															
SASARAN KREDITAN															
1	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral V	LHP	JAKARTA	16	16	16	16	16	80	4.891	4.773	5.108	6.365	6.852	26.918
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektoral V	LHP	JAKARTA	16	16	16	16	16	80	3.907	4.074	4.350	4.664	5.130	22.034
2	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	LHP	JAKARTA	17	17	17	17	17	85	854	780	768	801	881	3.785
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	LHP	JAKARTA	17	17	17	17	17	85						
PROGRAM 4 : PENDEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
SASARAN PROGRAM															
1	Meningkatnya Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Penyelenggara Jabatan	%		90	95	98	95	75	75						
1	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Penyelenggara Jabatan	%		90	95	98	95	75	75						
KREDITAN 7 : PENYULUHAN PEMBINAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELINGGAHAN PENGENDALIAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEY BERTAS SIM															
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BAKAM															
SASARAN KREDITAN															
1	Dibangun Kemitraan	Laporan	Jakarta	50	51	51	52	51	255	329.440	276.395	380.805	376.078	361.397	1.524.528
1	Jumlah Laporan Pemantauan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10	182.150	154.430	146.909	99.176	177.487	722.487
2	Jumlah Laporan Kelembaga	Laporan	Jakarta	15	15	15	15	15	75						

SARANAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum	Laporan	Jakarta	13	13	13	13	13	65						
4	Jumlah Laporan Produk Hukum dan Keputusan Badan/SDM	Laporan	Jakarta	6	6	6	6	6	30						
5	Jumlah Laporan Layanan PMPD	Laporan	Jakarta	11	11	11	11	11	55						
6	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaa data dan informasi	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
7	Jumlah Laporan Bekerjasama/Perubahan Layanan Informasi	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
8	Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
9	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
10	Jumlah Laporan Pasca Pendidikan	Laporan	Jakarta	1	3	0	1	0	2						
2	ASN yang Terbaca	Orang	Jakarta	217	278	320	368	250	1.333	27.293	23.684	33.930	28.566	23.750	124.167
1	Jumlah ASN yang rekrut Pendidikan (Dalam negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	217	278	320	368	250	1.333						
3	Hasil Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Dokumen	Jakarta	4	4	4	4	4	20	4.890	5.390	2.490	2.008	2.890	15.068
1	Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM	Dokumen	Jakarta	4	4	4	4	4	20						
4	Pembangunan, Peringatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jakarta	6.706	6.789	3.099	2.006	3.089	17.906	43.290	26.393	16.930	12.068	13.893	107.468
1	Jumlah Pembangunan, Peringatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jakarta	6.706	6.789	3.099	2.006	3.089	17.906						
5	Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jakarta	246	119	110	110	150	688	4.890	5.890	6.950	6.918	6.890	26.488
1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jakarta	246	119	110	110	150	688						
6	ASN yang Terbaca	Orang	Jakarta	4.896	4.088	4.899	4.088	4.088	20.068	36.990	30.321	52.396	54.323	74.215	252.745
1	Jumlah ASN yang rekrut Pendidikan (Dalam negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	4.896	4.088	4.899	4.088	4.088	20.068						
7	Pembinaan Kompetensi, Assessment dan Penilaian Kinerja	Orang	Jakarta	6.629	6.620	6.620	6.629	6.620	33.108	45.930	46.593	54.456	56.395	65.885	274.759
1	Jumlah ASN yang terpapar yang dinilai melalui assessment center dan uji coba kerja	Orang	Jakarta	6.629	6.620	6.620	6.629	6.620	33.108						
2	Jumlah Pns yang dipantau kerjanya	Orang	Jakarta	0	0	0	0	0	0						

SARAN/INDIKATOR KEMERIA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (UTA)								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
KEGIATAN 2: PENYELIDINGAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KEMERIA																
UNIT ORGANISASI: PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KEMERIA																
SASARAN KEGIATAN																
1	Dukungan Manajemen	Laporan	Jakarta	99	18	18	99	18	99		99.000	68.890	71.848	78.679	88.822	303.537
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10		15.900	30.990	33.990	37.990	44.994	196.942
2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Saprasi	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5							
3	Jumlah Laporan Kegiatan Profesi/kegiatan sejenis, penemuan dan evaluasi	Laporan	Jakarta	13	13	13	13	13	65							
2	Sistem pengembangan SDM, Pengusunan Kebijakan Pelatihan, Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Pribadi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja	Dokumen	Jakarta	29	22	22	22	22	111		26.900	26.690	31.490	34.990	38.897	158.733
1	Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM	Dokumen	Jakarta	5	5	5	5	5	25							
2	Jumlah Dokumen Standar kompetensi, Instrumen penilaian kompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian dan indikator kinerja	Dokumen	Jakarta	4	4	4	4	4	20							
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment	Dokumen	Jakarta	6	6	6	6	6	30							
4	Jumlah Dokumen penyusunan dan pemeliharaan data base dan informasi sistem, kompetensi dan kinerja	Dokumen	Jakarta	3	3	3	3	3	15							
5	Jumlah dokumen roadmap model (strategi master plan) program unggulan/kecepatan	Dokumen	Jakarta	3	2	2	2	2	11							
6	Jumlah Dokumen Proyek Keseluruhan Pegawai dan Pejabat	Dokumen	Jakarta	2	2	2	2	2	10							
3	Penilaian Kompetensi, Assessment dan Penilaian Kinerja	Orang	Jakarta	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000		5.900	5.590	6.990	6.695	7.321	30.539
1	Jumlah PNS yang terpacat yang dinilai melalui asesmen center dan teknik lainya	Orang		0	0	0	0	0	0							
2	Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya	Orang	Jakarta	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000							
4	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jakarta	0	268	0	0	0	268		0	1.390	0	0	0	1.388
1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jakarta	0	200	0	0	0	200							

SARAN/INDIKATOR KEMERIA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (UTA)								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
KEGIATAN 3: PENYELIDINGAN PENCIDRAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI																
UNIT ORGANISASI: PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI																
SASARAN KEGIATAN																
1	Dukungan Manajemen	Laporan	Jawa Barat	165	195	165	165	195	827		96.900	101.740	187.514	119.344	138.448	557.852
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jawa Barat	2	2	2	2	2	10		15.900	29.990	31.490	34.990	38.990	151.932
2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Saprasi	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	1	1	5							
3	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	1	1	5							
4	Jumlah Laporan KAD	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	1	1	5							
5	Jumlah Laporan Pemas Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	0	1	0	0	1	2							
6	Jumlah Laporan Model Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	100	100	100	100	100	500							
2	ASN yang Tertatih	Orang	Jawa Barat	3.358	2.358	2.358	2.358	3.358	11.158		17.550	19.690	19.990	20.749	26.749	96.784
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	1.860	2.360	2.360	2.360	3.360	11.160							
3	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Model Red/Materi	Dokumen	Jawa Barat	12	12	12	12	12	60		9.900	8.990	9.990	10.648	11.713	48.941
1	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kebidanan	Dokumen	Jawa Barat	2	2	2	2	2	10							
2	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Model Kebidanan	Dokumen	Jawa Barat	10	10	10	10	10	50							
4	ASN yang Tertatih	Orang	Jawa Barat	458	375	375	358	350	1.968		51.900	41.778	45.956	52.791	58.670	250.443
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	458	375	375	358	350	1.968							
5	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jawa Barat	808	268	0	0	0	1.088		4.900	1.390	0	0	0	6.688
1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jawa Barat	800	200	0	0	0	1.000							
6	Penelitian dan Pengembangan	Unit	Jawa Barat	33	10	10	10	10	70		800	590	590	566	590	2.738
1	Jumlah Penelitian dan Pengembangan	Unit	Jawa Barat	33	10	10	10	10	70							
KEGIATAN 4: PENYELIDINGAN PENCIDRAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUBAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH																
UNIT ORGANISASI: PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUBAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH																
SASARAN KEGIATAN																
1	Dukungan Manajemen	Laporan	Jawa Barat	165	195	165	165	195	827		97.900	106.181	111.029	122.728	134.864	582.213
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jawa Barat	2	2	2	2	2	10		15.900	29.990	31.490	34.990	38.990	151.932
2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Saprasi	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	1	1	5							

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (RUTA)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	1	1	5						
4 Jumlah Laporan KAD	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	1	1	5						
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	0	1	0	0	1	2						
6 Jumlah Laporan Movev Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	100	100	100	100	100	500						
2 ASN yang Terlatih	Orang	Jawa Barat	2.460	2.750	2.750	2.850	2.850	13.850	22.850	24.383	24.283	25.164	25.164	126.944
1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	2.460	2.750	2.750	2.850	2.850	13.850						
3 Pengembangan Pola, Teknik, Kemitraan, dan Model Kelembutan	Dokumen	Jawa Barat	12	12	12	12	12	60	8.900	8.900	8.900	10.648	11.713	48.841
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kelembutan	Dokumen	Jawa Barat	2	2	2	2	2	10						
2 Jumlah Dokumen Kemitraan dan Model Kelembutan	Dokumen	Jawa Barat	10	10	10	10	10	50						
4 ASN yang Terdidik	Orang	Jawa Barat	250	375	375	388	390	1.708	32.850	41.778	45.956	52.791	68.870	291.443
1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	250	375	375	388	390	1.708						
5 Peningkatan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jawa Barat	500	200	0	0	0	700	3.900	1.300	-	-	-	4.200
1 Jumlah Peningkatan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jawa Barat	500	200	0	0	0	700						
6 Penataan dan Perangkapan	Unit	Jawa Barat	33	10	16	18	10	70	800	980	950	500	950	2.758
1 Jumlah Penataan dan Perangkapan	Unit	Jawa Barat	33	10	16	18	10	70						

KEGIATAN 5: PENCAPAIAN HUBUNGAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JEMAYAN Fungsional Fungsional

UNIT ORGANISASI: PUSAT PENELITIAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN Fungsional Fungsional

SASARAN KEGIATAN									79.800	74.885	85.668	108.339	118.793	275.887
1 Dukungan Manajemen									16.900	20.690	21.490	34.906	38.387	151.033
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran	Laporan	Jakarta	165	185	108	185	906	627						
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarana	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
4 Jumlah Laporan KAD	Laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	Jakarta	0	1	0	0	1	2						
6 Jumlah Laporan Movev Pelatihan	Laporan	Jakarta	100	100	100	100	100	500						

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (RUTA)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 ASN yang Terlatih	Orang	Jakarta	4.500	2.000	2.000	2.100	2.100	12.700	40.500	17.881	17.881	18.542	18.542	112.586
1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	4.500	2.000	2.000	2.100	2.100	12.700						
3 Pengembangan Pola, Teknik, Kemitraan, dan Model Kelembutan	Dokumen	Jakarta	12	12	12	12	12	60	8.900	8.900	8.900	10.648	11.713	48.841
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kelembutan	Dokumen	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
2 Jumlah Dokumen Kemitraan dan Model Kelembutan	Dokumen	Jakarta	10	10	10	10	10	50						
4 Pengembangan Jabatan Fungsional	Orang	Jakarta	90	90	90	90	90	288	2.500	2.350	3.825	3.328	3.880	13.283
1 Jumlah Jabatan Fungsional yang di rekrutasi, pengangkatan, penempatan dan pengembangannya	Orang	Jakarta	90	90	90	90	90	288						
5 ASN yang Terdidik	Orang	Jakarta	70	100	300	300	390	1.070	11.200	13.274	13.323	40.948	44.931	140.874
1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	70	100	300	300	390	1.070						
6 Peningkatan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jakarta	0	200	0	0	0	200	0	1.300	0	0	0	1.300
1 Jumlah Peningkatan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	RP	Jakarta	0	200	0	0	0	200						
7 Penataan dan Perangkapan	Unit	Jakarta	33	10	16	18	10	70	800	980	950	500	950	2.758
1 Jumlah Penataan dan Perangkapan	Unit	Jakarta	33	10	16	18	10	70						

PROGRAM 5: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SASARAN PROGRAM									518.668	688.820	771.988	798.891	818.190	3.507.728
1 Meningkatkan penerapan IPTK oleh Stakeholder									136.678	158.864	146.947	112.369	82.591	607.479
1 Jumlah Teknologi yang dimanfaatkan	Unit	Jakarta/Bandung	0	3	6	6	7	17						
2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dimanfaatkan	Mekal	Jakarta/Bandung	5	5	5	5	5	20						
2 Meningkatkan Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholder									44.902	55.820	79.778	93.771	82.836	308.278
1 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis	%	Jakarta/Bandung	72	74	78	79	80	80						
2 Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses pelayanan yang diberikan	%	Jakarta/Bandung	72	74	78	79	80	80						
3 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan aj laboretoris	%	Jakarta/Bandung	72	74	78	79	80	80						

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
REGISTRASI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBSIDIRI SUMBER DAYA AIR															
UNIT ORGANISASI - PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
SASARAN REGISTRASI															
1 Hasil riset dan pengembangan, pemertanian/pemertanian	Komponen Teknologi Prosiding DSP Unit Model	Jakarta	37	47	42	36	65	247	148.540	165.891	247.678	254.590	248.740	1.265.439	
			5	2	2	2	2	13	36.127	61.572	92.198	66.982	37.932	268.905	
			1	1	1	1	1	5							
	1 Jumlah kongres Teknologi (Model Riset, Model Sistem, Model Fiskal, Prototype, R-D) untuk menghasilkan 20 teknologi selama 5 tahun	Komponen Teknologi	Jakarta	37	47	42	36	65	247						
	2 Jumlah prosiding ilmiah, penelitian, pelatihan (TOT)	Prosiding DSP	Jakarta	5	2	2	2	2	13						
3 Model/teknologi RCTD	Unit Model	Jakarta	1	1	1	1	1	5							
2 Rekomendasi dan masukan kebijakan	Masalah Dokumen Laporan	Jakarta	55	14	35	24	32	119	6.912	11.452	20.481	26.240	23.932	66.977	
			23	38	39	30	38	143							
			8	8	8	8	8	40							
	1 Jumlah masalah kebijakan	Masalah	Jakarta	5	4	10	6	12	40						
	2 Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan	Dokumen	Jakarta	23	38	39	30	38	143						
3 Jumlah R-D	Masalah	Jakarta	10	10	15	15	25	70							
4 Jumlah laporan hasil penelitian laboratorium	Laporan	Jakarta	8	8	8	8	8	40							
3 Pemecahan, Monev, Kejelasan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya	Dokumen Unit	Jakarta	80	66	88	80	66	458	101.307	128.476	162.218	178.817	181.451	758.379	
			35	38	38	35	28	165							
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, GAJ dan administrasi kasabanku)	Dokumen	Jakarta	13	13	13	13	13	65						
	2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BSN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BSM)	Dokumen	Jakarta	21	21	21	21	21	105						
	3 Jumlah Pengadaan Sarana dan Peralatan (seluruh kegiatan penelitian)	Unit	Jakarta	35	38	38	25	28	143						
4 Jumlah Laporan Pemecahan dan Monev	Dokumen	Jakarta	29	29	29	29	29	145							
5 Jumlah Laporan Kejelasan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5							

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (RUTA)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
REGISTRASI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBSIDIRI JALAN DAN JEMBATAN															
UNIT ORGANISASI - PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
SASARAN REGISTRASI															
6 Jumlah Laporan Kepegawaian dan Cetak	Dokumen	Jakarta	7	7	7	7	7	35							
			7	7	7	7	7	35							
			12	12	12	12	12	60							
4 Layanan PIRP	Juta Rupiah	Jakarta	2.139	2.353	2.586	2.817	3.132	13.061	2.139	2.353	2.586	2.817	3.132	13.061	
	Juta Rupiah	Jakarta	2.139	2.353	2.586	2.817	3.132	13.061							
REGISTRASI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBSIDIRI JALAN DAN JEMBATAN															
UNIT ORGANISASI - PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
SASARAN REGISTRASI															
1 Hasil riset dan pengembangan, pemertanian/pemertanian	Komponen Teknologi Prosiding DSP	Bandung	40	36	28	53	0	117	171.540	188.033	236.588	243.625	257.528	1.298.740	
			1	1	1	1	1	5	42.845	31.852	24.219	12.325	6.966	117.736	
			40	36	28	53	0	117							
1 Jumlah kongres Teknologi (Model Riset, Model Sistem, Model Fiskal, Prototype, R-D) untuk menghasilkan 8 teknologi selama 5 tahun	Komponen Teknologi	Bandung	40	36	28	53	0	117							
2 Jumlah prosiding ilmiah, penelitian, pelatihan (TOT)	Prosiding DSP	Bandung	1	1	1	1	1	5							
2 Rekomendasi dan masukan kebijakan	Masalah Dokumen Laporan	Bandung	27	27	25	25	25	129	15.217	14.566	23.478	25.134	26.956	105.437	
			9	9	9	9	9	45							
			5	5	5	5	5	25							
	1 Jumlah masalah kebijakan	Masalah	Bandung	2	2	0	0	0	4						
	2 Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan	Dokumen	Bandung	9	9	9	9	9	45						
3 Jumlah R-D	Masalah	Bandung	25	25	25	25	25	125							
4 Jumlah laporan hasil penelitian laboratorium	Laporan	Bandung	5	5	5	5	5	25							
3 Pemecahan, Monev, Kejelasan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya	Dokumen Unit	Bandung	51	61	51	51	51	256	107.384	132.734	191.039	198.915	254.977	635.825	
			18	18	18	18	18	90							
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, GAJ dan administrasi kasabanku)	Dokumen	Bandung	10	10	10	10	10	50						
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BSN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BSM)	Dokumen	Bandung	5	5	5	5	5	25							

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (RUTAL)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Jumlah Pengadaan Sarana dan Peralatan (Seluruh kegiatan pengajaran)	Unit	Banding	10	18	18	18	18	90						
4	Jumlah Laporan Perencanaan dan Maner	Dokumen	Banding	14	14	14	14	14	70						
5	Jumlah Laporan Kinerja	Dokumen	Banding	6	9	9	9	9	45						
6	Jumlah Laporan Kepegawaian dan Organisasi	Dokumen	Banding	5	5	5	5	5	25						
7	Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kebidanan (Perputakaan, Jurnal, SMI dan HAKI)	Dokumen	Banding	6	8	8	8	8	30						
8	Jumlah Laporan Layanan Perencanaan (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	Dokumen	Banding	2	2	2	2	2	10						
4	Layanan PNEP	Juta Rupiah	Banding	6.309	7.150	7.995	8.662	8.517	39.553	6.309	7.150	7.965	8.652	9.517	39.553
1	Jumlah pemenuhan PNEP	Juta Rupiah	Banding	6.309	7.150	7.995	8.662	8.517	39.553						
KEGIATAN 3: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG FISIKA										524.680	137.420	175.158	171.820	174.831	773.249
LEWIT ORGANSISAS : PUSLITBANG PERUBAHAN SASARAN KEGIATAN										50.391	51.253	56.731	35.873	54.482	248.630
1	Hasil riset dan pengembangan, penemuan/pemerkfaatan	Komponen Teknologi	Banding	30	33	34	31	33	161						
		Providing DSP		11	18	18	10	18	51						
1	Jumlah korporasi teknologi (Nasabah, Model Sistem, Model Fisk, Prototype, R-D untuk menginisialisai teknologi selama 5 tahun)	Komponen Teknologi	Banding	30	32	34	31	33	160						
2	Jumlah prosiding, konferensi, seminar, pelatihan (TOT)	Providing DSP	Banding	11	10	10	10	10	51						
2	Rekomendasi dan masukan kebijakan	Masalah	Banding	21	21	21	21	21	105	8.437	8.553	8.668	8.110	8.830	36.374
		Dokumen	Banding	1	1	1	1	1	5						
		Laporan	Banding	7	8	8	8	8	36						
1	Jumlah nasihat kebijakan	Masalah	Banding	1	1	1	1	1	5						
3	Jumlah Dibakani Rekomendasi Teknis	Dokumen	Banding	1	1	1	1	1	5						
3	Jumlah R-D	Masalah	Banding	20	20	20	20	20	100						
4	Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium	Laporan	Banding	7	8	8	8	8	39						

SASARAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (RUTAL)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Perencanaan, Maner, Kinerja dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya	Dokumen	Banding	80	81	81	81	81	404	65.267	78.716	103.430	132.881	145.493	514.327
		Unit	Banding	10	17	18	17	18	57						
1	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (perencanaan administrasi keuangan, SA), dan administrasi keorganisasian)	Dokumen	Banding	11	11	11	11	11	55						
2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMD dan Hukum (Administrasi Umum, keorganisasian, kehumasan, dan BMD)	Dokumen	Banding	10	10	10	10	10	50						
3	Jumlah Pengadaan Sarana dan Peralatan (Seluruh kegiatan pengajaran)	Unit	Banding	10	17	18	17	18	57						
4	Jumlah Laporan Perencanaan dan Maner	Dokumen	Banding	15	13	13	13	13	66						
5	Jumlah Laporan Kinerja	Dokumen	Banding	6	7	7	7	7	34						
6	Jumlah Laporan Kepegawaian dan Organisasi	Dokumen	Banding	10	10	10	10	10	50						
7	Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kebidanan (Perputakaan, Jurnal, SMI dan HAKI)	Dokumen	Banding	13	13	13	13	13	65						
8	Jumlah Laporan Layanan Perencanaan (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	Dokumen	Banding	17	17	17	17	17	85						
4	Layanan PNEP	Juta Rupiah	Banding	2.469	2.997	3.363	3.845	4.421	19.975	2.411	2.907	3.363	3.845	4.421	19.926
1	Jumlah pemenuhan PNEP	Juta Rupiah	Banding	2.469	2.997	3.363	3.845	4.421	19.975						
KEGIATAN 4: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMUKJAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI										42.680	48.872	56.911	78.810	84.491	314.592
LEWIT ORGANSISAS : PUSLITBANG KEMUKJAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI										735	1.996	1.377	1.417	1.482	8.396
1	Hasil riset dan pengembangan, penemuan/pemerkfaatan	Providing DSP	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
1	Jumlah Prosiding, Konferensi, (Seminar, Pelatihan, TOT)	Providing DSP	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
2	Rekomendasi dan masukan kebijakan	Rekomendasi	Jakarta	10	13	13	13	13	70	12.223	18.110	24.708	27.380	30.374	113.896
1	Jumlah rekomendasi kebijakan	Rekomendasi	Jakarta	10	12	12	12	12	70						
3	Perencanaan, Maner, Kinerja dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya	Dokumen	Jakarta	39	38	38	38	38	192	28.428	27.794	38.008	41.176	53.741	198.820
		Unit	Jakarta	6	8	8	8	8	30						
1	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (perencanaan administrasi keuangan, SA), dan administrasi keorganisasian)	Dokumen	Jakarta	4	4	4	4	4	20						

SARANAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (RUT)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3) Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BHM dan Hukum (Administrasi umum, keorganisasian, keteknikan, dan BHM)	Dokumen	Jakarta	8	8	8	8	8	40						
3) Jumlah Pengadaan Sarana dan Peralatan (diikuti kegiatan pengisian)	Unit	Jakarta	6	6	6	6	6	30						
4) Jumlah Laporan Perencanaan dan Manaj	Dokumen	Jakarta	3	2	2	2	2	11						
4) Jumlah Laporan Kejasama	Dokumen	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
4) Jumlah Laporan Kepegawaian dan Organisasi	Dokumen	Jakarta	6	5	5	5	5	26						
7) Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana ketidangan (Perputakaan, Jemat, SMI dan HAKI)	Dokumen	Jakarta	8	8	8	8	8	40						
8) Jumlah Laporan Layanan Pekarasan (uji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perantara)	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
4) Layanan PMP	Juta Rupiah	Jakarta	827	891	790	837	828	3.836.467	615	991	768	837	920	3.825
1) Jumlah pembiayaan PMP	Juta Rupiah	Jakarta	827	891	790	837	828	3.836.467						

KEGIATAN 5: GURUKAWAN MAHALAKSINI DAN GURUKAWAN YOKUS LAINNYA BADAN LITBANG

UNIT OPERASIONAL : SEKRETARIAT BALITRANS														
SASARAN KEGIATAN														
SARANAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (RUT)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) Hasil riset dan pengembangan, generasi/pembaruan	Dokumen	Jakarta	8	8	8	8	8	40	5.559	7.531	65.163	48.830	53.891	224.858
1) Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi	Dokumen	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
3) Jumlah Penerapan Standar	Dokumen	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
2) Rekomendasi dan masukan kebijakan	Dokumen	Jakarta	2	2	2	2	2	10	1.735	1.895	2.813	2.833	2.791	11.877
1) Jumlah R-3 yang ditetapkan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
2) Jumlah Pemetaan Lab Pusat Utama dan Daerah	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
3) Perencanaan, Manaj, Kinerja dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya	Dokumen	Jakarta	25	25	25	25	25	125	25.289	28.237	38.162	48.282	43.302	177.708
Unit	Jakarta		3	3	3	3	3	15						
1) Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (perencanaan administrasi keuangan, SH, dan administrasi operasional)	Dokumen	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
3) Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BHM dan Hukum (Administrasi umum, keorganisasian, keteknikan, dan BHM)	Dokumen	Jakarta	5	5	5	5	5	25						

SARANAN/ INDIKATOR KEMERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (RUT)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3) Jumlah Pengadaan Sarana dan Peralatan (diikuti kegiatan pengisian)	Unit	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
4) Jumlah Laporan Perencanaan dan Manaj	Dokumen	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
5) Jumlah Laporan Kejasama	Dokumen	Jakarta	1	1	1	1	1	5						
6) Jumlah Laporan Kepegawaian dan Organisasi	Dokumen	Jakarta	6	6	6	6	6	30						
7) Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana ketidangan (Perputakaan, Jemat, SMI dan HAKI)	Dokumen	Jakarta	3	3	3	3	3	15						
8) Jumlah Laporan Layanan Pekarasan (uji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perantara)	Dokumen	Jakarta	2	2	2	2	2	10						